



KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 telah dapat diselesaikan.



Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam mencapai sasaran strategis. Sebagai wujud akuntabilitas dan pertanggungjawaban Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 melalui capaian yang dihasilkan atas sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara Periode Tahun 2017-2022.

Melalui media LKjIP ini diharapkan dapat digambarkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 sehingga akan diperoleh umpan balik dari berbagai pihak yang berkepentingan dan langkah nyata bagi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk melakukan perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Akhir kata, disampaikan terima kasih pada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKjIP sehingga dapat menjadi cermin bagi kita semua untuk melaksanakan evaluasi secara menyeluruh di tahun yang akan datang agar senantiasa memegang teguh prinsip transparansi, partisipatif dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan penyelenggaraan sistem akuntabilitas yang baik, akan memberikan kontribusi pada tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuju terwujudnya pelayanan prima di Kabupaten Banjarnegara.

Banjarnegara, Maret 2019

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO



DAFTAR ISI

	Halaman :
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
C. Lingkungan Strategis.....	4
D. Kondisi Ekonomi	7
E. Potensi Wilayah	8
F. Potensi Sumber Daya Manusia	12
G. Permasalahn dan Isu Strategis.....	16
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	29
A. Perencanaan Strategis	29
1. Visi dan Misi.....	29
2. Tujuan, Sasaran, Sestrategi dan Kebijakan.....	30
B. Instrumen Pendukung Pengelolaan Data Kinerja	37
C. Perjanjian Kinerja.....	42
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Pengukuran Kinerja	43
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	44
1. Evaluasi Capaian Kinerja	44
2. Analisis Capaian Kinerja	47
C. Realisasi Keuangan	118
BAB. IV PENUTUP	119



LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. Perjanjian Kinerja

II. Pengukuran Kinerja

III. Pernyataan Telah di Reviu



DAFTAR TABEL

	Halaman :
TABEL 1.1. : Komposisi Keanggotaan Partai Politik di DPRD Kabupaten Banjarnegara Hasil PEMILU Tahun 2014	4
TABEL 1.2. : Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara (di atas permukaan laut/ meter dpl)	6
TABEL 1.3. : Panjang Jalan di Kabupaten Banjarnegara 2014 – 2018 (km)	7
TABEL 1.4. : Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018 (persen)	8
TABEL 1.5 : Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 (Rp)	8
TABEL 1.6. : Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2018 (Ton)	9
TABEL 1.7. : Produksi Hortikultura di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2018 (Ton)	10
TABEL 1.8. : Populasi Tenak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 -2018 (Ekor)	10
TABEL 1.9. : Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Jenis Kelamin	12
TABEL 1.10. : Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2018	13
TABEL 1.11. : Jumlah Pencari Kerja yang Ditempatkan Bekerja Tahun 2014 – 2018	13
TABEL 1.12 : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjarnegara Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang Tahun 2014 - 2018	15
TABEL 1.13. : Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2013-2017 (keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018)	15
TABEL 3.1. : Skala Nilai Peringkat Kinerja	43
TABEL 3.2 : Indeks Ketentraman dan Ketertiban	48
TABEL 3.3 : Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Banjarnegara	50
TABEL 3.4 : Indeks Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara	52
TABEL 3.5 : Persentase Pemilih Dalam Pemilu	53
TABEL 3.6. : Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	55
TABEL 3.7 : Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	59
TABEL 3.8 : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2018	61



Halaman :		
TABEL 3.9	: Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018	61
TABEL 3.10	: Strata Desa di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018	65
TABEL 3.11	: Kondisi Jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018	67
TABEL 3.12	: Kondisi Jalan Kabupten Banjarnegara Tahun 2014-2018	68
TABEL 3.13	: Luasan Sawah yang dialiri Irigasi Kondisi Baik	70
TABEL 3.14	: Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013-2017	74
TABEL 3.15	: Nilai Tukar Petani Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	75
TABEL 3.16	: NTP Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018	76
TABEL 3.17	: Persentase Kunjungan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	78
TABEL 3.18	: Kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	80
TABEL 3.19	: Persentase Koperasi Sehat Tahun 2014-2018	81
TABEL 3.20	: Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	83
TABEL 3.21	: Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 - 2018	85
TABEL 3.22	: Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional	85
TABEL 3.23	: Industri Pengolahan Kabupaten Banjarnegara	88
TABEL 3.24	: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	90
TABEL 3.25	: Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	92
TABEL 3.26	: Inflasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018	87
TABEL 3.27	: Inflasi Berdasar Komoditas Tahun 2017 dan 2018	94
TABEL 3.28	: Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	95
TABEL 3.29	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2018	97
TABEL 3.30	: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018	97
TABEL 3.31	: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	102
TABEL 3.32	: Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2014-2018	104



	Halaman :
TABEL 3.33 : Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menghuni Rumah Layak Huni	106
TABEL 3.34 : Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017	108
TABEL 3.35 : Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2017	109
TABEL 3.36 : Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017	111
TABEL 3.37 : Angka Usia Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017	113
TABEL 3.38 : Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017	114
TABEL 3.39 : Pesentase Penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	115
TABEL 3.40 : Angka Kemiskinan Eks – Karesidenan Banyumas dan Kabupaten yang Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara	116
TABEL 3.41 : Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018	118



DAFTAR GAMBAR

	Halaman :
Gambar 2.1. : Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA)	37
Gambar 2.2. : Aplikasi SIMDA Keuangan	38
Gambar 2.3. : Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)	38
Gambar 2.4. : Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)	39
Gambar 2.5. : Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)	40
Gambar 2.6. : Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)	40
Gambar 2.7. : Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Kemiskinan	41
Gambar 2.8. : Aplikasi E-Sakip	42
Gambar 2.8. : Aplikasi Sistem Peta Investasi (Simpetin)	42



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana telah diamanatkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998 perlu diterapkan sistem pertanggungjawaban yang sistematis, jelas, terukur dan tepat waktu. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Disempurnakan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Berdasarkan dokumen perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 Penyusunan LKjIP Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 diharapkan dapat :

1. Memberikan informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, laporan kinerja atas prestasi kerja yang telah dicapai berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan pada awal tahun melalui Perjanjian Kinerja (PK) disertai dengan penjelasan yang memadai atas capaian kinerja yang telah dilaksanakan.
2. Mendorong Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk dapat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undang yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
3. Menjadikan Kabupaten Banjarnegara akuntabel, sehingga dapat bekerja secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan.
4. Menjadikan masukan dan umpan balik dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.



5. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat di Banjarnegara terhadap penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

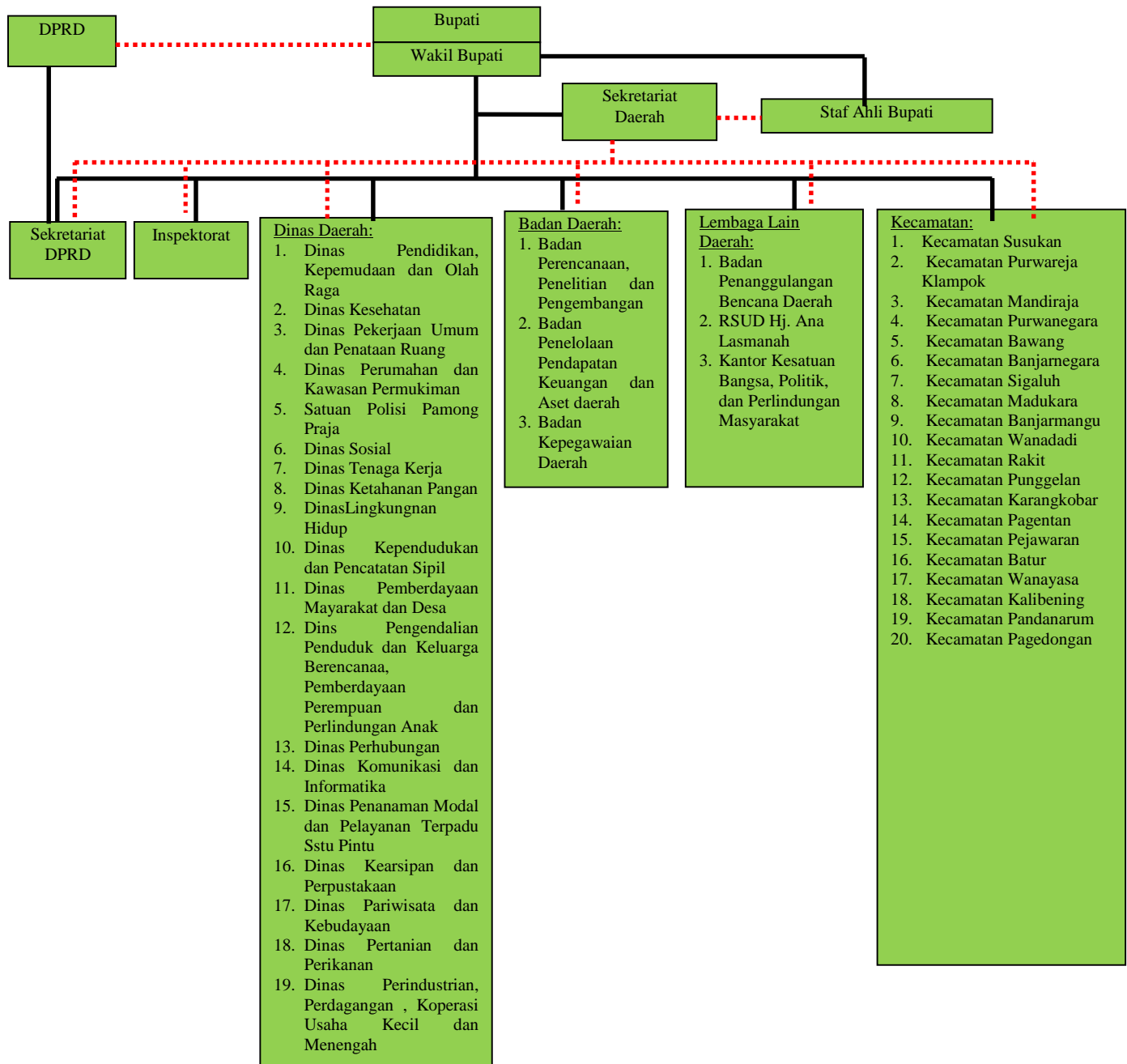
1. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah melakukan restrukturisasi kelembagaan atau lebih dikenal dengan Penataan Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

2. Susunan Organisasi

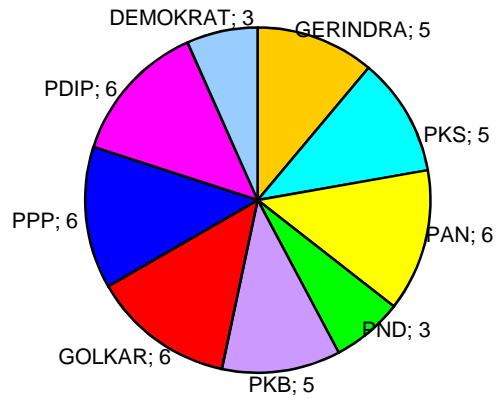
Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten adalah sebagai berikut :



Berjalannya pemerintahan di daerah sangat ditentukan oleh kerja sama dan dukungan dari masyarakat yang diwakili DPRD. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Komposisi Keanggotaan DPRD Kabupaten Banjarnegara menurut keterwakilan Partai Tahun 2014 yang ada saat ini terdiri dari 45 anggota sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Keanggotaan Partai Politik di DPRD Kabupaten Banjarnegara
Hasil Pemilu 2014



Sumber Data : Sekretariat DPRD Kabupaten Banjarnegara

C. LINGKUNGAN STRATEGIS

1. KEADAAN GEOGRAFI

a) Letak Geografis.

Secara Astronomi Kabupaten Banjarnegara terletak. diantara 7 12' - 7 31' Lintang Selatan dan 109 29' 10" – 109 45'50" Bujur Timur.

b) Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Batang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.

c) Luas Wilayah :

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara: 106.970,997 Ha atau sebesar 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 20 Kecamatan (12 Kelurahan dan 266 Desa). Dari 20 Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kecamatan Punggelan merupakan wilayah kecamatan terluas dengan luas wilayah 10.284,01 Ha atau sebesar 9,614% dari luas Kabupaten Banjarnegara dan terdiri dari 17 desa.



2. KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI

a) Klimatologi

Ditinjau dari iklim yang ada, Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari pada bulan kering. Rata-rata curah hujan di wilayah Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2017 lebih rendah yaitu 4.923 mm dibandingkan dengan Tahun 2016 yaitu 5.542 mm.

b) Sumber Daya Air

Dari segi hidrologi, berbagai mata air yang ada di Kabupaten Banjarnegara merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan rumah tangga, irigasi, industri maupun kebutuhan lain seperti wisata arung jeram. Sumber air tersebut antara lain berupa sungai-sungai besar, air tanah yang terdapat di sekitar Gunung Brama, Gunung Kubang, Gunung Prah, Gunung Raja, Gunung Raga Jembangan, Gunung Petarangan dan di lembah sungai Serayu dan beberapa telaga seperti Telaga Balaikambang, Telaga Sewiwi dan Telaga Merdada.

Disamping sungai, air tanah dan telaga, Banjarnegara juga memiliki waduk buatan PLTA Panglima Besar Sudirman yang dikembangkan untuk pembangkit tenaga listrik, pengairan sawah dan sebagai obyek pariwisata.

c) Panjang Saluran Irigasi

Untuk mendukung potensi pertanian dimana lahan persawahan adalah menjadi salah satu medianya, aliran sungai besar di Kabupaten Banjarnegara dimanfaatkan sebagai saluran irigasi baik irigasi primer, sekunder maupun tersier. Keseluruhan panjang saluran irigasi primer di Kabupaten Banjarnegara adalah 140.589 m, saluran irigasi sekunder sepanjang 403.787 m dan saluran irigasi tersier sepanjang 418.222 m. Jenis saluran primer terpanjang terletak di Kecamatan Susukan sepanjang 21.600 m atau 15,36% dari panjang saluran irigasi primer. Jenis saluran sekunder terpanjang di Kecamatan Punggulan sepanjang 35.645 m atau 8,83% dari panjang keseluruhan irigasi sekunder, sedangkan jenis saluran tersier terpanjang terletak di Kecamatan Mandiraja sepanjang 81.410 m atau 19,47% dari panjang keseluruhan saluran irigasi tersier.

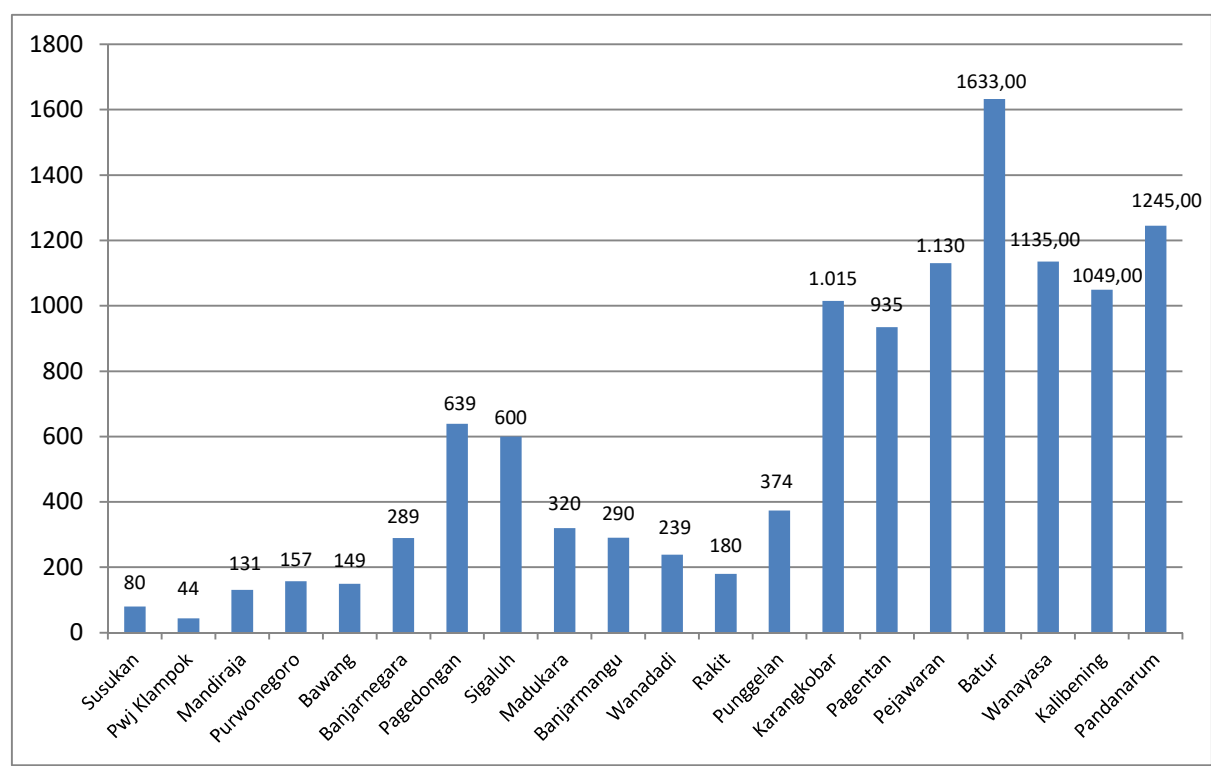
3. TOPOGRAFI

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Topografi wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beranekaragam yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan dengan pegunungan yang landai hingga curam. Ditinjau dari segi ketinggian di wilayah Kabupaten Banjarnegara, maka



Kecamatan Purwareja Klampok merupakan wilayah terendah yaitu 44 mdpl dan yang tertinggi adalah wilayah Kecamatan Batur yaitu 1.633 mdpl. Ketinggian wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dapat dibedakan sebagaimana tersebut dalam tabel berikut :

Tabel I.2
Ketinggian Wilayah Kota Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara
(di atas permukaan laut/mdpl)



Sumber Data : Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2017

4. ZONASI WILAYAH

Atas dasar topografi, jenis tanah, ketinggian wilayah dan keadaan hidrologi/ sumber air, wilayah Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi tiga zona wilayah sebagai berikut:

- a) Zona Utara: disebut Pegunungan Kendeng Utara yang berketinggian antara 600-2.500 mdpl, berbukit, curam, banyak air dan subur meliputi: Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa, Karangobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan Banjarmangu. Komoditi: sayur mayur, jamur, teh, sapi potong, domba dan pariwisata.
- b) Zona Tengah: disebut Pegunungan Serayu Utara merupakan daerah landai yang membujur dari barat ke timur sepanjang Sungai Serayu yang mempunyai ketinggian 40-300 mdpl. Daerah ini relatif datar, banyak air/irigasi dan subur. Meliputi:sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang, Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit, Wanadadi dan Banjarmangu.



Komoditi: padi, palawija, ikan air tawar, kayu, pariwisata, salak, obyek wisata dan PLTA Mrica.

- c) Zona Selatan: disebut Pegunungan Serayu Selatan merupakan pegunungan kapur, berbukit, bergelombang, curam, sedikit air dan gersang. Daerah pegunungan ini mempunyai ketinggian 300-600 mdpl, meliputi: Kecamatan Sigaluh, sebagian besar dari Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, Mandiraja dan sebagian Kecamatan Susukan. Komoditi: Bahan Tambang Galian C, ketela pohon, bambu, kelapa.

5. INFRASTRUKTUR DASAR

Infrastruktur dasar seperti gedung, jalan, jembatan memegang peran penting dalam merangsang dinamika ekonomi dan sosial masyarakat. Adapun panjang jalan di Kabupaten Banjarnegara dalam kondisi baik, sedang, rusak, dan rusak berat, sebagaimana tampak pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Panjang Jalan di Kabupaten Banjarnegara
2014 - 2018 (km)

Kondisi Jalan	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Baik	402,906	493.695	542.942	663.465	658.062
Sedang	222,774	149.795	166.099	54.421	46.532
Rusak Ringan	116,398	109.408	79.160	148.15	131.569
Rusak Berat	146,333	135.513	134.660	97.35	102.530
Jumlah	888,411	888.411	922.861	963.386	938.693

Sumber Data: DPUPR Kabupaten Banjarnegara

D. KONDISI EKONOMI

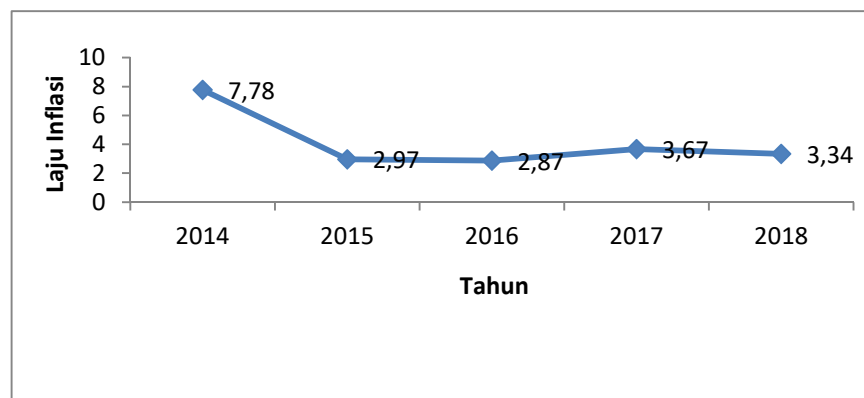
1. PENDAPATAN REGIONAL DOMESTIK BRUTO

Kondisi perekonomian daerah secara umum diwujudkan dalam bentuk PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sebagai alat untuk mengukur tingkat pertumbuhan keberhasilan perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan proyeksi Baperlitbang PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp20.808.616,73 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada Tahun 2018 sebesar Rp14.387.540,14. Pada Tahun 2017 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar Rp18.761.929,35 dan PDRB Atas Dasar harga Konstan sebesar Rp13.646.485,04.

2. LAJU INFLASI

Perubahan harga di suatu wilayah akan berpengaruh terhadap angka inflasi yang merupakan salah satu indikator stabilitas perekonomian. Laju inflasi dipengaruhi oleh naik turunnya produksi barang dan jasa, distribusi serta peredaran uang di suatu daerah. Adapun laju inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.4
Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 - 2018 (persen)



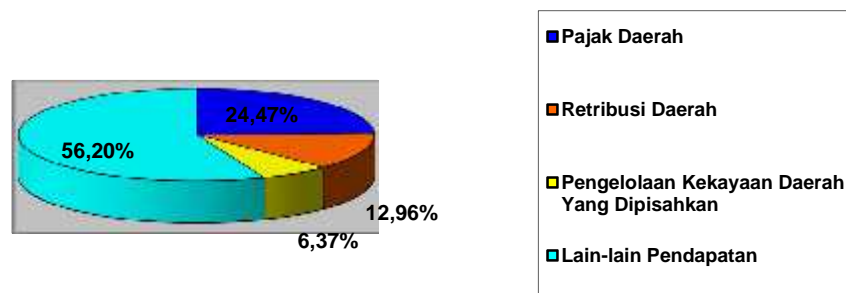
Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

3. PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah merupakan cermin dari kemandirian fiskal daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Seiring dengan dilimpahkannya kewenangan untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pedesaan Perkotaan (PBB PP) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berupaya maksimal untuk terus dapat meningkatkan derajat fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang ada.

Adapun komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel I.5
Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018



Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara



E. POTENSI WILAYAH

1. POTENSI SUMBER DAYA ALAM

a) Pertanian

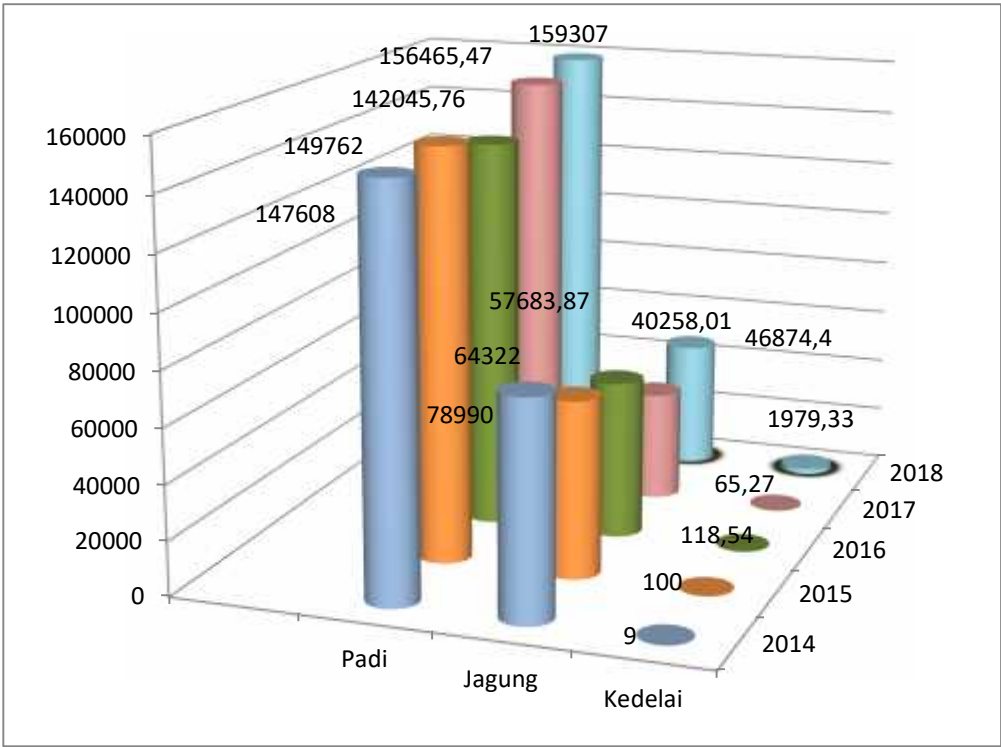
Sebagian besar potensi pertanian di Kabupaten Banjarnegara adalah pertanian bukan sawah. Dari luas Kabupaten Banjarnegara keseluruhan, lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian bukan sawah adalah seluas 72.789 Ha atau 68,05%, untuk pertanian sawah seluas 14.269 Ha atau 13,34% sedangkan 19.913 Ha atau 18,61% merupakan lahan bukan pertanian.

Budi daya pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Banjarnegara dibedakan menjadi dua, yaitu komoditas tanaman pangan dan komoditas tanaman hortikultura yang terdiri dari buah-buahan dan sayuran.

Komoditas tanaman pangan yang dikembangkan meliputi padi, jagung dan kedelai. Sedangkan untuk hortikultura jenis buah-buahan yang dikembangkan adalah durian, salak dan pisang. Untuk hortikultura sayuran hanya kentang yang menjadi unggulan.

Adapun produksi padi dan hortikultura selama beberapa tahun adalah sebagai berikut:

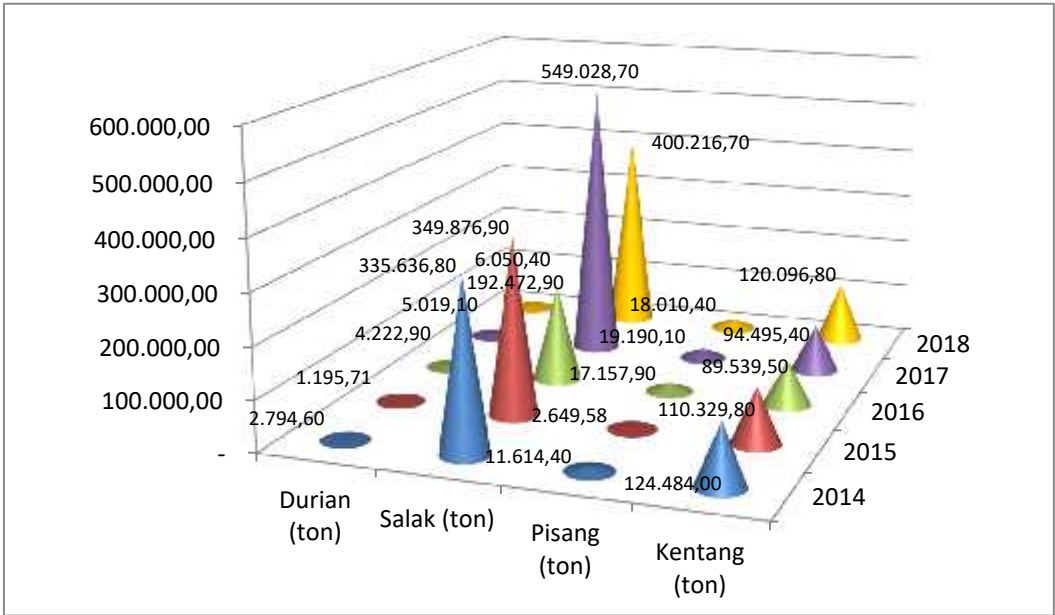
Tabel : I.6
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014-2018 (Ton)



Sumber Data : Distankan Kabupaten Banjarnegara



Tabel : I.7
Produksi Hortikultura Kabupaten Banjarnegara
Pada Tahun 2014-2018 (ton)



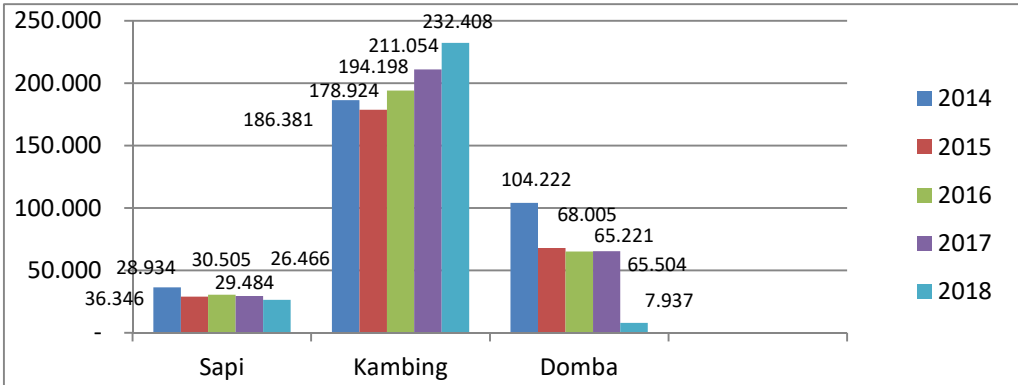
Sumber Data :Distankan Kabupaten Banjarnegara

b) Peternakan

Ternak yang dipelihara oleh masyarakat Kabupaten Banjarnegara terdiri dari 3 kelompok yaitu ternak besar, ternak kecil dan unggas. Ternak yang masuk dalam kategori ternak besar antara lain sapi, kerbau dan kuda, sedangkan ternak yang masuk kedalam kategori ternak kecil antara lain kambing, domba, babi dan kelinci sementara yang masuk dalam kategori unggas adalah kelompok ayam dan itik. Namun peternakan yang penting dan prioritas untuk dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah ternak kambing, domba dan sapi.

Adapun populasi ternak apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel : I.8
Populasi Ternak Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014-2018 (Ekor)



Sumber Data :Distankan Kabupaten Banjarnegara

c) Perikanan

Budi daya ikan air tawar yang dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kolam pembenihan, kolam pembesaran, mina padi, jaring apung dan perikanan sawah. Adapun jenis ikan yang menjadi komoditas unggulan adalah ikan gurameh dan ikan nila. Selain budidaya ikan, yang menjadi unggulan di Kabupaten Banjarnegara adalah produksi Benih Ikan dengan unggulannya adalah ikan nila dan ikan patin. Benih ikan dari Banjarnegara menjadi pemasok utama untuk mencukupi benih ikan di Jawa Tengah.

d) Perkebunan

Tanaman perkebunan yang menjadi unggulan dan dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara meliputi kopi, kelapa dalam, kelapa deres, teh, tembakau dan lada. Selain itu di Kabupaten Banjarnegara juga dikembangkan tanaman obat-obatan seperti lada, jahe, kunyit, pohon dilem/nilam dan beberapa jenis tanaman obat lain yang memiliki nilai ekonomis cukup tinggi.

2. POTENSI SUMBER DAYA ENERGI

Potensi sumber daya energi yang ada di Kabupaten Banjarnegara meliputi Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA) Panglima Besar Sudirman dengan kemampuan daya 180 Mega Watt (MW). Disamping itu juga terdapat PLTA Tulis di Kecamatan Madukara dengan kemampuan daya 12 MW dan Pembangkit Listrik Tenaga Geotermal (PLTG) Dieng di Kecamatan Batur dengan kemampuan daya 60 MW.

3. POTENSI INDUSTRI

Sektor industri merupakan sektor penting selain sektor pertanian di Kabupaten Banjarnegara. Sektor Industri dibedakan menjadi industri besar dengan nilai investasi di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sejumlah 5 perusahaan. Industri menengah nilai investasi Rp500.000.000,00– Rp10.000.000.000,00 sejumlah 58 perusahaan. Industri kecil dengan dengan nilai investasi sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sejumlah 262 industri.

4. POTENSI PARIWISATA

Potensi wisata yang banyak dikembangkan di Kabupaten Banjarnegara adalah wisata alam. Adapun obyek wisata yang ada di Kabupaten Banjarnegara antara lain

- Kawasan Wisata Dataran Tinggi Dieng.
- Wisata Rekreasi Khusus Arung Jeram Sungai Serayu.
- Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas.



- Pusat Seni dan Kerajinan Keramik Klampok.
- Wisata Tirta Waduk Pangsar Sudirman.
- Taman Rekreasi Anglir Mendung Paweden.
- Wisata Alam Curug Pitu
- Wisata Alam Curug Sikopel.
- Wisata Alam Air Panas dan Curug Biting.
- Wisata Air Panas Kali Putih.
- Curug Pletuk dikelola oleh Perhutani.
- Serayu Park.
- Surya Yudha Sport Center.

F. **POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA**

1. **KEPENDUDUKAN**

Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 sejumlah 1.011.045 jiwa atau meningkat sejumlah 7.061 jiwa atau 0,70 % dari jumlah penduduk tahun 2017 sejumlah 1.003.984 jiwa. Dari 1.011.045 jiwa yang berjenis kelamin laki-laki 516.192 jiwa atau 51,06 %, dan berjenis kelamin perempuan 494.853 jiwa atau sebesar 48,94%. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan trend jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 9
Jumlah Penduduk Kabupaten Banjarnegara
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2014-2018

NO	Jenis Kelamin	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	Laki –laki	501.978	506.907	510.395	512.082	516.192
2.	Perempuan	482.485	489.665	491.461	491.902	494,853
	JUMLAH	984.463	996.572	1.001.856	1.003.984	1,011,045

Sumber Data : Dindukcapil Kabupaten Banjarnegara

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata, kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah Kecamatan Punggelan yaitu sebanyak 85.700 jiwa atau 8,48% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara atau meningkat 0,37% dari Tahun 2017. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan Pandanarum dengan jumlah penduduk 23,018 jiwa atau 2,28% dari jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara atau meningkat 0,27%.



Untuk tingkat kepadatan penduduk Tahun 2018 adalah sebesar 945,16 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Banjarnegara yaitu sebesar 2.644,02 jiwa per Km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah Kecamatan Pandanarum 274,74 jiwa per Km².

2. **KETENAGAKERJAAN**

Tingkat pertumbuhan penduduk Kabupaten Banjarnegara sebesar 0,70% berimplikasi pada penyediaan kebutuhan pokok masyarakat dan kesempatan memperoleh lapangan pekerjaan. Adapun banyaknya pencari kerja yang terdaftar menurut jenis kelamin dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tersebut pada tabel berikut:

Tabel I. 10
Banyaknya Pencari Kerja yang Terdaftar menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Pencari kerja		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tahun 2014	3.691	3.958	7.649
Tahun 2015	3.251	3.410	6.661
Tahun 2016	3.643	3.864	7.507
Tahun 2017	3.600	3.773	7.376
Tahun 2018	2.750	3.368	6.118

Sumber Data : Disnaker Kabupaten Banjarnegara

Sedangkan jumlah pencari kerja yang ditempatkan kerja pada Tahun 2014 sampai 2018 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I. 11
Jumlah Pencari Kerja Yang Ditempatkan Bekerja
Tahun 2014 -2018

No	Penempatan Tenaga Kerja	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	AKL	2.564	3.593	3.482	1.875	986
2.	AKAD	239	178	509	657	699
3.	AKAN	581	629	673	686	867
4.	INFORMAL	-	-	-		4.445
	JUMLAH	3.384	4.400	4.664	3.218	6.980

SumberData : Disnaker Kabupaten Banjarnegara

3. MATA PENCAHARIAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdapat 89 jenis mata pencaharian penduduk Kabupaten Banjarnegara. Sebagian besar penduduk Kabupaten Banjarnegara yang bekerja masih didominasi oleh petani/pekebun mencapai 225.008 orang atau 22,25%, diikuti oleh penduduk bekerja mengurus rumah tangga sebesar 165.396 orang atau 16,36%, Pelajar/Mahasiswa dengan jumlah 148.729 orang atau 14,71%.

4. PENDIDIKAN PENDUDUK

Jika dilihat dari segi pendidikan, sebagian besar penduduk di Kabupaten Banjarnegara berpendidikan SD/MI/Sederajat. Adapun jumlah penduduk berpendidikan SD/MI/Sederajat yaitu sejumlah 383.350 orang atau 37,92%, tidak/belum sekolah sejumlah 193.432 orang atau 19,13%, tidak tamat SD sejumlah 145.330 orang atau 14,37%, SLTP/MTs/Sederajat sejumlah 147.166 orang atau 14,55%, SMA/Sederajat sejumlah 110.346 orang atau 10,91%. Sedangkan jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II sejumlah 4.694 orang atau 0,46%, Diploma III sejumlah 6.068 orang atau 0,6%, Strata I sejumlah 19.830 orang atau 1,96%, Strata II sejumlah 781 orang atau 0,08% dan Strata III sejumlah 48 orang atau 0,005%.

5. KESEHATAN

Penanganan kesehatan di Kabupaten Banjarnegara saat ini mengutamakan peningkatan dan pemeliharaan kesehatan serta ketersediaan sumber daya kesehatan. Sarana Kesehatan di Kabupaten Banjarnegara meliputi pelayanan kesehatan dasar berupa Puskesmas Perawatan (15 unit), Puskesmas Non Perawatan (20 unit), Puskesmas Pembantu (39 unit), Puskesmas Keliling (37 unit), serta untuk pelayanan kesehatan rujukan Rumah Sakit Pemerintah (1 unit), Rumah Sakit Swasta (2 unit), laboratorium pemerintah (1 unit), Apotek (58 unit) dan posyandu (1.621).

6. KESEJAHTERAAN SOSIAL

Salah satu indikator kesejahteraan masyarakat tercermin dari jumlah Panyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan penanganan terhadap PMKS. Berdasarkan data Tahun 2018 jumlah PMKS yang ada di Kabupaten Banjarnegara adalah 89.514 jiwa.



7. KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR PEMERINTAH

Sukses tidaknya penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, salah satu faktor keberhasilan pelayanan tersebut adalah tersedianya aparatur atau Pegawai Pemerintah Daerah Otonom. Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang, maka selengkapnya kondisi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. I.12
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Pangkat Golongan Ruang
(Keadaan Tahun 2014-2018)

NO	PANGKAT	GOL.	JML PEG. 31-12-2014	JML PEG. 31-12-2015	JML PEG. 31-12-2016	JML PEG. 31-12-2017	JML PEG. 31-12-2018
1.	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	4	4	4	4	2
3.	Pembina Utama Muda	IV/c	22	24	21	19	17
4.	Pembina Tk. I	IV/b	99	105	130	147	175
5.	Pembina	IV/a	3.707	3.526	3.080	2.892	2.627
6.	Penata Tk. I	III/d	837	877	791	850	765
7.	Penata	III/c	860	856	746	758	733
8.	Penata Muda Tk. I	III/b	865	1.034	1.090	1.164	1.115
9.	Penata Muda	III/a	970	1.339	1.078	977	982
10.	Pengatur Tk.I	II/d	368	394	362	270	297
11.	Pengatur	II/c	402	507	514	765	786
12.	Pengatur Muda Tk. I	II/b	562	475	416	391	310
13.	Pengatur Muda	II/a	343	367	317	220	177
14.	Juru Tk. I	I/d	88	47	53	59	59
15.	Juru	I/c	107	192	165	155	140
16.	Juru Muda Tk. I	I/b	86	45	29	18	7
17.	Juru Muda	I/a	2	6	6	6	3
	J U M L A H		9.322	9.798	8.802	8.695	8.195

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara

Sedangkan jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan tingkat pendidikan keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel I.13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah di Kabupaten Banjarnegara
Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014 s.d 2018
(keadaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018)

No	Tingkat Pendidikan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
		Jumlah	%	Jumlah	%	%	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Strata 2 (S-2)	268	2,86	276	2,82	244	2,77	234	2,69	224	2,73
2	Strata 1 (S-1)	5.364	57,28	5.878	60,00	5.281	60,00	5.174	59,51	4.948	60,38
3	D 4	59	0,63	64	0,65	58	0,66	89	1,02	93	1,13
4	D. III /Sarmud	767	8,19	772	7,88	762	8,66	951	10,94	905	11,04
5.	D. I / II	799	8,53	689	7,03	517	5,87	454	5,22	394	4,81
6.	SLTA	1.632	17,43	1.642	16,75	1.525	17,33	1.419	16,32	1.297	15,83
7.	SLTP	278	2,97	337	3,44	300	3,40	273	3,14	249	3,04
8.	SD	155	1,66	140	1,43	115	1,31	101	1,16	85	1,04
	Jumlah	9.322	100	9.798	100	8.802	100	8.695	100	8.195	

Sumber Data : BKD Kabupaten Banjarnegara

G. PERMASALAHN DAN ISU STRATEGIS

1. PERMASALAHAN

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

- a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Prtisipasi Murni (APM), khususnya pada jenjang SMP/MTs/Paket B yang capaian APM-nya hanya mencapai 64,10% .
- b. Belum optimalnya kualitas penyelenggaraan pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian angka rata-rata UN SD/MI yang sebesar 7,76, angka rata-rata UN SMP/MTs yang sebesar 5,54.



- c. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran. Hal ini antara lain terlihat dari rasio ketersediaan sekolah yang hanya sebesar 73,02%, ketersediaan laboratorium IPA yang sesuai SPM yang hanya sebesar 64,15%, dan ketersediaan buku teks yang layak sesuai SPM yang baru tercapai 72,14%.

2) Kesehatan

- a. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Hal ini antara lain terlihat dari capaian Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 120,30 per 100.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Bayi (AKB) sebesar 13,17 per 1000 kelahiran hidup. Masih ditemukannya balita gizi buruk (capaian 0,05%) dan balita di bawah garis merah (capaian 0,35%), cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada keluarga miskin yang baru mencapai 22,6%, dan cakupan ibu hamil yang mendapat 90 tablet Fe yang baru mencapai 89,23% sehingga perlu optimalisasi pelayanan kesehatan dasar dan rujukan kesehatan ibu dan anak.
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda penyakit dan penyakit degeneratif. Hal ini terlihat dari kasus *Acute Flacid Paralysis* (AFP) sebanyak 5 kasus, penemuan pasien baru TB BTA (+) 32,5%, dan jumlah penderita malaria baru (API) 0,21%. HIV AIDS sebanyak 34 Kasus, Peningkatan kasus Hipertensi dan Diabetes Militus.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal dan belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 48,86%, persentase penduduk yang tidak buang air besar sembarangan yang baru mencapai 48,7%, cakupan perilaku hidup bersih dan sehat strata utama dan paripurna 72,9%.
- d. Belum terpenuhinya standar pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Hal ini terlihat dari jumlah UPTD Puskesmas yang sudah terakreditasi 12 UPTD dari 35 UPTD Puskesmas, Jumlah UPTD Puskesmas yang memenuhi standar minimal bangunan berdasarkan permenkes 75 Tahun 2014 sebanyak 7 UPTD Puskesmas. Sementara itu capaian rasio puskesmas, poliklinik, dan pustu yang masih sebesar 0,085 per 1.000 penduduk (target 0,1 per 1.000 penduduk), rasio rumah sakit yang masih sebesar 0,003 per 1.000 penduduk (target 0,004 per 1.000 penduduk), dan frekuensi pemakaian tempat tidur rumah sakit yang cukup tinggi (BOR) dengan capaian 70,7 kali per tahun dengan jumlah tempat tidur saat ini sebanyak 509 tempat tidur.



3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan. Hal ini terlihat dari capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang hanya sebesar 68,87% pada tahun 2017.
- b. Masih rendahnya sistem drainase akibat saluran drainase tersumbat, dan belum semua ruas jalan memiliki saluran drainase/gorong-gorong. Hal ini terlihat dari panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) hanya sebesar 2,49%.
- c. Masih rendahnya persentase capaian rumah bersanitasi yang hanya sebesar 45%.
- d. Belum optimalnya rencana tata ruang dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.

4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Masih rendahnya kualitas perumahan. Hal ini terlihat dari rasio rumah layak huni yang baru sebesar 77,49%, rumah tangga pengguna air bersih yang baru mencapai 81,51%, dan rumah tangga pengguna listrik (rasio elektrifikasi) yang baru tercapai 82%.

5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- a. Masih rendahnya cakupan pelayanan (capaian 25%) dan tingkat waktu tanggap (capaian 38,09%) pada bencana kebakaran.
- b. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP, disebabkan keterbatasan jumlah personil, sarana prasarana dan anggaran untuk operasional patroli.
- c. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.

6) Sosial

- a. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), sementara cakupan penanganannya sangat terbatas. Hal ini terlihat dari persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar 75,64% dan Persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya 76,07%.
- b. Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan PMKS. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh capaian persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial yang baru sebesar 85%.



- c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS meliputi penanganan penyandang disabilitas, penanganan eks psikotik, penanganan korban tindak kekerasan serta penanganan korban bencana (penyediaan logistik dan psikososial).

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1) Tenaga kerja

- a. Masih adanya pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka 5,05%, tingkat partisipasi angkatan kerja 72,61%, dan persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 62,13%.
- b. Belum semua perusahaan menerapkan jaminan sosial dan kesejahteraan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS ketenagakerjaan 67,88%.

2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

- a. Belum melembaganya Pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Hal ini ditandai dengan persentase OPD yang melakukan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender baru 23,08% OPD.
- b. Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak, ditandai dengan masih rendahnya partisipasi perempuan di lembaga eksekutif (2,31%) dan legislatif (1,73%).
- c. Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, penelantaran, eksploitasi terhadap perempuan dan anak, namun belum disertai sistem perlindungan dan pelayanan terpadu yang memadai. Hal ini ditandai oleh rasio KDRT 0,0021% dan cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu yang baru sebesar 77%.
- d. Belum optimalnya pemenuhan hak anak pada 6 klaster layak anak. Hal ini ditandai oleh pencapaian Kabupaten Layak Anak yang baru pada peringkat pratama.
- e. Lemahnya sistem data informasi gender dan anak dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan gender. Hal ini nampak pada angka indeks pemberdayaan gender yang baru mencapai 65,72.

3) Pangan

- a. Adanya potensi kerawanan pangan di Banjarnegara yang dipengaruhi oleh produksi pangan yang rendah, kemiskinan, kurang lancarnya distribusi pangan, dan seringnya terjadi bencana alam. Tingkat kerawanan pangan yang ditangani baru mencapai 60%.



- b. Masih kurangnya cadangan pangan daerah, yang ditandai oleh capaian penguatan cadangan pangan yang baru mencapai 60%. Sesuai SPM, standar cadangan daerah seharusnya sebanyak 100 ton.
 - c. Stabilitas harga dan pasokan pangan belum optimal dimana capaian baru mencapai 90%.
 - d. Kualitas konsumsi pangan masih rendah, dengan tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras yang sangat tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang baru tercapai 90%.
 - e. Belum optimalnya kontrol terhadap pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya pada produk pangan segar dan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan. Hal ini disebabkan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baru mencapai 80%.
 - f. Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM pengelola pangan.
 - g. Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal.
- 4) **Pertanahan**
- Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan.
- 5) **Lingkungan hidup**
- a. Menurunnya kualitas air permukaan (air danau/waduk/embung) dan menurunnya potensi sumber daya air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat. Hal didukung oleh indeks kualitas air baru mencapai 52,86.
 - b. Belum optimalnya penanganan limbah sehingga dapat memberikan dampak pada penurunan kualitas air dan udara. Hal ini ditunjukkan oleh indikator tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai yang baru mencapai 26,81% dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/ kawasan/kota yang baru sebesar 5%.
 - c. Masih rendahnya penanganan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah persampahan. Hal ini ditunjukkan oleh persentase penanganan sampah yang baru mencapai 69,32%,tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan 30%, dan cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana sarana dan utilitas umum (PSU) yang baru mencapai 35,97%.
 - d. Semakin luasnya kerusakan lahan, khususnya di kawasan dataran tinggi Dieng dan terjadinya gerakan tanah yang berpotensi longsor. Hal ini ditandai oleh cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air yang sebesar 25%.
 - e. Belum optimalnya antisipasi dampak atas pembangunan infrastruktur terhadap lingkungan.



- 6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
 - a. Masih rendahnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh kepemilikan KTP 88,61%, kepemilikan akte kelahiran 87,47%, dan rasio bayi berakte kelahiran 70,75%.
 - b. Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan.
- 7) Pemberdayaan masyarakat desa
 - a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari tindak lanjut kegiatan pasca program pemberdayaan masyarakat dan swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang hanya sebesar 20%.
 - b. Belum optimalnya pengembangan kelompok usaha ekonomi produktif dan teknologi tepat guna bagi masyarakat desa/kelurahan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang hanya sebesar 68,3%.
 - c. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, profil, penataan batas dan tata ruang desa.
- 8) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan alat kontrasepsi Jangka Panjang pada ibu, dimana dapat bekerja lebih efektif dalam menekan angka kehamilan. Hal ini ditandai dengan presentase MKJP sebesar 26,6%.
 - b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmet need*) sebesar 7,46%.
 - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja, dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
 - d. Belum optimalnya peningkatan kualitas keluarga melalui kelompok kegiatan UPPKS dalam peningkatan pendapatan keluarga kecil bahagia dan sejahtera.
 - e. Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan berwawasan kependudukan dalam upaya mewujudkan pengendalian penduduk hal ini ditunjukkan dengan masih tingginya angka *Total Fertility Rate* sebesar 2,38.

9) Perhubungan

- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh jumlah terminal bus yang hanya berjumlah 6 unit.
- b. Belum semua daerah mempunyai jaringan trayek, dengan rasio izin trayek yang tersedia baru mencapai 0,000041%.
- c. Kurangnya kapasitas SDM dalam manajemen keselamatan lalu lintas dan belum tersusunnya perencanaan rekayasa lalu lintas.
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga fasilitas dan perlengkapan LLAJ.

10) Komunikasi dan informatika

Belum terintegrasinya jaringan dan aplikasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah

- a. Masih kurangnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif, dan masih rendahnya jumlah KSP/USP sehat. Koperasi aktif tercatat sebesar 33,004%.
- b. Daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah.
- c. Masih rendahnya sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya yang berbasis masyarakat.

12) Penanaman modal

Nilai persetujuan investasi dan nilai realisasi investasi belum optimal disebabkan oleh fasilitasi investasi yang belum optimal, sarana prasarana pendukung investasi yang belum memadai, dan belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi. Pada tahun 2018 nilai investasi sebesar Rp336.869.954.763,-.

13) Kepemudaan dan olahraga

- a. Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya prestasi olahraga, pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi dan sarana prasarana olahraga yang masih kurang.
- c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk berolahraga dan belum optimalnya pengembangan dan pembinaan olahraga rekreasi.

14) Statistik

Kurang optimalnya ketersediaan data guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.

15) Persandian

Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi dan telekomunikasi.

16) Kebudayaan

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian daerah karena pengaruh budaya luar.
- b. Belum optimalnya pelestarian adat dan tradisi masyarakat.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah.
- d. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang. Benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan hanya 2,44%.
- e. Belum optimalnya pengelolaan museum sebagai daya tarik wisata.

17) Perpustakaan

- a. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
- b. Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan lembaga lain.
- c. Belum ditemukannya naskah kuno dan etnis nusantara yang dibukukan.
- d. Belum adanya penguatan literasi.

18) Kearsipan

- a. Masih kurangnya kompetensi SDM pengelola kearsipan dalam melakukan pengelolaan dan pengaturan arsip/dokumen.
- b. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk melakukan pengelolaan arsip secara baik. Hal ini ditandai oleh pengelolaan arsip secara baku yang baru mencapai 17,86%.
- c. Masih rendahnya kesadaran perangkat daerah untuk menyerahkan arsip dinamis inaktif untuk dikelola oleh unit pengolah arsip daerah.
- d. Belum terbangunnya jaringan informasi kearsipan serta pengelolaan arsip berbasis IT.

3. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan perikanan

- a. Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2018 tercatat sebesar 29.750,63 ton.
- c. Adanya persaingan dalam pemanfaatan sumberdaya air untuk budidaya perikanan dengan sektor yang lain.
- d. Kurangnya kuantitas dan kompetensi petugas teknis perikanan. Cakupan bina kelompok pembudi daya ikan baru sebesar 19,03%.



- e. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya hayati perikanan dipengaruhi penurunan kualitas perairan umum dan perilaku masyarakat di sekitar DAS yang belum menaati kaidah penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

2) Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- c. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha dan jasa pariwisata.
- d. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran ekonomi kreatif.
- e. Rendahnya kontribusi PAD dari sektor pariwisata dengan rata-rata kontribusi hanya sebesar 2%.

3) Pertanian

- a. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di angka 102,93%.
- b. Produksi dan produktivitas pertanian serta populasi ternak cenderung menurun. Produktivitas pertanian secara umum mengalami penurunan, padi turun dari 59,79 kw/ha (2012) menjadi sebesar 52,42 kw/ha (2016), jagung turun dari 43,28 kw/ha (2012) menjadi sebesar 41,41 kw/ha (2016), dan durian turun dari 62,10 kg/pohon (2012) menjadi sebesar 60,17 kg/pohon (2016). Populasi ternak turun dari 37.977 ekor (2012) menjadi sebesar 31.394 ekor (2016), sapi perah turun dari 3.025 ekor (2012) menjadi sebesar 1.352 ekor (2016), dan domba turun dari 111.909 (2012) menjadi sebesar 65.909 ekor (2016).
- c. Berkurangnya tenaga kerja muda di sektor pertanian.

4) Perdagangan

- a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan, terlihat dari kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB hanya sebesar 14,96%.
- b. Cakupan fasilitasi pengembangan Usaha Dagang Kecil dan Menengah (UDKM) sangat rendah, terlihat dari persentase UDKM yang terfasilitasi kegiatan promosi/pameran.
- c. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum tertata. Hal ini terlihat dari cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal yang baru 14.025 kelompok.
- d. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.



- e. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.

5) Perindustrian

- a. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah disebabkan oleh keterampilan SDM, penggunaan teknologi, dan akses permodalan yang masih rendah. Jumlah industri kecil menengah yang tercatat sebesar 22.626 unit yang terdiri dari industri kecil sejumlah 22.583 IKM dan industri menengah sejumlah 35 IKM.
- b. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
- c. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha.
- d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk UKM / IKM.

4. Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Administrasi pemerintahan

- a. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru.
- b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP) serta melaksanakan pengukuran kualitas pelayanan publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala.
- c. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan Perangkat Daerah belum menggambarkan kinerja Perangkat Daerah, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.

2) Pengawasan

- a. Kurangnya cakupan pemeriksaan disebabkan oleh keterbatasan jumlah SDM pemeriksa.
- b. Masih kurangnya kompetensi SDM pemeriksa sesuai dengan tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah.
- c. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
- d. Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.

3) Perencanaan

- a. Kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan belum optimal.
- b. Adanya amanat pemerintah kepada daerah terkait dalam penyusunan dokumen perencanaan multi sektor perlu ditindaklanjuti.

- c. Belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.
- 4) Keuangan
 - a. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh rendahnya rasio PAD terhadap pendapatan daerah yang hanya sebesar 10,30%.
 - b. Belum optimalnya penyusunan laporan keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual.
 - c. Belum optimalnya penyerapan anggaran belanja setiap tahunnya.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama aset tanah yang belum bersertifikat.
- 5) Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
 - a. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih kurang.
 - b. Penempatan PNS yang kurang proporsional sesuai kebutuhan.
 - c. Masih banyaknya kasus indisipliner pegawai.

2. ISU STRATEGIS

Rumusan isu strategis yang diangkat dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan pendapatan masyarakat yang kurang merata

Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin pada tahun 2018 sebesar 15,46% dan indeks gini sebesar 0,34 (kategori sedang) pada tahun 2015.

2. Perkembangan sektor perekonomian utama relatif lambat

Nilai investasi pada tahun 2018 sebesar Rp336.869.954.763,-, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB 14,38%, kontribusi pertanian 31,54%, produksi dan produktivitas pertanian dan populasi ternak cenderung menurun, jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 22.367 unit.

3. Kualitas pendidikan dan derajat kesehatan belum optimal

Kondisi kualitas pendidikan dapat dilihat dari angka rata-rata UN SD/MI sebesar 7,76, angka rata-rata UN SMP/MTs sebesar 5,44, SD/MI kondisi bangunan baik 94,50%, dan SMP/MTs kondisi bangunan baik 95,90%, guru SD memenuhi kualifikasi S1/D-IV 86,04%, guru SMP memenuhi kualifikasi S1/D-IV 90,11%, belum semua sekolah terakreditasi A, terlihat dari jumlah SD terakreditasi A, jumlah SMP terakreditasi A, dan lembaga pendidikan non formal terakreditasi A. Derajat kesehatan dapat dilihat dari indikator jumlah kasus AKI sebesar 120,30 per

100.000 KH, AKB sebesar 13,17 per 1000 KH, persentase balita gizi buruk (BB/TB) sebesar 0,05%, akreditasi Rumah Sakit versi KARS yaitu Akreditasi Paripurna RSU Hj. Anna Lasmanah Kolopaking dan RS Emanuel sedangkan RS Islam Akreditasi Utama, jamban sehat 48,86%, dan persentase puskesmas terakreditasi sebanyak 12 Puskesmas dari 35 puskesmas (34,2%).

4. Kuantitas dan kualitas infrastruktur yang belum memadai

Hal ini ditandai dengan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 68,87%, persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) hanya sebesar 2,49%, persentase rumah tangga pengguna air bersih 81,51%, persentase penanganan sampah 69,32%, tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai sebesar 26,81%, Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan, kurangnya sarana dan prasarana perhubungan, seperti area parkir, terminal tipe c, halte, belum semua daerah mempunyai jaringan trayek, dan belum semua jaringan jalan dan daerah rawan kecelakaan memiliki fasilitas keselamatan jalan.

5. Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan

Penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan terutama ditandai oleh terjadinya banjir dan gerakan tanah yang berpotensi longsor, meluasnya jumlah lahan kritis, degradasi tingkat kesuburan tanah dan kerusakan lahan akibat cara budidaya yang salah. Bertambahnya jumlah industri yang menghasilkan limbah, menurunnya potensi sumberdaya air bersih, menurunnya keanekaragaman hayati akibat alih fungsi lahan, menurunnya kualitas air, meningkatnya jumlah timbunan sampah akibat pertumbuhan penduduk, rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah serta masih rendahnya budaya dan kepedulian terhadap lingkungan juga berkontribusi cukup signifikan terhadap penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan.

6. Belum optimalnya pemberdayaan gender

Hal ini ditandai dengan capaian IDG sebesar 67,78.

7. Kapasitas fiskal daerah yang masih rendah dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal

Tingkat kapabilitas APIP masih berada pada level 2, dan tingkat maturitas SPIP pada level 3, dan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah baru sebesar 11,37% (APBD TA 2018), persentase Aset tanah Pemda yang bersertifikat 35,37%, penyerapan APBD masih rendah sebesar 82,26%, dan persentase perangkat daerah yang melakukan pengelolaan arsip secara baku sebesar 36,59%.



8. Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal daerah

Hal ini ditandai oleh mulai bergesernya nilai-nilai yang hidup di masyarakat, seperti mulai lunturnya budaya gotong royong, sopan santun, konsumsi minuman keras, dan sebagainya.

9. Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana

Hal ini ditandai oleh banyaknya jenis bencana alam yang rawan terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Sedangkan berdasarkan wilayah administratif, sebanyak 85% wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Daerah Tahun 2017-2022 Kabupaten Banjarnegara merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang ditentukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Banjarnegara memuat arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara yang secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. VISI & MISI

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dalam mewujudkan tujuan daerah. Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menetapkan visi :

“BANJARNEGARA BERMARTABAT DAN SEJAHTERA”

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, ditetapkan misi sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
- 2) Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola pemerintahan yang baik;
- 3) Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada ekonomi kerakyatan;
- 4) Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
- 5) Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

2. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**MISI1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan kondusivitas wilayah	1 Meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	1 Pemantapan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	1 Meningkatkan Koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban,dan keamanan masyarakat
			2 Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama
Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	1 Meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dan ketanggap daruratan bencana	1. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana	
		2. Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel	
Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	1 Meningkatkan penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	1 Penguatan karakter yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	
	2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	1 Penguatan pendidikan politik masyarakat	
	3 Meningkatkan peran serta perempuan dalam pembangunan	1 Percepatan pengarusutamaan gender	



MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan kualitas layanan publik	1 Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	1 Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau	1 Menyederhanakan prosedur layanan publik
			2 Meningkatkan cakupan pelayanan hak-hak kependudukan
		2 Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan	2 Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	1 Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan	1 Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan seluruh aspek dan terintegrasi dengan berbasis data
			2 Meningkatkan kualitas perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
	2 Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	2 Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur	1 Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur
		1 Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa	

**MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur	1 Meningkatkan sarana infrastruktur jalan dan jembatan	1 Peningkatan kualitas manajemen infrastruktur jalan dan jembatan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	1 Membentuk Unit Reaksi Cepat Penanganan Jalan 2 Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan pendukung perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan
	2 Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	1 Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi	
Meningkatkan kinerja perekonomian daerah	1 Meningkatkan kinerja sektor pertanian dan perikanan	1 Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan	1 Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian
		2 Peningkatan sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan	
		3 Peningkatan penanganan pasca panen	
	2 Meningkatkan kinerja sektor pariwisata	1 Peningkatan daya saing destinasi pariwisata	
		2 Pengembangan pemasaran dan kerjasama pariwisata	
	3 Meningkatkan kinerja UKM dan koperasi	1 Peningkatan pendampingan dan pembinaan UKM	1 Memperkuat kemampuan kewirausahaan
		2 Peningkatan manajemen koperasi	
	4 Meningkatkan jumlah investasi	1 Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif	1 Menyediakan regulasi dan prosedur perizinan yang pro investasi



Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
	5 Meningkatkan kesempatan kerja	1 Peningkatan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	1 Fasilitasi informasi lapangan kerja
		2 Penciptaan lapangan kerja	
		3 Peningkatan kesejahteraan pekerja	
	6 Meningkatkan kinerja sektor industri	1 Pengembangan agroindustry	
		2 Peningkatan daya saing industri kreatif	
	7 Meningkatkan kinerja sektor perdagangan	1 Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan	1 Meningkatkan pengelolaan dan pembinaan pedagang kaki lima
	8 Meningkatkan stabilitas harga	1 Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu inflasi dan tarikan permintaan	1 Meningkatkan pengawasan harga komoditas
Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah	1 Meningkatkan pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	1 Peningkatan infrastruktur perhubungan antar kecamatan	1 Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan untuk pertumbuhan ekonomi
		2 Pengembangan pusat-pusat kegiatan local	
Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan	1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	1 Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	
		2 Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan	
		3 Perlindungan sumber-sumber air dan mata air, khususnya di daerah hulu dan areal hutan rakyat	



MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan	1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Penerapan sistem pengelolaan keuangan terpadu	1 Optimalisasi pengelolaan keuangan melalui integrasi <i>e- planning</i> dan <i>e-budgeting</i>
			2 Penyederhanaan prosedur pengelolaan Keuangan dan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal
		2 Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah	1 Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia pengelola keuangan dan aset daerah
	2 Meningkatnya kemandirian daerah	1 Peningkatan rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	1 Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah melalui perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah
			Ektensifikasi pendapatan asli daerah melalui pemberdayaan aset daerah



MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	1 Meningkatkan ketahanan pangan	1 Penguatan 3 pilar ketahanan pangan (ketersediaan, distribusi dan konsumsi)	
	2 Meningkatkan cakupan rumah layak huni	1 Fasilitasi perumahan swadaya bagi MBR yang memiliki tanah	1 Memperkuat identifikasi target sasaran bantuan RTLH
		2 Penyediaan perumahan layak huni bagi MBR yang belum memiliki tanah	
		3 Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum	
	3 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1 Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang tinggal di wilayah perdesaan
		2 Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan	
		3 Peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu	
	4 Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan	1 Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas	1 Meningkatkan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat
		2 Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	
		3 Peningkatan Upaya Promosi dan pemberdayaan kesehatan	



Tujuan	Sasaran	Strategi	Prioritas Kebijakan
		4 Peningkatan sarana prasarana kesehatan dalam rangka perluasan cakupan pelayanan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan	
Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	1 Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	1 Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan	1 Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka Pelaksanaan strategi Penanggulangan kemiskinan
	2 Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	1 Peningkatan Keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	

B. INSTRUMEN PENDUKUNG PENGELOLAAN DATA KINERJA

1. Simrenbangda (Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah)

Merupakan Sistem Informasi yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk mendukung pelaksanaan proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, Hasil Reses DPRD dan Evaluasi RKPD. Rencana Program dan Kegiatan yang telah diinput didalam aplikasi SIMRENBANGDA akan secara otomatis tersimpan dan terekam serta dapat dibuka oleh admin Bappeda dan SKPD sesuai dengan *username* dan *password* yang diberikan kepada masing-masing SKPD. SIMRENBANGDA dapat diakses melalui alamat website : www.simrenbangda.banjarnegarakab.go.id. Program dan kegiatan yang tertuang didalam SIMRENBANGDA akan digunakan sebagai dasar penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun berikutnya (n+1) dan KUA PPAS tahun berikutnya.

Gambar 2.1.

Aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SIMRENBANGDA)



2. Simda Keuangan

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi pencatatan dan penyajian data transaksi keuangan yang meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporan yang disusun secara terintegrasi dan dilaksanakan oleh semua SKPD. Aplikasi ini mulai diimplementasikan pada Tahun 2008, seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pada Tahun 2012 simda keuangan dikembangkan dengan berbasis *online* sehingga dapat mempermudah setiap transaksi keuangan yang dilakukan oleh SKPD dan pihak terkait.

Gambar 2.2.
Aplikasi SIMDA Keuangan



3. Simda BMD (Barang Milik Daerah)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi pencatatan dan penyajian data terhadap beberapa tahapan dalam pengelolaan barang milik daerah, meliputi perencanaan kebutuhan aset, pengadaan aset, penggunaan aset, penatausahaan aset, pemanfaatan aset, pemeliharaan dan pengapusan aset. Melalui aplikasi ini inventarisasi terhadap barang milik daerah akan terhimpun dalam sebuah *data base* yang memudahkan untuk dapat diakses setiap saat.

Gambar 2.3.
Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD)



4. SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan)

Merupakan aplikasi yang memfasilitasi penyajian data Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa pada semua SKPD. Tujuan adanya SIRUP adalah dalam rangka keterbukaan informasi publik sehingga setiap pihak yang berkepentingan dapat mengaksesnya dengan mudah.

Gambar 2.4.
Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)



5. TNDE (Tata Naskah Dinas Elektronik)

Merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam bidang tata naskah dinas. Melalui aplikasi ini pengelolaan tata naskah dinas menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam Tata Naskah Dinas Elektronik pengelolaan surat menyurat tidak lagi melalui tatap muka secara langsung baik dari konseptor ke penandatangan maupun dari pengirim ke penerima surat, karena begitu konsep surat disetujui oleh penandatangan, maka pada saat itu juga surat tersebut terkirim dan dapat dibaca oleh penerima surat. Aplikasi ini berbasis internet, dengan adanya aplikasi ini terdapat efisiensi waktu dalam pengelolaan dan pengiriman surat.

Gambar 2.5.
Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)



6. SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)

Merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka penyediaan data pilah gender daerah. Aplikasi ini mempermudah SKPD dalam melaporkan data pilah gender sehingga bisa digunakan secara *online*. Aplikasi ini juga digunakan sebagai dasar penyusunan data pilah gender daerah.

Gambar 2.6.
Aplikasi Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)



7. SIG (Sistem Informasi Geografis) Kemiskinan

Merupakan Sistem Informasi berbasis peta geogafis yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkepentingan untuk melakukan perencanaan Program /Kegiatan terkait dengan penanganan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara. Manfaat adanya SIG Kemiskinan adalah tersedianya data representasi grafis wilayah yang perlu mendapat prioritas penanggulangan kemiskinan, memberikan kemudahan dalam penentuan daerah yang perlu diprioritaskan sehingga kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat tepat sasaran dan tepat program.

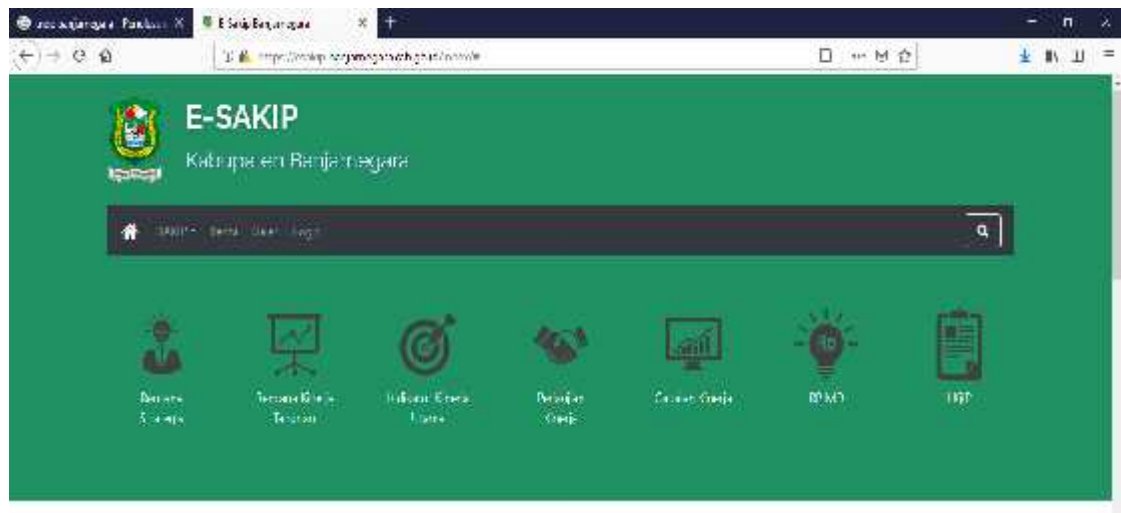
Gambar 2.7.
Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) Kemiskinan



8. ESAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

E-Sakip adalah aplikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja SKPD pada khususnya dan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya.

Gambar 2.8
Aplikasi E-Sakip Kabupaten Banjarnegara



9. SIMPETIN (Sitem Peta Investasi)

SIMPETIN adalah sistem yang digunakan untuk membantu dalam mengelola informasi mengenai sektor-sektor yang berpotensi dalam investasi. Sistem ini menampilkan peta dalam format yang menarik dilengkapi dengan peta pendukung untuk membantu investor dalam menilai dan memilih sektor potensi investasi di Kabupaten Banjarnegara.

Gambar 2.9
Aplikasi Simpetin Kabupaten Banjarnegara



C. PERJANJIAN KINERJA

Untuk mewujudkan visi Kabupaten Banjarnegara ditetapkan 5 (lima) misi, 12 (dua belas) tujuan, 28 (dupuluh delapan) sasaran, 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara.

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2017 bila diuraikan adalah sebagai berikut:



Perjanjian Kinerja Bupati Banjarnegara Tahun 2018 terdiri dari 5 misi dimana misi 1 berisi 5 (lima) sasaran dengan 5 (lima) indikator, pada misi 2 terdiri dari 3 (tiga) sasaran dan 3 (tiga) indikator, pada misi ke-3 terdiri dari 12 (dua belas) sasaran dengan 14 (empat belas) indikator, pada misi ke-4 terdiri dari 2 (dua) sasaran dan 2 (dua) indikator, sedangkan pada misi ke-5 terdiri dari 6 (enam) sasaran dan 7 (tujuh) indikator. Dan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran I.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasinya. Kerangka pengukuran di Kabupaten Banjarnegara mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003. Adapun rumus pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendahnya realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100 \%$

Atau

Capaian Indikator Kinerja = $\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$

Penilaian Capaian Kinerja menggunakan interpretasi pengukuran dengan Skala Ordinal, yaitu :

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91% 100%	Sangat Tinggi	●
76% 90%	Tinggi	■
66% 75%	Sedang	▶
51% 65%	Rendah	◀
50%	Sangat rendah	▼



Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai rata-rata setiap kelompok sasaran dibagi jumlah indikator yang ada di kelompok sasaran tersebut.

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\text{Jumlah Indikator} \times \text{Rata-rata Capaian Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100 \%$$

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pada Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara telah menetapkan 12 (dua belas) tujuan, 28 (dua puluh delapan) sasaran yang akan dicapai, sesuai indikator pada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Dua belas tujuan tersebut adalah :

1. Meningkatkan kondusivitas wilayah, dengan indikator tujuan: Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana, dengan indikator tujuan: Persentase desa tangguh bencana.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi, dengan indikator tujuan: Indeks Kebudayaan.
4. Meningkatkan kualitas layanan publik, dengan indikator tujuan: Survey Kepuasan Masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan indikator tujuan: Indeks Reformasi Birokrasi.
6. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur, dengan indikator tujuan: Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik.
7. Meningkatkan kinerja perekonomian daerah, dengan indikator tujuan: Laju Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita.
8. Meningkatkan pemerataan pembangunan wilayah, dengan indikator tujuan: Indeks Williamson.
9. Meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
10. Mewujudkan reformasi tata kelola keuangan, dengan indikator tujuan: Rasio kemandirian keuangan daerah;



- 11. Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas, dengan indikator tujuan: Indeks Pembangunan Manusia.
- 12. Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial, dengan indikator tujuan: Presentase Penduduk Miskin.

Ke- 12 (dua belas) tujuan tersebut selanjutnya diukur dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja dan 28 (dua puluh delapan) sasaran tersebut diukur dengan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja. Realisasi sampai akhir Tahun 2018 tercapai dengan kriteria tinggi dan 2 (dua) indikator tercapai dengan kriteria sedang.

Rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 sebesar 114,63% dengan kategori sangat tinggi, dengan rincian sebagai berikut:

NO	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian	Ket	
MISI : I								
T1. S1.	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	58,5	67,75	78,75	116,24	<div></div>	78,75
T2. S2.	Persentase desa tangguh bencana	%	10,25	18,95	20	105,54	<div></div>	52,63
T3. S3.	Indeks Kebudayaan	Angka	69,48	63,36	55,34	87,34	<div></div>	77,71
S4.	Presentase pemilih dalam pemilu	%	70	PilGub 55	66,31	120,56	<div></div>	PilGub 55-60%; PilLeg 70-75%; PilPres 70-75%; PilBup 70-75%
S5.	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	65,72*	67,25	66,44	98,80	<div></div>	69,25
MISI : II								
T1. S1.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	78,98	78,5	79,19	100,88	<div></div>	80
T2	Indeks Reformasi Birokrasi (<i>Indikator Tujuan</i>)	Angka	67,91	69,95	71,39	102,06	<div></div>	78,73
S2.	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Angka	B	B	B	100	<div></div>	B
S3.	Persentase Peningkatan Desa berkembang	%	3	3	9,32	310	<div></div>	3
MISI : III								
T1.S1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	68,87	63	70,104	111,27	<div></div>	73 s.d. 75
S2	Luas sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.339	15.524	15.832	101,98	<div></div>	17.496
S3	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,80	2,5	3,19	127,6	<div></div>	3 s.d. 4
S4	Nilai Tukar Petani (umum)	%	107,463	102	106,48	104,39	<div></div>	103 s.d. 105
S5	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	6,04	3	5,32	177,33	<div></div>	3



NO	Indikator Kinerja	SATUAN	Capaian 2017	Tahun 2018				Target akhir RPJMD Tahun 2022
				Target	Realisasi	Capaian	Ket	
S6	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	8	10	10,6	106	●	14 s.d. 15
S7	Persentase koperasi sehat	%	34,79	34	34,60	101,76	●	38 s.d. 39
S8	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	12	10	14,62	146,2	●	17,5 s.d. 20
S9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,72	< 4,9	4	118,37	●	< 4,5
S10	Pertumbuhan sektor industri	%	7,55	6,1	7,31	119,84	●	7,1 s.d. 8
S11	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	5,54	8	6,04	75,5	▶	8,4 s.d. 9
S12	Laju inflasi	%	3,67	3 ± 1	3,04	100	●	3 ± 1
T2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (<i>Indikator Tujuan</i>)	%	5,42	5,4 s.d 5,75	5,55 *)	100	●	5,4 s.d 5,75
T3.	PDRB Per Kapita (<i>Indikator Tujuan</i>)	Rp.	18,9 Juta	> 19,5 Juta	20,8 Juta *)	100	●	> 21,5 Juta
T4.S13	Indeks Williamson	Angka	0,55	0,47	0,46	102,13	●	0,43
T5.S14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,92	67,5	70,07	103,8	●	69,25
MISI : IV								
S1	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP*	WTP	100	100	●	WTP
T1.S2	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	15,90	9,02	11,37	126,05	●	9,48
MISI : V								
T1.	Indeks Pembangunan Manusia	Tahun	65,52 (2016)	67,12	65,86 (2017)	98,12	●	70,32
S1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	85,7	> 90	85,9	95,44	●	> 95
S2	Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni	%	56,02	83 ± 1	61,46	74,05	▶	90 ± 1
S3	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,26*	6,35	6,27*	98,74	●	6,65 s.d. 6,72
S4	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,40*	11,5 ± 0,2	11,41 *	100	●	11,9 ± 0,2
S5	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,69*	73,80	73,79*	99,9	●	74,08
T2.S6	Persentase penduduk miskin	%	17,21	17	15,46	109,06	●	14,6 s.d. 14
S7	Persentase Penurunan PMKS	%	3	-0,2	-0,28	140	●	0,20
Rata – rata Capaian								
Tujuan		13				112,50	●	
Sasaran		31				112,22	●	

Keterangan : T = Tujuan dan S = Sasaran



Dilihat dari pengukuran kinerja diatas secara umum menunjukkan hasil yang relatif telah mencapai keberhasilan sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2018. Adapun rata-rata capaian per misi adalah sebagai berikut :

No	Misi	Jumlah Indikator		Rata-Rata Capaian		Ket
		Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran	
1.						
1.	Mewujudkan Tata Kehidupan Masyarakat Yang Tertib, Aman, Damai Dan Demokratis	3	5	103,04	105,70	●
2.	Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Konsep Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	2	3	101,47	170,29	●
3.	Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkesinambungan Dan Berbasis Pada Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	5	14	103,44	114,01	●
4.	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah Yang Efektif, Efisien, Transparan Dan Akuntabel Dengan Tenaga Profesional	1	2	113,03	126,05	●
5.	Mewujudkan Kemartabatan Dan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Cakupan Pemenuhan Hak Dasar	2	7	103,59	102,46	●

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Adapun analisis dari capaian kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara yang dijabarkan dalam 5 (lima) misi, 28 (dua puluh delapan) sasaran strategis dan 31 (tiga puluh satu) indikator kinerja adalah sebagai berikut :

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN DEMOKRATIS

Sasaran 1 :	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan Lingkungan
-------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:



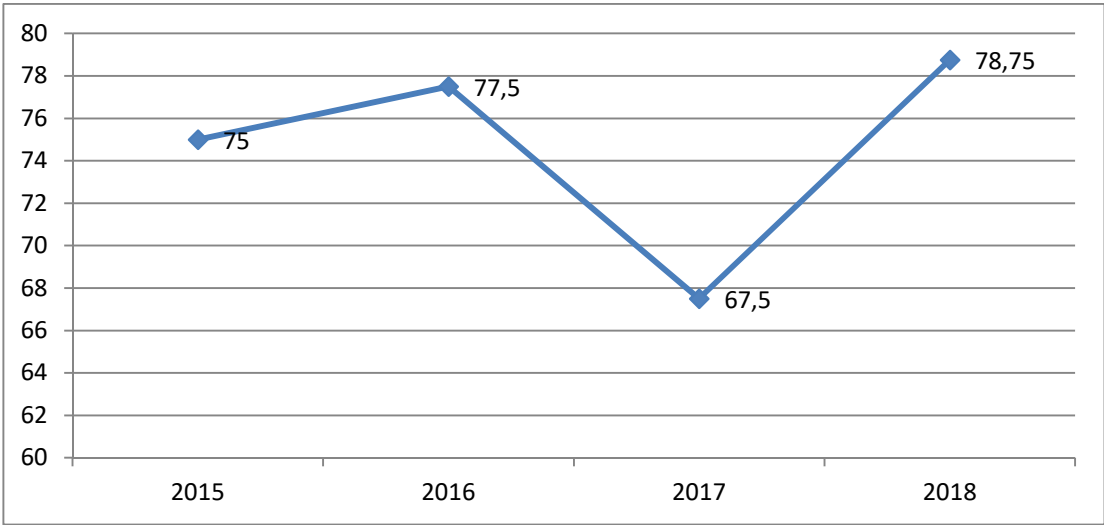
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Angka	67,75	78,75	116,24	78,75	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				116,24		100	

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan dalam Tahun 2018 telah tercapai dengan rata-rata capaian 116,24%.

Indeks ketenteraman dan ketertiban masyarakat diukur dengan beberapa komponen yaitu Rasio anggota linmas per Rumah Tangga, Penegakan Perda, Persentase penurunan konflik masyarakat, Persentase penurunan konflik agama dan Persentase penurunan angka kriminalitas. Dari lima komponen tersebut semua berkontribusi positif terhadap pencapaian indeks ketenteraman dan ketertiban, dimana untuk penegakan perda turun sebesar 10%, konflik agama mengalami penurunan 100% dimana pada Tahun 2017 terdapat 1 kasus dan pada Tahun 2018 tidak ada konflik agama. sedangkan pada angka kriminalitas yang terdiri dari 3 komponen yaitu angka kriminalitas itu sendiri, tipiring dan gangguan trantibum pada Tahun 2017 terdapat 78 kriminalitas, tipiring 0 dan gangguan trantibum sebanyak 719 kejadian, pada Tahun 2018 pada gangguan trantibum mengalami penurunan yang signifikan yaitu 55,77% atau menjadi 318 kejadian walaupun pada angka kriminalitas dan tipiring mengalami kenaikan yaitu tipiring menjadi 4 kejadian dan angka kriminalitas menjadi 92 kejadian.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Indeks Ketentraman dan Ketertiban



Sumber : Satpol PP dan Kankesbangpolinmas



Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) fluktuatif.

Hal ini menggambarkan Kabupaten Banjarnegara dari tahun ke tahun terjadi peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk mewujudkan ketentraman dan ketrtiban masyarakat di Kabupaten Banjarnegara, kebijakan yang dilakukan adalah dengan menggiatkan siskamling, meningkatkan pembinaan dan peran fungsi linmas di setiap kecamatan dan desa, secara intensif melaksanakan penegakan perda baik dalam bentuk pembinaan maupun penegakan dengan memberikan sanksi ringan maupun berat.



Dalam rangka menurunkan angka konflik dan angka kriminalitas dilaksanakan sosialisasi/pembinaan kepada Toga, Tomas, Tokoh pemuda dan pelajar serta tokoh elemen lainnya serta memberdayaka Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) dan Forum Kewaspadaan Dini Maasyarakat (FKDM) serta Kominda.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 7 (tujuh) program, yaitu Program Pengembangan wawasan kebangsaan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, Program Kemitraan Wawasan Kebangsaan, Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dan program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat).

Sasaran 2 :	Meningkatnya Kualitas Kesiapsiagaan Dalam Ketanggapdaruratan Bencana
-------------	--

Dalam rangka meningkatkan kualitas kesiapsiagaan dalam ketanggap daruratan bencana ditetapkan inidator Persentase desa tangguh bencana sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Desa Tangguh Bencana.



Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase desa tangguh bencana	%	18,95	20	105,54	52,63	38,00	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				105,54		38,00	

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan dalam Tahun 2018 telah tercapai dengan capaian 105,54%. Dari 195 desa rawan bencana sudah terbentuk 39 desa tangguh bencana (Destana) atau 20%.

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Vulkanologi Metereologi dan Bencana Geologi kondisi geografis di Kabupaten Banjarnegara 70 (tujuh puluh) %. merupakan daerah rawan bencana pergerakan tanah, adapun jenis bencana yang sering terjadi adalah tanah longsor, gas beracun, banjir, kebakaran, kekeringan dan angin kencang. Dari 266 desa yang tersebar diseluruh kecamatan ada

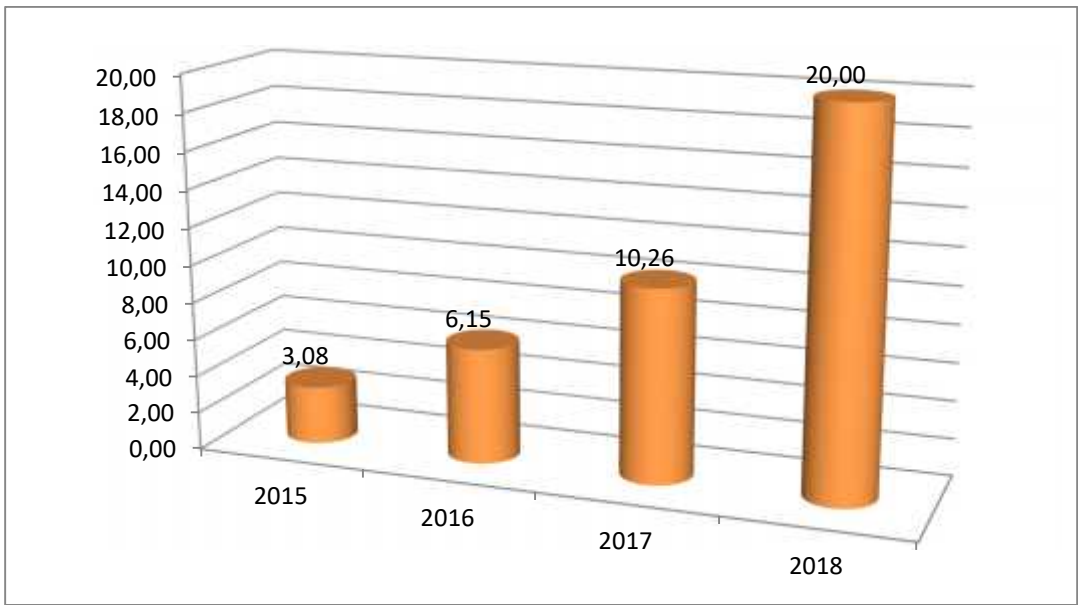


sejumlah 195 desa yang dinyatakan sebagai desa rawan bencana. Dalam rangka kesiapsiagaan bencana Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menargetkan untuk meningkatkan pembentukan desa tangguh bencana dengan target di akhir RPJMD pada Tahun 2022 terbentuk 52,63% atau sejumlah 103 desa tangguh bencana.

Pembentukan desa tangguh bencana dari tahun sebelumnya maka dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Persentase Desa Tangguh Bencana
di Kabupaten Banjarnegara



Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat.

Capaian yang meningkat didukung oleh beberapa hal tersebut :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat di daerah rawan bencana dengan ikut berpartisipasi aktif dalam pengurangan resiko bencana;
2. Dibangunnya jejaring kerjasama dan pendekatan antar pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha untuk lebih peduli pada upaya pengurangan resiko bencana;
3. Sudah adanya peta desa rawan bencana sehingga memudahkan dalam pemantauan;

Untuk lebih mengoptimalkan pembentukan desa tangguh bencana maka dilaksanakan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan/sosialisasi kepada masyarakat sebagai pencegahan dini agar masyarakat memahami ancaman bencana yang ada di daerahnya;
2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi penanganan rawan bencana;

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 3 (tiga) program yaitu Program Kesiapsiagaan, Program Mitigasi Bencana, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana.



Sasaran 3 :

Meningkatnya Penghargaan Masyarakat Terhadap Nilai Nilai Kebudayaan dan Kearifan Lokal

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing subindikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

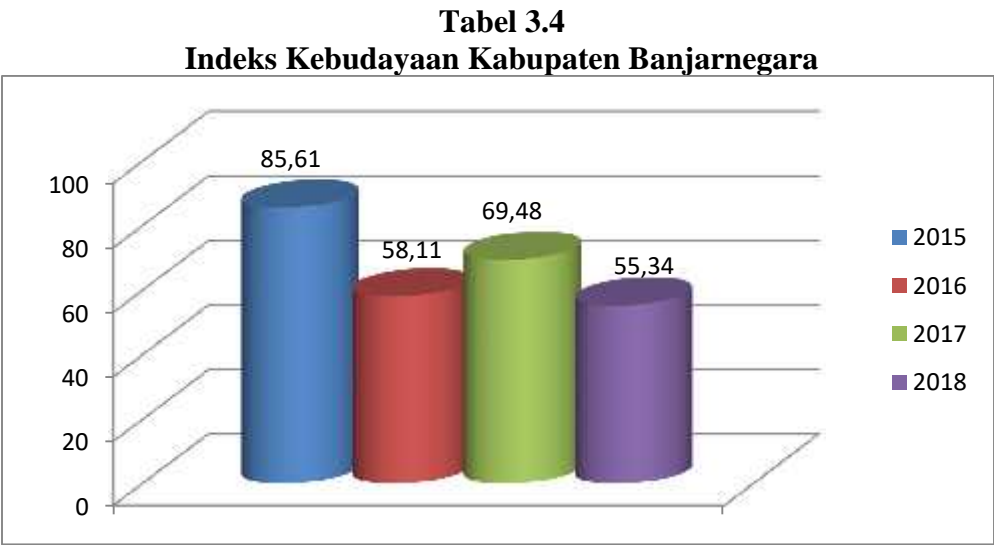
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Kebudayaan	Angka	63,36	55,34	87,34	77,71	71,21	Tinggi
Rata-rata Capaian				87,34		71,21	

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan dalam Tahun 2018 telah tercapai dengan rata-rata capaian 87,34%.

Indeks kebudayaan diukur dengan menggunakan 4 parameter yaitu Peningkatan event kesenian atau budaya, Persentase cagar budaya yang terpelihara, Persentase gedung kesenian yang aktif, Nilai peningkatan jumlah riset unggulan daerah, inovasi yang terjaring.

Yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pencapaian Tahun 2018 adalah pada Peningkatan event kesenian atau budaya dan Persentase gedung kesenian yang aktif.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:



Sumber Data :Disparbud, Baperlitbang, Dinsos, Dispermades Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) yang fluktuatif.



Hal yang menyebabkan trend indeks kebudayaan fluktuatif adalah sebagai berikut:

- 1. Cagar budaya yang terpelihara sejumlah 37 dari 73 buah.
- 2. Keberadaan gedung budaya dimaksimalkan pemanfaatannya dengan menyelenggarakan berbagai even budaya, terutama untuk meningkatkan daya tarik wisata di Banjarnegara.
- 3. Penyelenggaraan even budaya yang terus dikembangkan dalam rangka menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 4 (empat) program, yaitu Program pemasaran dan pengembangan pariwisata, program pengelolaan keragaman budaya, program pengembangan nilai budaya, program pengelolaan kekayaan budaya.

Sasaran 4 :

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Kehidupan Berdemokrasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

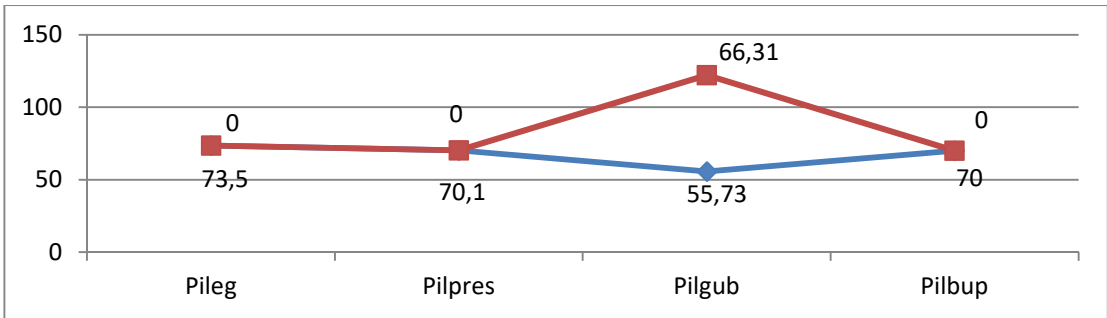
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase Pemilih Dalam Pemilu	%	PilGub 55	66,31	120,56	70 sd 75	94,73	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				120,56		94,73	

Indikator persentase pemilih dalam pemilu meliputi pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pemilihan gubernur dan pemilihan bupati. Pada Tahun 2018 dilaksanakan pemilihan gubernur dengan partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 66,31%. Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 Prosentase Pemilih dalam Pemilu sudah tercapai sesuai dengan yang ditergetkan. Jumlah pemilih yang terdaftar sejumlah 770.732 orang, adapun partisipasi pemilih sejumlah 511.096 orang.

Data terakhir menunjukkan capaian di masing –masing pemilihan dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:



Tabel 3.5
Persentase Pemilih Dalam Pemilu



Sumber Data : Kankesbangpolinmas kabupaten Banjarnegara

Apabila dibandingkan dengan pemilihan gubernur sebelumnya maka terdapat peningkatan sebesar 10,58%. Adapun faktor yang mendukung peningkatan partisipasi pemilih antara lain :

1. Adanya pendidikan politik dan demokrasi dengan sasaran kepada pemilih pemula dan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPU, Panwas dan Kankesbangpolinmas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu;
2. Koordinasi yang baik antar lembaga pelaksana pemilu;
3. Pelaksanaan Pemilu ditetapkan sebagai hari libur nasional sehingga memberi kesempatan kepada pemilih

Sasaran ini dicapai dengan melaksanakan 2 (dua) program, yaitu Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Sasaran 5 :	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan
-------------	--

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,25	66,44*	98,80	69,25	95,94	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				98,80		95,94	

*Data Capaian Tahun 2017

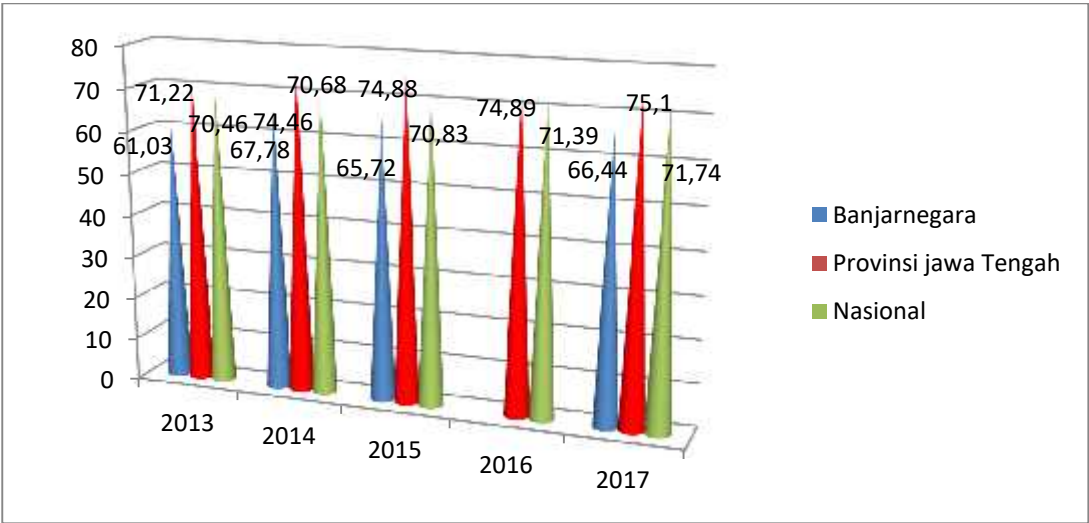
Sumber Data : BPS dan Kementerian PPPA



IDG menggambarkan besarnya peranan gender dalam bidang politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan. Bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional maka IDG Kabupaten Banjarnegara masih di bawah IDG provinsi Jawa Tengah yaitu 75,10 dan nasional sebesar 71,74.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.6
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber Data :BPS dan Kementerian PPPA

Saat ini, upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong kesetaraan gender di berbagai bidang kehidupan telah mulai tampak hasilnya. Secara kuantitas, telah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis yang memungkinkan perempuan untuk berperan sebagai pengambil keputusan, namun dari aspek kualitas masih terdapat banyak hal yang perlu ditingkatkan terkait dengan kompetensi yang dimiliki. Untuk mengkaji lebih jauh peranan perempuan dalam pengambilan keputusan, peran dalam politik dan ekonomi, maka dapat digunakan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG diukur berdasarkan tiga komponen yang ada, yaitu:

1. Keterwakilan perempuan dalam parlemen

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 245 diamanatkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen sebesar 30% dari jumlah keseluruhan anggota. Pada proses pendaftaran calon legislative perempuan sudah memenuhi kuota 30%.

Namun pada kenyataannya kepercayaan masyarakat untuk memilih calon legislatif perempuan masih rendah terbukti jumlah perempuan dalam parlemen di Kabupaten Banjarnegara baru 17,78% atau sejumlah 9 orang dari total anggota parlemen sejumlah 45 orang.

2. Perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi dan teknis.

Jumlah pekerja perempuan di Kabupaten Banjarnegara sejumlah 45,81%. Namun demikian perempuan yang bekerja belum mewakili perempuan sebagai tenaga



profesional, manajer, administrasi dan teknis, hal ini disebabkan kebanyakan perempuan yang bekerja masih di sektor buruh. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka ada peningkatan sebesar 1,93% dari 43,88%.

3. Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga

Sumbangan pendapatan perempuan dalam pemenuhan ekonomi keluarga di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sebesar 28,78% atau meningkat sebesar 0,01% dari Tahun 2016 yaitu 28,77%. Kendali ekonomi keluarga masih dipegang oleh pria. Pria memang bertanggungjawab dengan roda perekonomian keluarga, sehingga peranan perempuan dalam mencari nafkah atau membantu perekonomian keluarga agak terabaikan, meskipun tidak dipungkiri perempuan ada yang bekerja dengan penghasilan melebihi kaum pria.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai pembangunan yang dilakukan melalui strategi :
 - a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun daerah;
 - b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; dan
 - c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.
2. Meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), yang dilakukan melalui strategi :



- a. Peningkatan pemahaman penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha tentang tindak kekerasan terhadap perempuan serta nilai-nilai sosial dan budaya yang melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan;
 - b. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum terkait kekerasan terhadap perempuan; serta
 - c. Peningkatan efektivitas pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulihan dan reintegrasi sosial.
3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Pengarusutamaan gender dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Strategi untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan antara lain untuk :
- a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari perspektif gender;
 - b. Pelaksanaan *reviu* dan harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan agar berspektif gender;
 - c. Peningkatan kapasitas SDM untuk dapat memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam menerapkan PUG;
 - d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dunia usaha dalam penerapan PUG;
 - e. Penguatan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;
 - f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah;
 - g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG.

Sasaran tersebut dicapai dengan melaksanakan program sebagai berikut :

1. Program Penguatan kelembagaan, Pengarusutamaan gender dan anak
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan perempuan
3. Program Keserasian kebijakanpeningkatan kualitas anak dan perempuan.

MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran 1 :	Meningkatnya Efektivitas Dan Transparansi Layanan Publik
--------------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indek Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	78,5	79,19	100,88	80	98,99	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100,88		98,99	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 Indek Kepuasan Masyarakat tercapai melampaui target yang ditetapkan.

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Survey Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat pada Unit Pelayanan Publik yang ada pada Perangkat Daerah, dengan maksud untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan layanan publik. Survey dilakukan dengan menggunakan 9 (sembilan) unsur pelayanan yang meliputi : 1) Persyaratan, capaian nilai rata-rata 3,033; 2) Prosedur, nilai rata-rata 3,08,; 3) Waktu Pelayanan, nilai rata-rata 2,981; 4) Biaya/Tarif, nilai rata-rata 3,604; 5) Produk Layanan nilai rata-rata 3,098; 6) Kompetensi Pelaksanaan nilai rata-rata 3,076; 7) Penilaian Pelaksanaan nilai rata-rata 3,189; 8) Maklumat Pelayanan nilai rata-rata 3,157; 9) Penanganan Pengaduan nilai rata-rata 3,303.



Dari Sembilan unsur tersebut nilai paling rendah ada pada usur waktu pelayanan dengan nilai 2,981. Hal ini disebabkan karena :

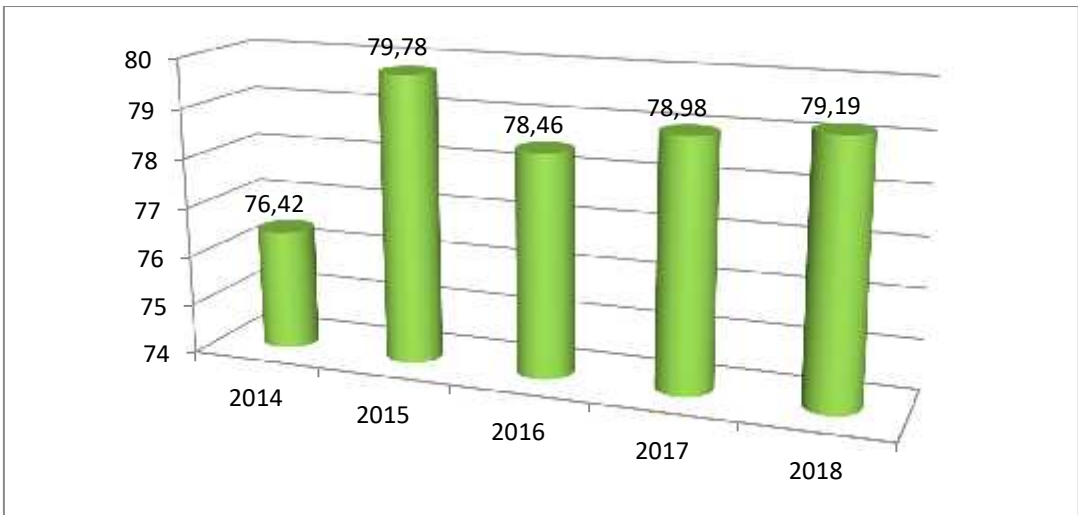
1. Kurangnya pemahaman pengguna layanan terhadap standar pelayanan sesuai kebutuhan pelayanan;
2. Sarana dan prasarana pendukung administrasi perkantoran belum seluruhnya memenuhi standar;



Adapun terkait penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu RS. Hj. Anna Lasmanah sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik kategori Sangat Baik Tahun 2018.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 3.7
Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif maka terdapat kecenderungan (trend) yang menurun pada Tahun 2016 dan mulai meningkat kembali pada Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018.

Capaian yang memuaskan tersebut didukung oleh :

1. Semakin baiknya layanan yang diberikan oleh Unit Pelayanan Publik (UPP);
2. Unit Pelayanan Publik semakin aktif melaksanakan Survey dan menjadikan dokumem hasil Survey Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki layanannya.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi ada beberapa upaya yang dilaksanakan antara lain :

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan publik;
2. Unit Pelayanan Publik melaksanakan publikasi standar pelayanan kepada pengguna layanan sehingga pengguna layanan dapat memahami standar pelayanan untuk masing-masing jenis layanan;
3. Peningkatan kinerja petugas pelayanan;
4. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana penunjang layanan.



Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan survey kepuasan masyarakat antara lain Pelaksanaan survey masih dilakukan secara manual sehingga responden masih bisa dipengaruhi oleh pihak lain. Terhadap kendala tersebut langkah dan strategi yang akan dilakukan adalah dengan membangun aplikasi survey kepuasan masyarakat, menjadikan hasil survey sebagai dasar penganggaran.

Adapun program yang mendukung sasaran ini adalah program mengintensifkan penanganngan pengaduan masyarakat dengan kegiatan pembinaan pelayanan publik.

Sasaran 2 :

Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2017			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B	B	100	B	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100		100	

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporean Kinerja dan Tata Cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

Dari data sebagaimana dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya adalah 100%. Pencapaian nilai B ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya sudah cukup memadai serta kualitas



pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah menunjukkan hasil yang baik.

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya capaiannya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.8
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 – 2018

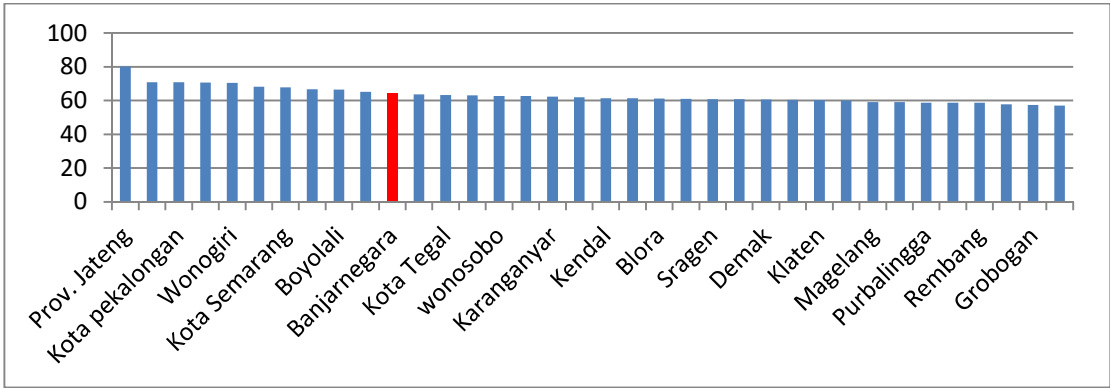
No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai 2014	Nilai 2015	Nilai 2016	Nilai 2017	Nilai 2018
1.	Perencanaan Kinerja	35	21,69	18,98	20,64	21,23	21,28
2.	Pengukuran Kinerja	20	11,84	8,35	10,34	14,95	15,84
3.	Pelaporan Kinerja	15	9,24	9,09	10,55	8,48	10,24
4.	Evaluasi Kinerja	10	5,50	5,66	5,21	5,76	5,78
5.	Capaian Kinerja	20	9,74	10,52	10,89	10,10	11,20
	Nilai Hasil Evaluasi	100	58,01	52,60	57,63	60,52	64,34
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC	CC	CC	B	B

Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara

Dari data diatas, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi atas target yang telah ditetapkan capaiannya cenderung meningkat.

Dan bila disandingkan dengan nilai SAKIP Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.9
Nilai SAKIP Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018



Sumber Data : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Banjarnegara



Adapun nilai hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun yaitu Tahun 2015 B, 2016 BB, 2017 BB, Tahun 2018 dengan kategori A (80,18). Sementara Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Tengah sudah mulai ke nilai BB sebanyak 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota Pekalongan dan Kabupaten Wonogiri, sedangkan untuk Kabupaten Banjarnegara bersama 21 (dua puluh satu) Kabupaten/Kota masih dengan nilai B.

Meskipun capaian realisasi sudah sesuai dengan yang ditargetkan, akan tetapi masih banyak hal-hal yang harus dibenahi dan disempurnakan lagi. Beberapa hal yang perlu ditidakklanjuti untuk lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan penyempurnaan pada dokumen RPJMD dan Renstra OPD dengan memperbaiki indikator kinerja yang berorientasi hasil, relevan dan cukup untuk mengukur capaian sasaran strategis;
2. Memanfaatkan cascading kinerja dalam penyusunan indikator kinerja khususnya di level eselon III dan IV;
3. Mengembangkan aplikasi manajemen kinerja secara terintegrasi, mulai dari perencanaan, pengukuran kinerja dan penganggaran sehingga dapat menciptakan performance based budgeting;
4. Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan OPD dengan menyajikan analisis yang memadai sehingga informasi kinerja tersebut dapat diandalkan untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja pada masa mendatang;
5. Meningkatkan kualitas hasil evaluasi internal terhadap implementasi SAKIP di OPD, sehingga mampu memberikan rekomendasi percepatan peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
6. Melakukan reviu atas program, kegiatan dan komponen anggaran untuk memastikan bahwa anggaran yang ditetapkan dialokasikan untuk mencapai sasaran strategis.

Sasaran tersebut dicapai melalui Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.



Sasaran 3 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Pemerintahan Desa

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase Peningkatan Desa Berkembang	%	3	9,32	310	3	310	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				310		310	

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada Tahun 2018 persentase peningkatan desa berkembang telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 3% atau 5 desa dapat terealisasi 9,32% atau 15 desa yang berasal dari peningkatan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal menjadi desa berkembang, sehingga jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal berkurang dari 79 desa menjadi 64 desa.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2016, bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan kejelasan status perkembangan desa sehingga mempermudah para pelaku kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan mencapai tujuan pembangunan tersebut.

Indikator Persentase tingkat perkembangan desa mengacu pada Indeks Desa Membangun (IDM) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendes PDTT) Nomor 2 Tahun 2016. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Komponen Indeks Desa membangun sebagai berikut :

No	Komponen	Dimensi	
1	Ketahanan Sosial	Modal sosial	: Solidaritas sosial, toleransi, rasa aman penduduk, kesejahteraan sosial
		Kesehatan	: Pelayanan kesehatan, keberdayaan masyarakat untuk kesehatan.
		Pendidikan	: Akses ke Pendidikan Dasar dan Menengah, Akses ke Pendidikan Non Formal, Akses ke Pengetahuan.
		Permukiman	: Akses ke air bersih dan air minum layak, akses ke sanitasi, akses ke listrik, akses ke informasi dan komunikasi



2	Ketahanan Ekonomi	Keragaman produksi masyarakat desa, tersedia pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi/logistik, akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, lembaga ekonomi, keterbukaan wilayah
3	Ketahanan Ekologi	Keterbukaan wilayah, Potensi rawan bencana dan tanggap bencana,

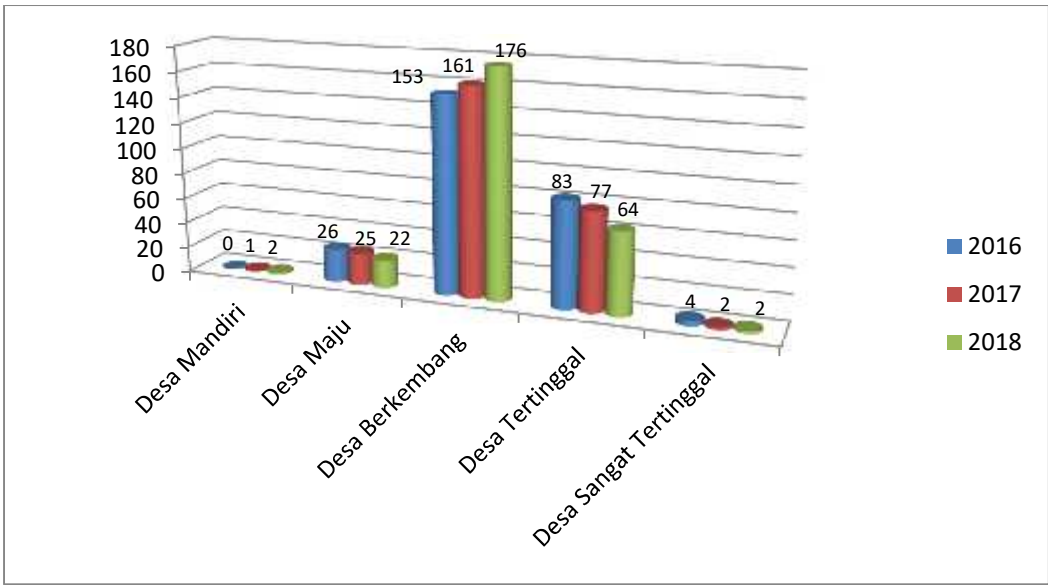
Indeks Desa Membangun dihasilkan dari rata-rata Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi. Setiap indikator memiliki skor. Nilai skor yaitu 0 - 5. Klasifikasi Status Desa ditetapkan dengan ambang batas sebagai berikut:

1. Desa Mandiri: $IDM > 0,8155$
Desa Mandiri, atau bisa disebut sebagai Desa Sembada, adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
2. Desa Maju: $0,7072 < IDM \leq 0,8155$
Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa PraSembada, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;
3. Desa Berkembang: $0,5989 < IDM \leq 0,7072$
Desa Berkembang, atau bisa disebut sebagai Desa Madya, adalah Desa Potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
4. Desa Tertinggal: $0,4907 < IDM \leq 0,5989$
Desa Tertinggal, atau dapat disebut Desa PraMadya, adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya; dan
5. Desa Sangat Tertinggal: $IDM \leq 0,4907$
Desa Sangat Tertinggal, atau dapat disebut Desa Pratama, adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Apabila dibandingkan dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya strata desa di wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat seperti pada tabel berikut :



Tabel 3.10
Strata Desa di Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2018



Sumber Data: Dispermasdes Kabupaten Banjarnegara

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum desa berkembang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan desa tertinggal dan desa sangat tertinggal ke desa berkembang signifikan.

Semakin meningkatnya status perkembangan desa menggambarkan desa semakin memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan memiliki kemampuan untuk mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi desa meskipun belum optimal.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Dukungan pembiayaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju desa yang maju dan mandiri;
3. Koordinasi dan kerjasama dari semua sektor dan Organisasi Perangkat Daerah terkait dalam rangka pembangunan desa;
4. Sosialisasi, monitoring, evaluasi serta pendampingan kepada aparatur pemerintah desa, lembaga dan masyarakat terkait pengelolaan, pemberdayaan dan pembangunan desa;



Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian melalui optimalisasi program- program sebagai berikut :

No	Dimensi IDM	Program	Upaya yang dilaksanakan
1	Ketahanan social	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	- Meningkatkan solidaritas sosial berupa kebiasaan gotong-royong dan swadaya masyarakat dalam pembangunan desa; - Peningkatan keberdayaan masyarakat untuk kesehatan berupa pembinaan tingkat aktivitas Posyandu - Melalui bantuan keuangan provinsi kepada desa untuk peningkatan akses sanitasi diantaranya berupa jamban sehat.
2	Ketahanan Ekonomi	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	- Mendorong keragaman produksi masyarakat desa melalui BUMDesa dan pengembangan unit usaha BUMDesa; - Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) berupa pasar desa untuk menunjang akses pelayanan pusat perdagangan. - Akses ke lembaga keuangan dan perkreditasn melalui SPP UPK Kecamatan eks PNPM.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Sarana Infrastruktur Jalan dan Jembatan

Pada periode jangka menengah Tahun 2017-2022, peningkatan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama Pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, dengan harapan akan tercipta peningkatan perekonomian kabupaten melalui multiplier efek yang timbul dari berbagai aspek karena adanya peningkatan kualitas jalan.

Sasaran meningkatnya sarana infrastruktur jalan dan jembatan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase kabupaten jalan dalam kondisi baik	%	63	70,104	111,27	73	96,03	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				111,27		96,03	



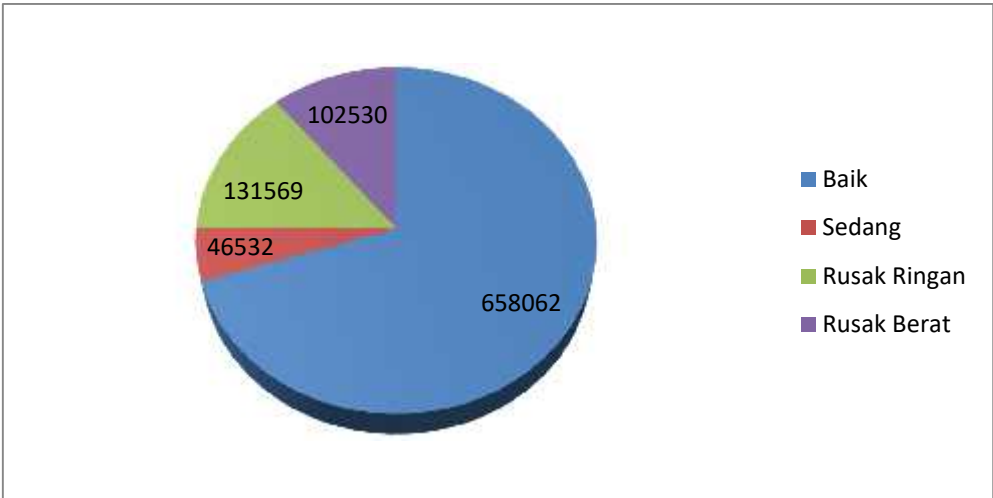
Panjang jalan dalam kondisi baik pada Tahun 2018 ditargetkan 63% atau 590,116 Km dan dapat terealisasi 70,104% atau 658,062 Km atau tercapai 111,27%, yang terdiri dari : Rigid : 32.050 Km, Hotmik : 503.061 Km, Lapen : 122.951 Km. Dan bila dibandingkan denngan target akhir RPJMD maka sudah tercapai dengan capaian sebesar 96,03%.

Panjang jalan Kabupaten Banjarnegara sampai dengan Tahun 2018 secara keseluruhan adalah 938,693 Km, dengan kondisi jalan sebagai berikut :

Kondisi baik	: 658,062 km	(70,104%)
Kondisi sedang	: 46,532 km	(4,957%)
Kondisi rusak ringan	: 131,569 km	(14,016%)
Kondisi rusak berat	: 102,530 km	(10,923%)

Jumlah	: 938, 693 km.	(100%)

Tabel 3.11
Kondisi Jalan di wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Presentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	45,35%	55,57%	58,83%	68,87%	70,104%

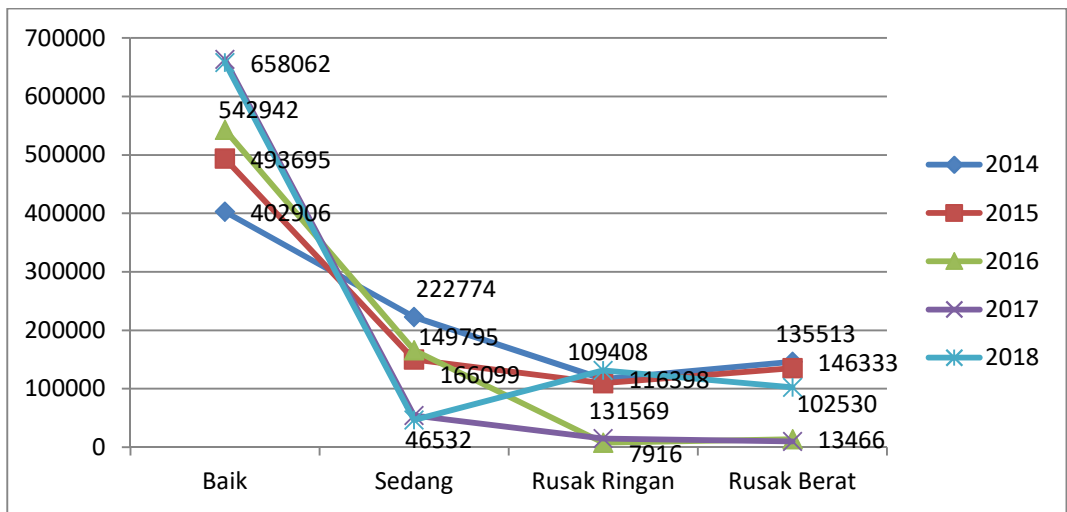
Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat hal ini dikarenakan ada prioritas untuk penanganan infrastruktur. Akan tetapi kenaikan tidak terlalu signifikan, mengalami kenaikan 1,234 % pada tahun 2018. Prosentase kenaikan ini tidak begitu



besar dibandingkan dengan anggaran yang tersedia karena kegiatan penanganan jalan pada tahun 2018 adalah untuk peningkatan struktur dan kapasitas jalan (konstruksi rigid beton untuk pelebaran jalan maupun rigid beton secara total, dimana konstruksi rigid beton

tersebut membutuhkan biaya yang besar tetapi volume penanganan pendek).

Tabel 3.12
Kondisi Jalan Kabupten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat digambarkan dari sisi penganggaran terdapat efisiensi, dikarenakan konstruksi jalan menggunakan rigid beton sehingga umur teknis bisa bertambah panjang sehingga bisa mengurangi biaya pemeliharaan jalan.

Indikator kinerja “ Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik ”dicapai melalui 3 (tiga) program utama yaitu program : Peningkatan jalan dan jembatan, Pembangunan Jalan dan Jembatan , Rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan serta 2 (dua) program pendukung yaitu program pembangunan saluran / drainase / gorong gorong dan Program Pembangunan Turap / talud / bronjong, seluruh program / kegiatan terlaksana dengan baik tidak ada kegiatan yang gagal lelang ataupun putus kontrak.



Namun demikian karena pada akhir tahun 2018 masih terdapat kondisi jalan kabupaten yang rusak berat sepanjang : 102,530 Km atau 10,923 % dan rusak ringan sepanjang 131,569 Km atau 14,016 % yang membutuhkan prioritas penanganan untuk pengembangan atau konektifitas antar wilayah (kabupaten / kecamatan) dan mendukung perekonomian.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Jaringan Irigasi

Sebagian besar mata pencaharian penduduk Banjarnegara adalah petani, salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat adalah dengan mendorong produktivitas petani padi melalui peningkatan kualitas jaringan irigasi, dimana peningkatan pelayanan melalui jaringan irigasi dalam kondisi baik merupakan salah satu upayanya.



Adapun pencapaian indikator luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.524	15.832	101,98	17.495	90,49	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				101,98		90,49	

Kondisi jaringan irigasi sampai akhir Tahun 2018 :

Jumlah Daerah Irigasi	: 326 DI.
Luas Daerah Irigasi	: 24.642 Ha.
Kondisi baik	: 349.747 m (64,25%)
Kondisi rusak ringan	: 107.772 m (19,80%)
Kondisi rusak berat	: 86.848 m (15,95%)

Jumlah	: 544.367 m. (100%)



Pada Tahun 2018 luas areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik ditargetkan seluas 15.524 Ha. Dan dapat terealisasi seluas 15.832 Ha atau tercapai 01,98%. Hal ini didukung oleh panjang irigasi dalam kondisi baik 349.747 m dari panjang irigasi 544.367m.

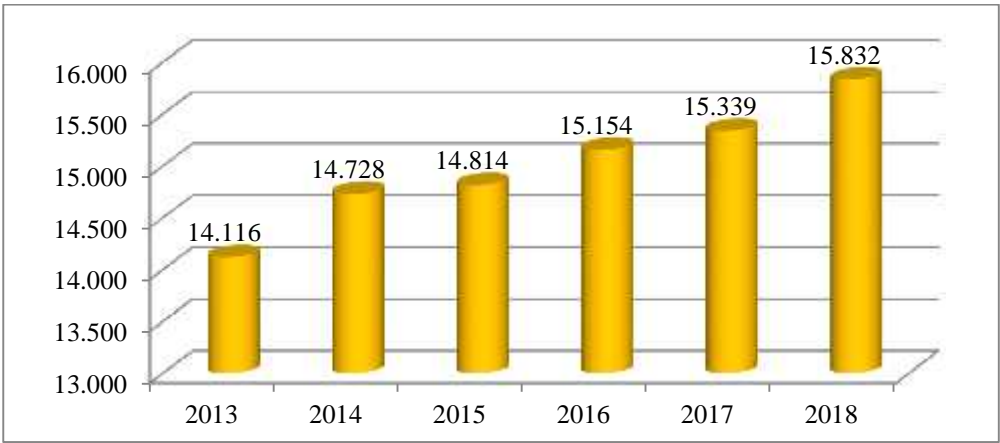
Dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah (Tahun 2022) maka indikator kinerja Luas Areal sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik sampai dengan tahun 2018 mencapai 90,48%.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	14.728Ha	14.814Ha	15.154 Ha	15.339Ha	15.832Ha

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2018, hal ini dikarenakan pada tahun 2018 lebih intensif dalam menentukan skala prioritas dengan penentuan penanganan lebih banyak pada kondisi Rusak Sedang dibandingkan dengan kondisi Rusak Berat yang penanganannya jauh lebih banyak memerlukan anggaran.

Tabel 3.13
Luasan Sawah yang dialiri Irigasi Kondisi Baik



Sumber Data : DPUPR Kabupaten Banjarnegara

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Adanya dukungan jaringan kondisi baik sebesar 64, 25% dari luasan jaringan irigasi yang ada;
2. Infrastruktur menjadi program prioritas pada 3 (tiga) tahun pertama periode RPJMD



Indikator kinerja Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik dicapai melalui Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan irigasi lainnya.

Sasaran 3 : Meningkatkan Kinerja Sektor Pertanian dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
1. Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,5	3,19*	127,6	3	106,33	Sangat Tinggi
2. Nilai tukar petani (umum)	%	102	106,48**	104,39	104	102,38	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				116		104,36	

Sumber Data : * Angka prediksi Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara
** BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017

Indikator kinerja sasaran yang ditargetkan Tahun 2018 tercapai dengan rata-rata capaian 116%. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2022 tercapai sebesar 104,36%.

Pertumbuhan sektor pertanian tercapai melebihi yang ditargetkan. Adapun komoditas yang diukur antara lain komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Pada komoditas tanaman pangan beberapa mengalami penurunan, yaitu komoditas padi dan ubi kayu. Produksi padi Tahun 2017 sebesar 156.465,47 ton menurun menjadi menjadi 149.307,00 ton pada Tahun 2018. Demikian juga dengan ubi kayu dari 148.387,50 ton di Tahun 2017 menjadi 82.616,40 ton tahun 2018. Untuk bahan pangan utama yang mengalami kenaikan pada komoditas jagung dan kedelai, pada Tahun 2017 produksi jagung sebesar 40.258,01 menjadi 46.874,40 ton di Tahun 2018 dan produksi kedelai dari 65,27 ton pada Tahun 2017 menjadi 1.979,30 pada Tahun 2018.

Pada komoditas jagung dan kedelai pada Tahun 2018 mengalami kenaikan dikarenakan sejak Tahun 2017 ada upaya khusus untuk tanaman jagung dan kedelai melalui program pemberian bantuan kepada kelompok tani.



Penurunan komoditas padi disebabkan adanya konversi lahan sawah menjadi lahan non pertanian seperti jalan, perumahan dan perkantoran, selain itu faktor musim kemarau juga berdampak pada kemunduran musim tanam dan adanya penurunan kesuburan tanah sehingga mengakibatkan penurunan produktivitas lahan.

Pada komoditas ubi kayu mengalami penurunan pada Tahun 2018 dikarenakan petani ubi beralih pada komoditas lain seperti jagung, kacang tanah, kedelai, cabai, tomat dan sayuran lainnya, karena keuntungan yang lebih menjanjikan, selain itu pada Tahun 2017 saat panen raya ubi kayu harganya jatuh bahkan banyak ubi kayu yang tidak dipanen karena harga tidak dapat menutup biaya panen.

Guna meningkatkan produksi komoditas tanaman pangan antara lain :

1. Mengupayakan kepada kelompok tani untuk menggunakan bibit unggul dan tahan hama penyakit tanaman khususnya padi dan pemupukan berimbang.
2. Menggunakan mekanisasi pertanian seperti traktor untuk pengolahan tanah, alat tanam, alat panen untuk percepatan produksi dan meningkatkan indeks pertanaman.
3. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier dan pengelolaan sumber-sumber air seperti air, embung, dam parit dan long storage.
4. Melakukan pendampingan oleh petugas pertanian kepada kelompok tani untuk melaksanakan budidaya tanaman pangan yang baik dan benar.
5. Melakukan sosialisasi kepada kelompok tani agar tetap membudidayakan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan palawija serta membantu informasi pasar.
6. Melakukan budidaya tanaman tumpangsari untuk menekan kerugian dari salah satu komoditas baik apabila harganya jatuh. Tumpang sari tanaman pangan dapat dilakukan seperti padi gogo dengan ubi kayu, padi dengan jagung, padi dengan kedelai, jagung dengan ubi kayu, jagung dengan kedelai, kedelai dengan ubi kayu.

Produksi tanaman hortikultura buah dan sayur yang mengalami kenaikan pada komoditas kentang dan durian sedangkan pada komoditas salak, pisang dan cabai mengalami penurunan. Pada komoditas kentang meningkat dari 94.495,40 ton pada Tahun 2017 menjadi 120.096,80 ton pada Tahun 2018, durian meningkat dari 5.029,10 ton menjadi 6.050,40 ton. Sedangkan pada komoditas salak menurun dari 549.028,70 ton menjadi 400.216,70 ton, pada komoditas pisang menurun dari 19.190,10 ton menjadi 18.010,40 ton, cabai menurun dari 31.387,20 ton menjadi 24.863,30 ton.

Peningkatan produksi kentang dan durian pada Tahun 2018 karena adanya dukungan fasilitasi pemberian bibit unggul lokal pada tanaman kentang sedangkan



untuk komoditas durian meningkat disebabkan kondisi iklim yang mendukung dan masa panen durian dari pohon yang telah diremajakan pada Tahun 2015.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi kentang dan durian dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mengembangkan perbenihan varietas kentang lokal baru yang memiliki daya tahan terhadap penyakit/jamur kentang, seperti Tedjo MZ, kentang merah, kentang hitam, dan kentang vega;
2. Pengembangan varietas unggul lokal seperti simemang dan sambeng;
3. Membangun kawasan durian sebagai wahana agrowisata.

Sedangkan penurunan pada komoditas salak, pisang dan cabai disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya fluktuasi harga salak yang cenderung menurun sehingga petani salak beralih ke komoditas lainnya yang lebih menguntungkan;
2. Budidaya komoditas pisang kurang diminati petani dan hanya dianggap sebagai tanaman pelengkap dilahan kosong, kecuali pada jenis pisang rajalawe namun produksinya juga belum dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan;

Sedangkan pada produksi tanaman perkebunan pada Tahun 2018 mengalami peningkatan untuk semua komoditas, untuk tanaman kopi mengalami peningkatan dari 653,06 ton pada Tahun 2017 menjadi 1.153,89 ton Tahun 2018, komoditas kelapa dalam mengalami peningkatan dari 9.337,88 ton menjadi 10.476,48 ton, komoditas kelapa deres meningkat dari 9.068,51 ton menjadi 9.541,33 ton, sedangkan pada komoditas tembakau meningkat dari 177,57 ton menjadi 180,94 ton dan pada komoditas lada meningkat dari 119,06 ton menjadi 133,44 ton.

Peningkatan pada produksi tanaman perkebunan didukung oleh :

1. Meningkatnya permintaan kopi Banjarnegara sehingga meningkatkan minat petani untuk memperluas lahan tanam kopi;
2. Merupakan keberhasilan dari peremajaan kelapa yang dilaksanakan pada beberapa tahun sebelumnya;
3. Adanya pemberian bantuan benih lada;

Untuk produksi perikanan mengalami penurunan pada produksi benih ikan dari 2.270.782.704 ekor menjadi 2.267.107.700 ekor dikarenakan adanya cuaca ekstrim yang berpengaruh pada daya tahan benih ikan, sedangkan pada perikanan budidaya mengalami kenaikan dari 27.169,43 ton menjadi 29.750,63 dan pada perikanan tangkap juga mengalami kenaikan dari 1.040,44 ton menjadi 1.140,00 ton. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah petani pembudidaya ikan yang mendapatkan



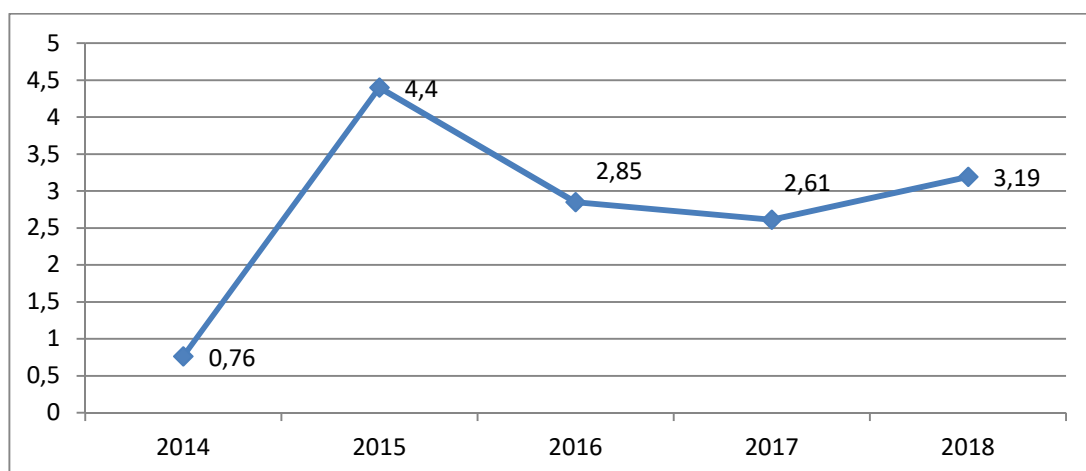
pembinaan dalam penerapan teknologi tepat guna dan aanya penebaran benih ikan di perairan umum.

Populasi ternak mengalami sedikit kenaikan pada domba dari 211.054 ekor menjadi 253.063 ekor atau meningkat 19,9%. Sedangkan pada populasi sapi mengalami penurunan yaitu dari 29.484 ekor menjadi 29.412 ekor.

Meskipun pertumbuhan sektor pertanian pada Tahun 2018 tercapai melebihi target, namun bila dibandingkan dengan Tahun 2017 pertumbuhan sektor pertanian terhitung stabil meskipun pertumbuhan pada masing-masing sektor cenderung fluktuatif.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.14
Pertumbuhan Sektor Pertanian Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014-2017



Sumber Data : BPS, Baperlitbang dan Distankan Kabupaten Banjarnegara

Meskipun demikian Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus melaksanakan upaya peningkatan produksi pertanian, mengingat Kabupaten Banjarnegara memiliki kekhususan antara lain pada keunggulan bibit domba batur, salak, kentang dan juga kopi yang memiliki kualitas unggul. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Fasilitasi sarana dan prasarana pendukung peningkatan produksi pertanian;
2. Fasilitasi bibit unggul, baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, maupun peternakan dan perikanan;
3. Penerapan Teknologi Tepat Guna dengan penggunaan dan pemanfaatan lahan pertanian secara bijaksana;
4. Pendampingan intensif oleh tenaga ahli di bidangnya masing-masing;
5. Sertifikasi pohon induk untuk menjaga komoditas yang akan dikembangkan;

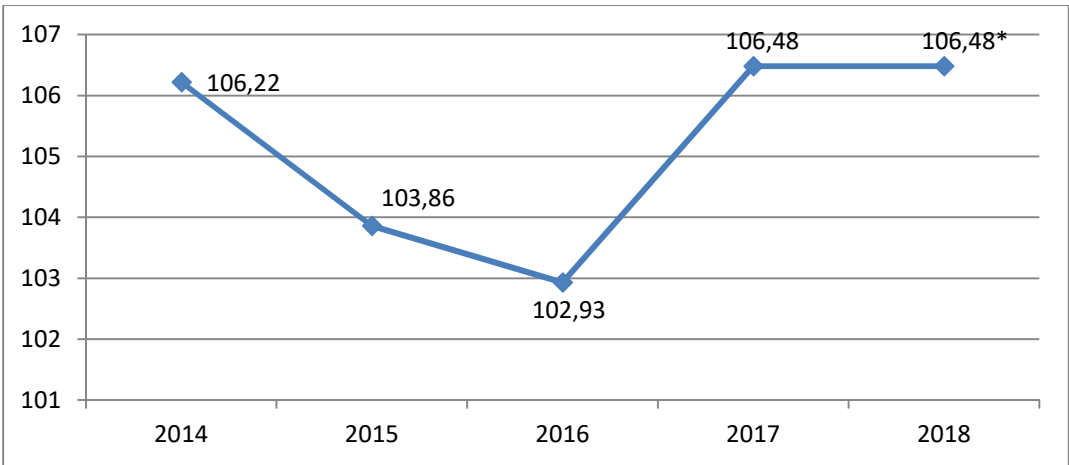


Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan.NTP juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/daya beli petani.

NTP Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 di targetkan sebesar 102% dan terealisasi sebesar 106,48% atau tercapai 103,38%. Hal ini menggambarkan tingkat pendapatan petani di Kabupaten Banjarnegara mengalami surplus. Dimana biaya produksi lebih rendah dari nilai jual produknya sehingga pendapatan petani lebih besar dari pengeluarannya.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya NTP Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.15
Nilai Tukar Petani Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014-2018

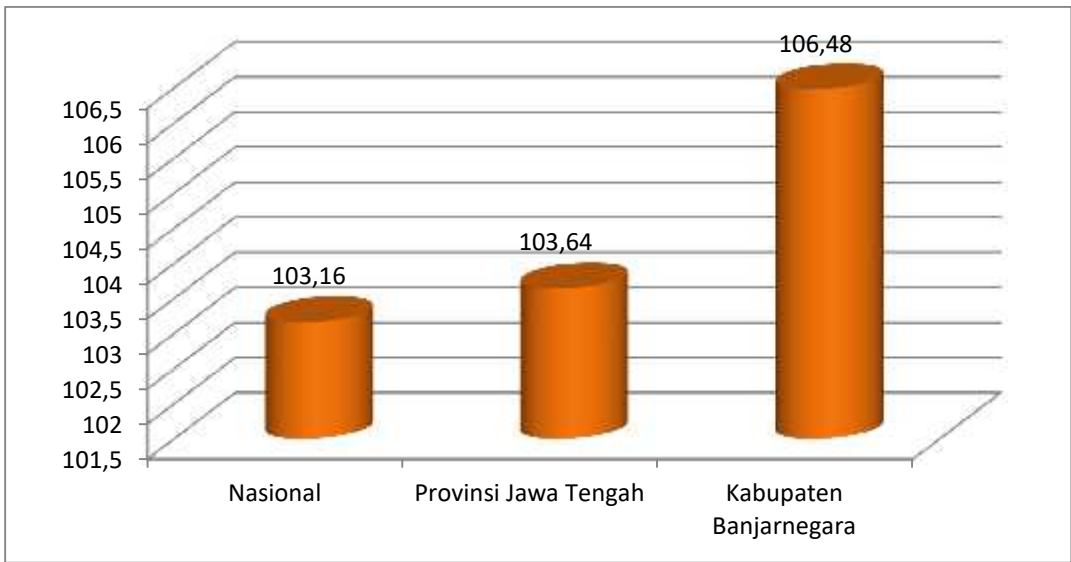


Sumber Data : BPS Kabupaten Banjarnegara

Dan apabila dibandingkan dengan capaian NTP di tingkat nasional maupun provinsi maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.16
NTP Tingkat Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa NTP Kabupaten Banjarnegara paling tinggi. Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka lebih tinggi 2,84% dan bila dibandingkan dengan nasional maka lebih tinggi 3,32%.

Pencapaian sasaran diatas didukung oleh APBD Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan melalui program :

1. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
2. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
3. Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
4. Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Pengembangan Perikanan Tangkap
6. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
7. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
8. Peningkatan Ketahanan Pangan
9. Pemberdayaan penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan
10. Peningkatan pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan
11. Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani



Sasaran 4 : Meningkatkan kinerja sektor pariwisata

Selain sektor pertanian, salah satu potensi unggulan Kabupaten Banjarnegara adalah sektor pariwisata. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata di Kabupaten Banjarnegara diukur melalui indikator :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase peningkatan kunjungan wisatawan	%	3	5,32	177,33	3	177,33	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				177,33		177,33	

Berdasarkan tabel diatas, sasaran meningkatnya kinerja sektor pariwisata dengan indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan tercapai sebesar 177,33% dari target yang ditetapkan sebesar 3% dan dapat terealisasi 5,32%. Salah satu pendukung meningkatnya kunjungan wisata adalah adanya promosi secara intensif terhadap penyelenggaraan evant di Kabupaten Banjarnegara, diantaranya penyelenggaraan Dieng *Culture Festival* yang dipromosikan melalui berbagai media, baik cetak dan elektronik dan berkembangnya destinasi pariwisata. Hal ini berpengaruh signifikan pada peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Banjarnegara.

Adapun realisasi kunjungan wisata Tahun 2018 pada obyek dan even wisata di Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

No	Obyek	Jumlah Kunjungan
1.	Dieng	564.022
2.	Curug Pitu	3.424
3.	TRMS Seruling Mas	268.897
4.	Dieng Culture Festival	158.200
5.	Festival Serayu Indonesia	-
6.	Kuduran Wanayasa, Nyadran gedhe	30.125
7.	Desa Wisata	168.897
8.	Event Wisata	18.500
9.	Waduk Mrica	16.813
10.	Kolam Renang Anglir Mendung	97.507
11.	Surya Yudha Park	145.075
12.	Serayu Park	8.902
13.	D'Qiano Dieng	29.195
14.	Serayu Adventure Indonesia	17.503
15.	Pikas Bannyu woong	15.683



16.	Arung Jeram Serayu	2.324
17.	MICE (lainnya)	102.205
18.	Surya Yudha Sport Center	22.618
Jumlah		1.669.890

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah pada akhir RPJMD, persentase kunjungan wisata tercapai sama dengan capaian pada Tahun 2018 yaitu 177,33%. Meskipun demikian pengembangan destinasi pariwisata harus terus dipotimalkan untuk tetap mempertahankan jumlah kunjungan wisata.

Adapun upaya pendukung tercapainya target persentase kunjungan wisata antara lain :

1. Seraca intensif melakukan promosi baik internal kabupaten, antar kabupaten, antar provinsi bahkan antar pulau baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik;
2. Menyelenggarakan event pariwisata secara berkala;
3. Melakukan kerjasama dengan pengelola pariwisata.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3.17
Persentase Peningkatan Kunjungan Pariwisata
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data: Disparbud Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa persentase peningkatan kunjungan wisatawan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini sangat



tergantung pada promosi dan paket wisata yang dapat disajikan kepada wisatawan pada saat berkunjung ke Kabupaten Banjarnegara.

Untuk tetap dapat mempertahankan kunjungan wisatawan, Pemerintah Kabupaten Banjarnegara mulai menginisiasi munculnya desa wisata dengan kekhasan masing-masing wilayah. Dengan semakin beragamnya sajian yang dapat dinikmati wisatawan, diharapkan kunjungan wisatawan akan semakin meningkat.

Keberhasilan pencapaian indikator persentase peningkatan kunjungan wisatawan didukung oleh alokasi APBD Kabupaten Banjarnegara melalui program pengembangan pemasaran pariwisata dan pengembangan kemitraan.

Sasaran 5 : Meningkatkan kinerja UKM dan koperasi

Sasaran meningkatnya kinerja UKM dan Koperasi diukur melalui 2 (dua) indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
1. Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10	10,6	106	14	75,71	Tinggi
2. Persentase koperasi sehat	%	34	34.60	101,76	38	91,05	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				103,88		83,38	

Sasaran meningkatnya kinerja UKM dan Koperasi tercapai dengan rata-rata 103,88%, dan bila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka tercapai dengan rata-rata 83,38%.

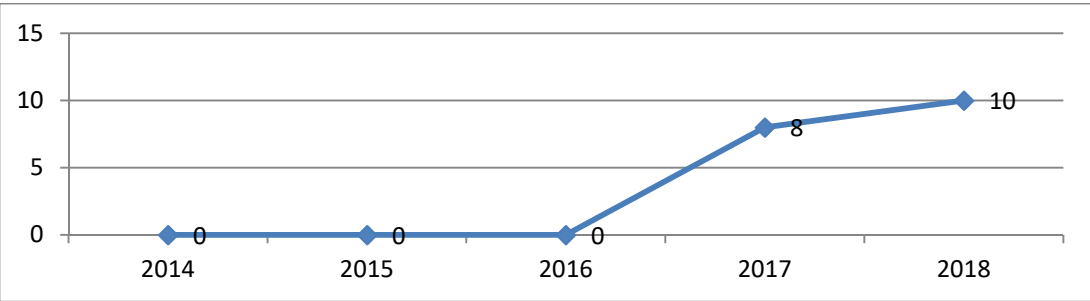
Pada indikator Kontribusi UKM terhadap PDRB target 10% terealisasi 10,6% , dapat terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan dikarenakan adanya kesadaran masyarakat dalam berwirausaha yang didukung dengan pembinaan secara berkelanjutan oleh Pemerintah maupun pihak swasta terhadap pelaku UMKM dengan peningkatan kapasitas sumber daya UMKM melalui pelatihan dan magang baik dari anggaran APBD Propinsi maupun APBD Kabupaten.

Jumlah UMKM pada Tahun 2018 mengalami peningkatan dari 27.142 unit menjadi 27.397 unit atau bertambah 255 unit dengan rincian usaha mikro sejumlah 24.403 unit, usaha kecil sejumlah 2.746 unit dan usaha menengah sejumlah 248 unit.



Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.18
Kontribusi UKM terhadap PDRB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data: Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

Keberhasilan indikator kinerja ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Kontribusi UKM terhadap PDRB Target akhir Tahun RPJMD adalah 14 s/d 15%, baru tercapai 10% , masih terdapat kekurangan 4% yang akan dicapai selama 3 tahun kedepan dengan cara meningkatkan pertumbuhan UKM dan melakukan pembinaan melalui pelatihan dan magang serta memfasilitasi UMKM dalam meperluas jaringan pemasaran dengan mengikuti pameran.
2. Pertumbuhan UMKM mencapai 96.9%, Target Pertumbuhan UMKM pada tahun akhir RPJMD adalah 0.97%, masih terdapat kekurangan 0.03% yang akan dipenuhi selama 3 tahun dengan cara memotivasi masyarakat dan pelaku UMKM untuk memiliki jiwa wirausaha melaui fasilitasi , pembinaan dan pelatihan serta magang bagi pelaku UMKM baik dari anggaran Pusat, Propinsi maupun Kabupaten.

Meskipun sudah tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan akan tetapi seiring dengan berkembangnya UKM perlu dilakkan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan tercapainya indikator kinerja, antara lain :

1. Mendorong pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki ijin usaha;
2. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil menengah melalui pelatihan, peningkatan inovasi produk;
3. Mendorong pelaku usaha mikro kecil untuk memiliki hak paten produk;
4. Bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk mempermudah akses permodalan di bank;
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pembinaan industri rumah tangga , industri kecil dan industri menengah baik dengan anggaran Kabupaten Provinsi maupun pusat.



Sesuai Permen KUKM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Revitalisasi Koperasi koperasi sehat adalah koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahunnya. Kriteria koperasi sehat adalah :

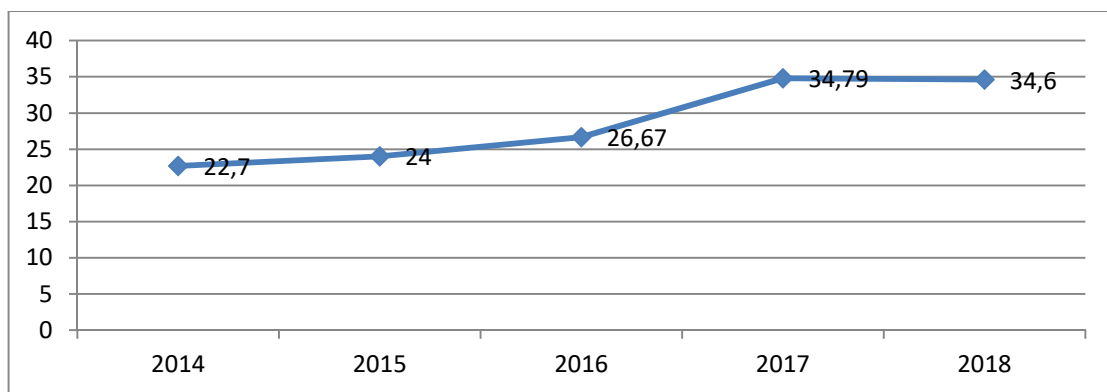
1. Perangkat organisasi koperasi berjalan dengan baik melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), ada pengurus dan pengawas koperasi;
2. Sehat administrasi (semua transaksi tetang perkoperasian tersusun dengan tertib);
3. Adanya Peningkatan usaha (aset, omset dan SHU);
4. Pelayanan kepada anggota meningkat.

Pada indikator persentase koperasi sehat dari target 34 s.d 35 dapat terealisasi sebesar 34,60% atau tercapai sebesar 101,76%. Dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai 91,05%.

Di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 terdapat sejumlah 393 koperasi dimana 136 koperasi dinyatakan sebagai koperasi sehat, koperasi aktif sejumlah 182 dan koperasi yang tidak aktif sejumlah 211 koperasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya persentase koperasi aktif dapat dilihat pada grafik berikut :

Tabel 3.19
Persentase Koperasi Sehat
Tahun 2014-2018



Sumber Data : Disperindagkop UKM Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, koperasi sehat terdapat kecenderungan (trend) meningkat. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan koperasi baru sehingga berpengaruh pada capaian persentase koperasi sehat.

Untuk meningkatkan capaian kinerja dilaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Mendorong koperasi untuk melaksanakan RAT setiap tahun;
2. Melaksanakan pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas bagi pengelola koperasi, pengawas beserta kadernya;



Indikator kinerja ini dicapai melalui 4 (empat) program yaitu program Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, program penciptaan iklim usaha usaha kecil menengah yang kondusif, program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah, program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah.

Sasaran 6 : Meningkatkan Jumlah Investasi

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur melalui 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	10	14,62	146,2	17,5	83,54	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				146,2		83,54	

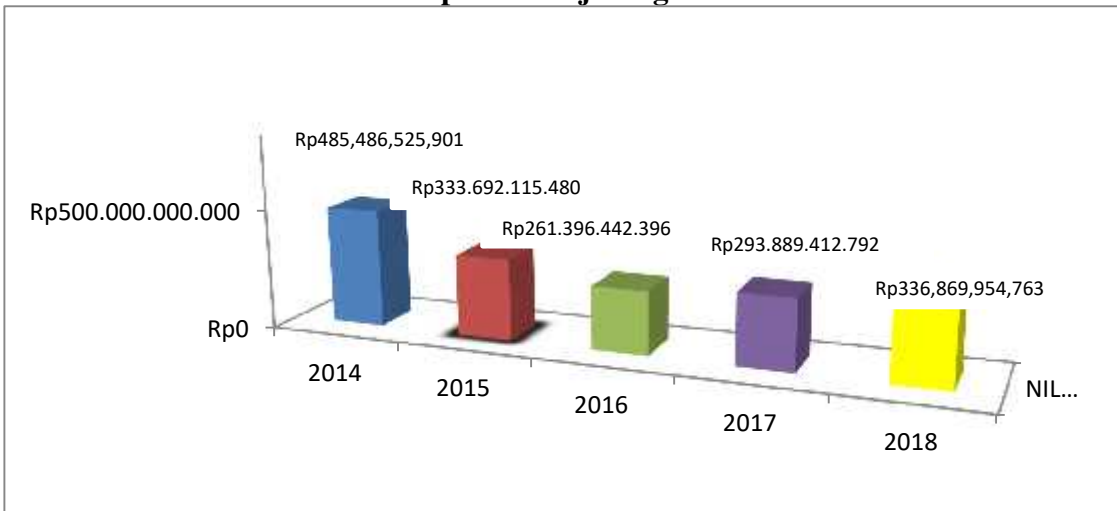
Indikator persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional tercapai 146,2%, terealisasi 14,62% dari 5 s.d 10% angka yang ditargetkan pada Tahun 2018.

Nilai investasi pada Tahun 2018 terealisasi sebesar Rp336.869.954.763,- menyerap tenaga kerja 3.603 orang dengan jumlah usaha 325 usaha yang terdiri dari usaha mikro sejumlah 81 dengan investasi Rp2.431.363.262 dan menyerap tenaga kerja sebanyak 226, usaha kecil sejumlah 181 usaha dengan investasi Rp39.604.824.940 dan menyerap tenaga kerja 631 orang, usaha menengah sejumlah 58 usaha dengan investasi Rp111.090.889.223,- dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2.230 orang dan usaha besar sejumlah 5 usaha dengan investasi Rp183.742.877.338 dan menyerap tenaga kerja 516 orang.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Tabel 3.20
Nilai Investasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Banjarnegara

Dalam kurun waktu Tahun 2014 – 2018 nilai investasi di Kabupaten Banjarnegara cenderung fluktuatif. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap nilai investasi adalah karena kebijakan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dituangkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031. Dimana diatur bahwa usaha industri harus berada pada Kawasan Industri (KI) atau Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Adapun salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri dianggap tidak cukup strategis karea lokasi tidak berada di sepanjang jalur jalan nasional.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Intensif melakukan promosi baik secara langsung maupun melalui website;
2. Melakukan penyusunan profil investasi di Kabupaten Banjarnegara melalui Sistem Peta Investasi (Simpetin) yang memudahkan para investor untuk melihat peluang investasi di Kabupaten Banjarnegara;
3. Dilaksanakannya perijinan online yang dicanangkan Pemerintah Pusat melalui OSS (*online single submission*);
4. Dilaksanakannya program JITU (Jaringan Pelayanan Perijinan Terpadu) yang digunakan untuk perijinan lokal diluar OSS secara *online*;
5. Meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dengan substansi sepanjang jalan nasional dan provinsi kiri kanan lebar 200 meter dari jalan, dapat digunakan untuk perdagangan dan industri;



Untuk mendukung capaian sasaran strategis tersebut didukung dengan melaksanakan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dan Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Sasaran 7 : Meningkatkan Kesempatan Kerja

Meningkatnya kesempatan kerja merupakan salah satu indikasi berkembangnya perekonomian daerah. Peningkatan kesempatan kerja diukur dengan 1 (satu) indikator, yaitu :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 4,9	4	118,37	< 4,5	111,11	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				118,37		111,11	

Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tahun 2018 Kabupaten Banjarnegara berhasil menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target 4,9% terealisasi 4% atau capaian kinerjanya 118,37%. Tingkat pengangguran terbuka sejumlah 4% menggambarkan bahwa dari jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 498.086 orang terdapat Pengangguran Terbuka sebanyak 19.915 orang.

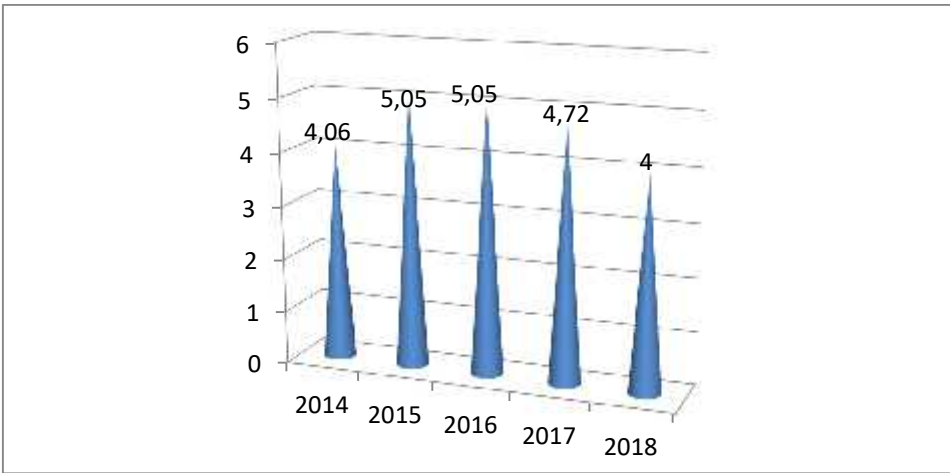
Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Adanya kerjasama dengan perusahaan yang memiliki lowongan kerja;
2. Dilaksanakannya kegiatan Job Fair sebagai salah satu media informasi lowongan pekerjaan;
3. Semakin banyaknya publikasi lowongan kerja melalui media online yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat;
4. Adanya perbaikan tata kelola program penanganan tingkat pengangguran terbuka;
5. Adanya komunikasi, kemitraan, publikasi dengan stakeholder melalui optimalisasi sarana dan prasarana serta teknologi informasi.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi (capaian) indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :



Tabel 3.21
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014 – 2018



Sumber Data : Disnaker Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, capaian indikator kinerja cenderung fluktuatif, namun pada Tahun 2018 pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 0,72%. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain meningkatnya kreatifitas masyarakat untuk berwirausaha dalam bentuk bisnis online, home idustri serta berkurangnya kasus PHK pada perusahaan.

Apabila dibandingkan target RPJMD Tahun 2022 dengan realisasi Tahun 2018, maka dicapai sebesar 111,11 %. Pencapaian ini mengindikasikan ada trend positif dengan upaya yang sudah dan akan dilaksanakan, sehingga program kegiatan yang berkaitan langsung dalam upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka harus terus didukung dengan kebijakan disemua lini.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3. 22
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banjarnegara,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber Data : Badan Pusat Statistik



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Banjarnegara berhasil dibawah TPT tingkat Provinsi Jawa Tengah dan TPT Nasional. Apabila dibandingkan dengan nasional maka tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Banjarnegara lebih rendah 1,13%, sedangkan bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Banjarnegara lebih tinggi 0,51%.

Sasaran ini dicapai melalui 4 program yaitu :

- 1. ProgramPeningkatan kesempatan kerja;
- 2. Program Peningkatan kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- 3. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi; dan
- 4. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran 8 : Meningkatkan Kinerja Sektor Industri

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu)indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

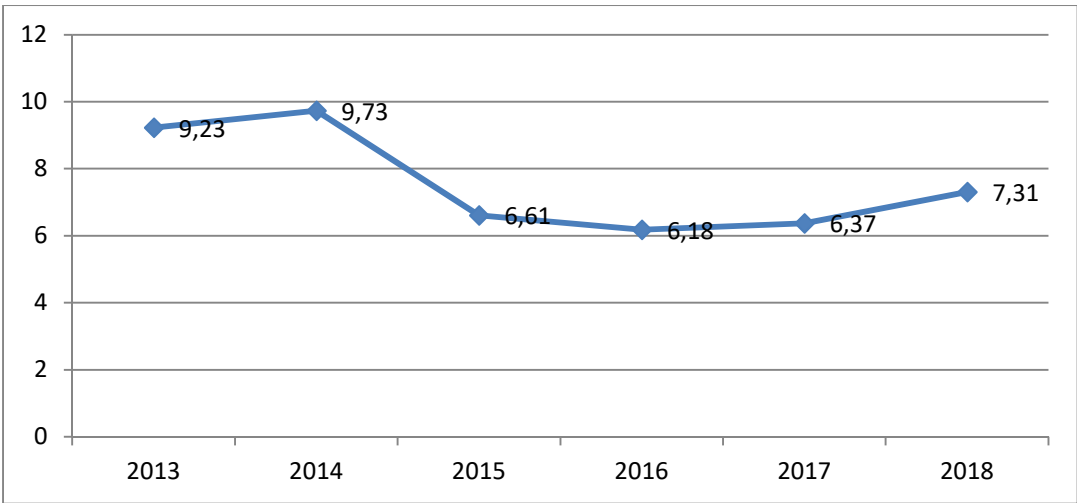
IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Pertumbuhan sektor industri	%	6,1	7, 31	119,84	7,1	102,96	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				119,84		102,96	

Sektor industri merupakan salah satu sektor dalam PDRB yang dapat menggambarkan kemampuan daerah dalam meeningkatkannilai produknya. Indikator “Pertumbuhan Sektor Industri “ dari target 6,1 sampai dengan 7% terealisasi 7,31% atau tercapai 119,84%, diatas rata-rata pertumbuhan agregat sektor perekonomian yang ada di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini menunjukan bahwa sektor industri merupakan salah satu akselerator pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Apabila dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :



Tabel 3.23
Industri Pengolahan Kabupaten Banjarnegara



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Pertumbuhan sektor industri mengalami percepatan di Tahun 2018. Pertumbuhan sector industry mencapai 7,31% lebih cepat 0,94% dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan yang baik ini didukung oleh sub sector industry makanan dan minuman, yang selama 5 (lima) tahun selalu tumbuh di atas sector industry pengolahan.

Perkembangan sektor ini memberi tanda bahwa perekonomian Banjarnegara mulai beralih ke agroindustri sesuai yang diharapkan di RPJPD Kabupaten Banjarnegara. Hasil analisis dari Badan Pusat Statistik terhadap hasil Sensus Ekonomi Tahun 2016 memperkuat pernyataan tersebut di atas. “Pada Tahun 2016, terdapat 66,48% dari total populasi usaha di sektor industri berupa agroindustri. Sementara dari sisi daya serap tenaga kerja, jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada agroindustri Kabupaten Banjarnegara mencapai 65,30% dari total tenaga kerja pada sektor industri.”

Hasil analisis Potensi Ekonomi Banjarnegara (BPS, 2017), menunjukkan bahwa:

1. Industri Pengolahan di Kabupaten Banjarnegara memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan wilayah referensinya (Provinsi Jawa Tengah) dari sisi jumlah usaha. Hal ini diuji menggunakan analisis Location Quotient (LQ) yaitu analisis digunakan untuk menunjukkan besarnya peranan sektor perekonomian suatu wilayah dengan membandingkan sektor yang sama pada wilayah yang lebih besar.
2. Industri Pengolahan di Kabupaten Banjarnegara memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata wilayah referensinya (Provinsi Jawa Tengah). Hal ini diuji menggunakan analisis shift share yang merupakan salah satu teknik untuk



menganalisis data statistik regional, seperti PDRB, tenaga kerja dan lain-lain untuk mengamati struktur perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif.

3. Industri Pengolahan di Kabupaten Banjarnegara memiliki potensi tingkat regional dan global. Hal ini diketahui melalui analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dimana metode ini dilakukan untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi potensial berdasarkan kriteria pertumbuhan PDRB (*competitive advantage*).

Tantangan ke depan bagi Kabupaten Banjarnegara adalah menjaga pertumbuhan sector ini. Sehingga sector ini dapat terus menyerap produksi sector primer dan memberi nilai tambah pada output yang dihasilkan.

Sasaran ini dicapai melalui 4 (empat) program yaitu Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi, Pengembangan Industri Kecil Menengah, Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri dan Pengembangan Sentra – Sentra Industri Potensial.

Sasaran 9 : Meningkatkan Kinerja Sektor Perdagangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu)indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

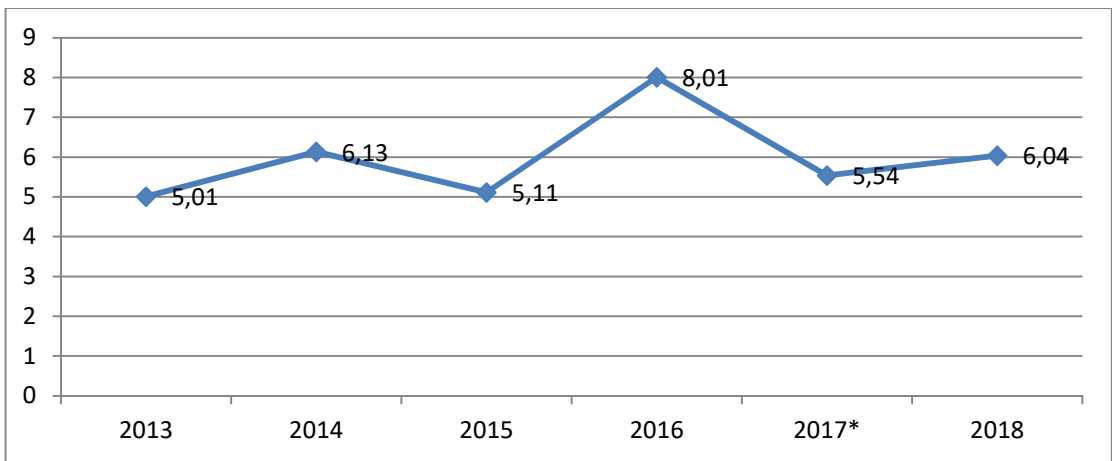
IndikatorKinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8	6,04	75,5	8,4	71,90	Sedang
Rata-rata Capaian				75,5		71,90	

Indikator Pertumbuhan sektor perdagangan dari target 8 s/d 9 tercapai 6,04% atau 75,5 % dari target yang telah ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.24
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Dilihat dari trennya pertumbuhan sektor perdagangan di dua tahun terakhir dari 8,01% di Tahun 2016 melambat ke 6,04% di Tahun 2018. Perlambatan disumbang dari sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor dimana pada tahun 2016 pertumbuhannya mencapai 8,98%, sedangkan di Tahun 2018 hanya 6,31%. Sebaliknya sub sektor Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya menunjukkan percepatan dari 4,87% (Tahun 2016) menjadi 5,11% (2018).

Melihat karakternya, sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor merupakan tempat dimana mayoritas UMK yang bergerak didalamnya (Hasil Pendataan Usaha/Perusahaan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor SE2016-Lanjutan, BPS 2019). Hipotesis sementara, membaiknya perekonomian di Kabupaten Banjarnegara menyebabkan masyarakat golongan menengah ke atas mengarahkan konsumsinya ke kebutuhan tersier (seperti mobil dan motor) dimana usaha tersebut terkelompokkan di sub sector Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya. Sub sector ini memiliki karakteristik volume perdagangan yang sedikit namun memiliki nilai yang tinggi. Sehingga meski peningkatan jumlah yang diperdagangkan sedikit akan berdampak pada kontribusi yang tinggi di PDRB.

Merujuk data yang dikeluarkan BPS, karakteristik usaha di sector industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah baru 6,96% usaha yang melakukan kemitraan. Artinya 93,04% adalah usaha tunggal. Tentunya hal ini bisa mengakibatkan inefisiensi perdagangan maupun lambatnya sebuah usaha untuk berkembang. Selain itu, data menunjukkan pemanfaatan computer oleh usaha di sector ini baru 3,77% (Jawa



Tengah). Di era digital saat ini tentunya menggantungkan usaha tanpa bantuan teknologi dapat mengakibatkan rendahnya ekspansi usaha yang ada.

Mengasumsikan hal yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah juga terjadi di Kabupaten Banjarnegara maka upaya yang bisa dilakukan kedepan adalah 1) mengembangkan jejaring kemitraan di sector ini; dan 2) mendorong pemanfaatan teknologi dalam mengembangkan usaha tersebut.

Sasaran ini dicapai melalui 5 (lima) program yaitu Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan, Peningkatan dan Pengembangan Ekspor, Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan, Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

Sasaran 10 : Meningkatkan Stabilitas Harga

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
1. Laju inflasi	%	3 ± 1	3,04	100	3±1	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100		100	

Kinerja sasaran yang ditargetkan dalam Tahun 2018 telah tercapai dengan rata-rata capaian sebesar 100%. Apabila dibandingkan dengan target akhir jangka menengah maka tercapai dengan rata-rata capaian 100%.

Laju inflasi menunjukkan perkembangan harga-harga komoditas secara umum. Pada Tahun 2018 Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara dari target 3±1 dapat terealisasi 3,04 atau tercapai 100%.

Hingga bulan Desember 2018, inflasi tahun kalender tercatat sebesar 3,04 %. Inflasi terbesar disumbang oleh kelompok komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau dan kelompok komoditas Sandang. Sedangkan kelompok komoditas Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar tercatat menjadi komoditas yang paling kecil memberikan andil dalam pembentukan inflasi di daerah (1,90%).

Komoditas Makanan Jadi, Minuman, Rokok, & Tembakau hingga Bulan Desember 2018 mengalami inflasi sebesar 4,24%, inflasi disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pada sub kelompok makanan jadi (6,36%), tembakau &



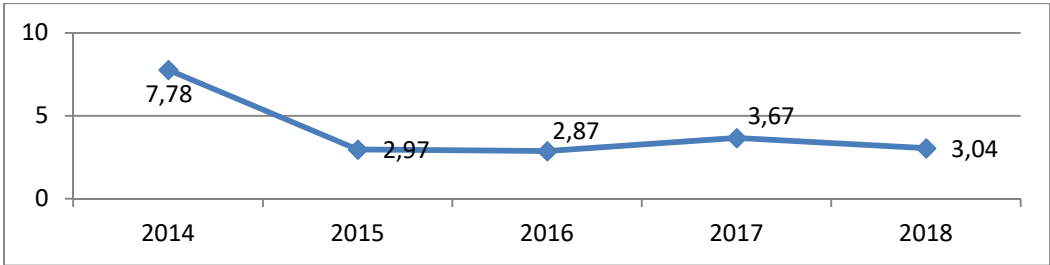
minuman beralkohol (2,24%), dan minuman tak beralkohol (1,38%). Sedangkan pada komoditas Sandang, inflasi khususnya disebabkan oleh naiknya harga beberapa komoditas pada sub kelompok barang pribadi & sandang lainnya (3,58%) dan sandang wanita (3,10%).

Pada Tahun 2018, beberapa komoditas juga mengalami deflasi. Beberapa komoditas yang mengalami deflasi adalah beberapa komoditas pada kelompok Bahan Makanan. Meski secara umum mengalami inflasi sebesar 3,04%, beberapa komoditas juga tercatat mengalami deflasi, khususnya pada sub kelompok lemak & minyak (-7,59%), telur, susu & hasilnya (-3,93%), dan ikan segar (-3,50%).

Perkembangan laju inflasi Kota Banjarnegara Tahun 2018 sebesar 3.04 persen. Secara umum penyebab terjadinya inflasi / deflasi adalah karena pengaruh musiman (panen raya, tahun ajaran baru / pendidikan, bulan ramadhan, hari raya), pengaruh distribusi (bencana alam, infrastruktur, keamanan politik, perubahan nilai tukar rupiah dan tingkat bunga, suhu politik / rumor, *abonormal profit* (perilaku pasar dengan menahan stock barang dan menaikkan harga, dan *administered prices* (kenaikan/penurunan bbm, tarif dasar listrik, tarif air minum, pelayanankesehatan dll).

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi capaian indikator kinerja diperoleh gambaran sebagai berikut :

Tabel 3. 25
Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



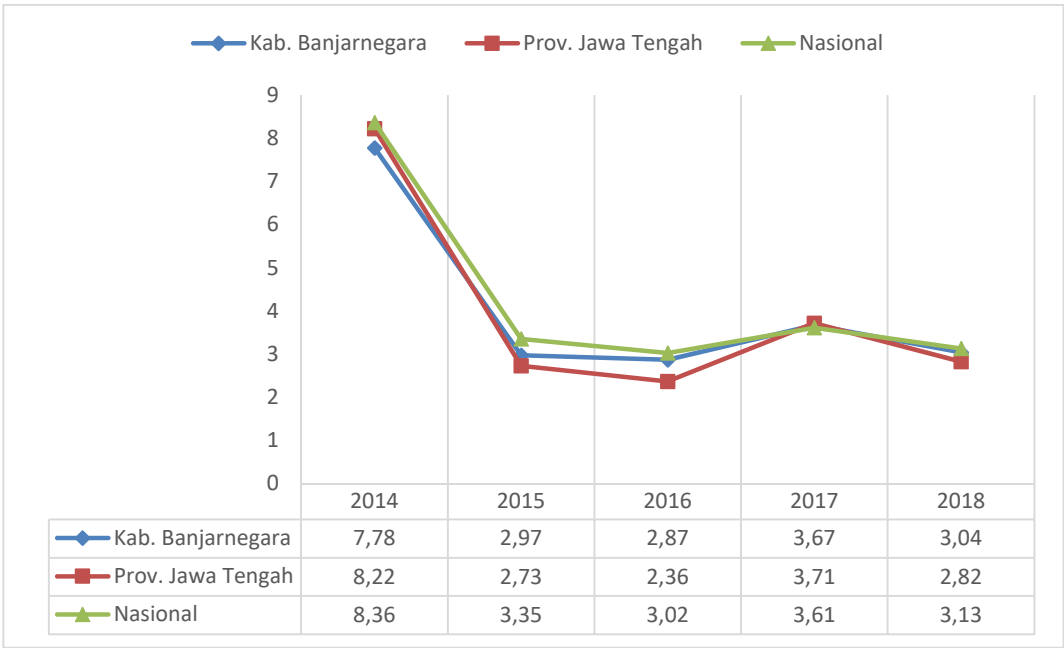
Sumber Data : BPS Kabupaten Banjarnegara

Selama tiga tahun terakhir, stabilitas harga cenderung fluktuatif dengan rata-rata inflasi kabupaten sebesar 3,19%. Inflasi bulanan secara umum berfluktuasi dengan faktor musim dan kekuatan tarikan permintaan sebagai pemicu utama.

Perkembangan laju inflasi kalender Kota Banjarnegara, Semarang dan Nasional mulai tahun 2014 sampai dengan 2018 terlihat pada tabel berikut :



Tabel 3.26
Inflasi Tingkat Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018



Sumber Data : BadanPusat Statistik

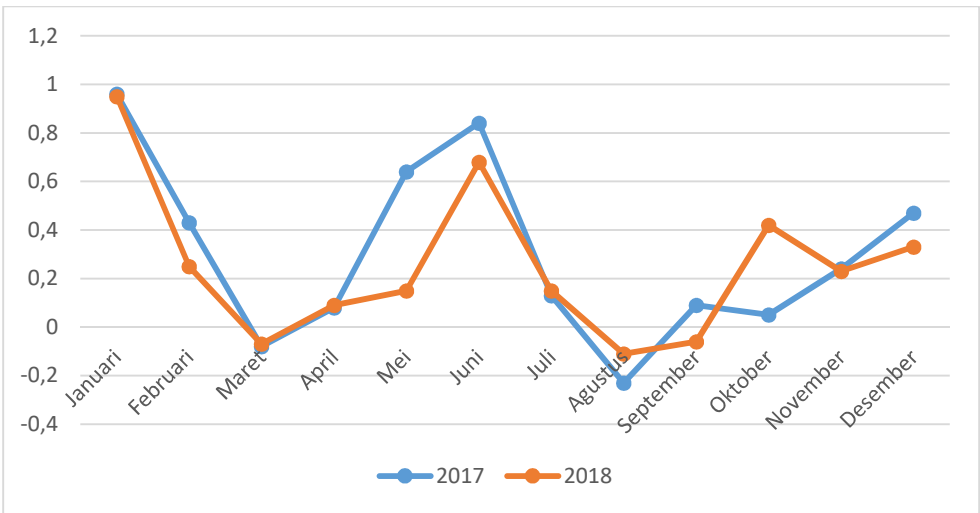
Selama Tahun 2018, laju inflasi kabupaten sebesar 3,04%. Angka ini menurun 0,63% bila dibandingkan angka inflasi pada Tahun 2017 yang sebesar 3,67%. Sepanjang Tahun 2018 kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau menjadi kelompok yang mengalami inflasi tertinggi (4,75%). Disusul kelompok sandang (3,10%) dan kelompok bahan makanan (2,97%).

Melihat pola inflasi bulanan terlihat pola yang serupa antara Tahun 2017 dan Tahun 2018. Hal ini membuktikan inflasi di Kabupaten Banjarnegara tergolong *cyclical* (berulang pada periode tertentu). Dimana inflasi tersebut disebabkan oleh tarikan permintaan beberapa kelompok barang yang terjadi menjelang hari raya keagamaan dan tahun baru.

Inflasi pada bulan Januari menjadi inflasi tertinggi dalam tahun ini dengan pemicunya antara lain kelompok bahan makanan; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau; dan kelompok perumahan. Deflasi terbesar terjadi pada bulan September dimana kelompok bahan makanan menjadi penyumbang terbesarnya, deflasi pada kelompok tersebut dapat mencapai 1,08%.



Tabel 3.27
Perkembangan Laju Inflasi Bulanan
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 dan 2018



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018

Sasaran 12:	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan
-------------	---

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

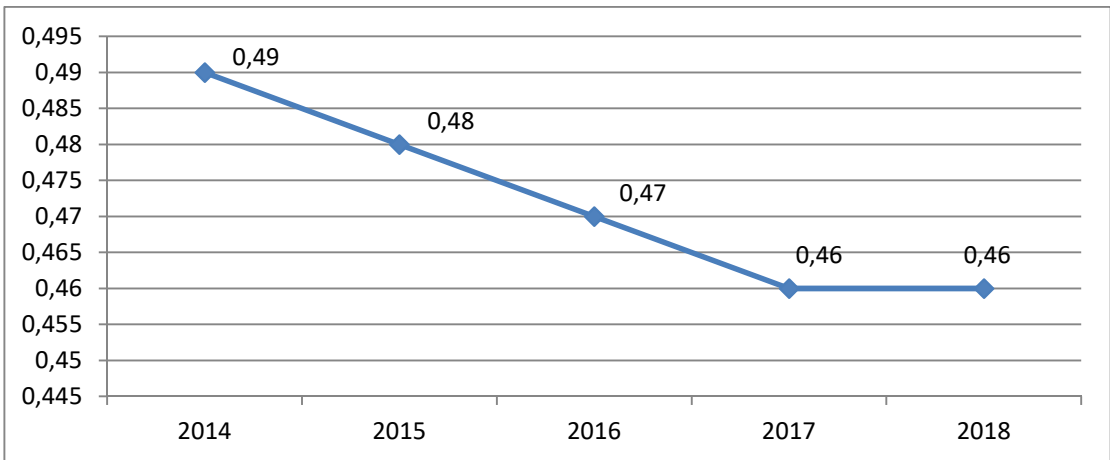
Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Williamson	Angka	0,47	0,46	102,13	0,43	93,02	Tinggi
Rata-rata Capaian				102,13		93,02	

Indeks williamson merupakan ukuran ketimpangan pendapatan antar daerah (kecamatan). Indeks Williamson akan menghasilkan angka indeks sama dengan nol yang yang menandakan tidak ada kesenjangan ekonomi antar kecamatan, sedangkan angka indeks yang lebih besar dari nol menunjukkan adanya kesenjangan antar kecamatan atau pertumbuhan ekonomi antar kecamatan tidak merata.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat digambarkan pada grafik sebagai berikut :



Tabel 3.28
Indeks Williamson
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data : Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil penghitungan indeks Williamson Tahun 2014-2018 dapat diasumsikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk antar wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara masuk dalam kategori sedang dan cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan penduduk antar wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara semakin mendekati kesetaraan.

Berdasarkan hasil penghitungan Indek Williamson Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018, di dapat nilai bahwa angka Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara berada pada posisi antara 0,463 sampai dengan 0,575 . Indek Williamson ini mempunyai maksud bahwa, ada ketimpangan pendapatan penduduk antar wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dan dikategorikan sebagai ketimpangan sedang. Dari tabel tersebut juga terlihat antara Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018 ada kecenderungan mengalami penurunan kesenjangan tingkat pendapatan penduduk antar Kecamatan. Walaupun dengan kondisi ketimpangan yang berkategori sedang, akan tetapi data Indeks Williamson menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik hal ini terlihat dengan semakin kecilnya angka Indeks Williamson dari Tahun 2013 ke Tahun 2017, atau dengan kata lain pendapatan penduduk antar wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara semakin mendekati kesetaraan. Dengan memperhatikan kondisi Pendapatan Penduduk berdasarkan nilai dari Indeks Williamson selama Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2017, memberikan indikasi bahwa masih perlu ditingkatkan inovasi dalam mengelola kekayaan karakteristik di tiap wilayah, sehingga dapat dioptimalkan untuk sebesar-besar kemakmuran penduduk.



Sasaran 13 :

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang meliputi Kualitas Udara, Kualitas Air Sungai, dan Tutupan Lahan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,5	70,07	103,8	69,25	101,18	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				103,8		101,18	

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 67,5% dapat terealisasi sebesar 70,07% atau tercapai 103,8% dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai sebesar 101,18%. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 memiliki angka sebesar 70,07. Hal ini menunjukkan bahwa status lingkungan hidup Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2018 berada dalam kondisi Cukup.

Penghitungan IKLH dengan menggunakan tiga parameter meliputi Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Tutupan Lahan.

Indek Kualitas Air dengan capaian 58,62 meningkat sebesar 2,29 bila dibandingkan dengan Tahun 2017 yaitu sebesar 56,33. Hal ini disebabkan tingginya intensitas hujan pada Tahun 2018 yang menyebabkan pengenceran parameter pencemar dan meningkatnya kesadaran pengusaha untuk berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan sehingga indeks kualitas air menjadi semakin tinggi.

Indek Kualitas Udara capaian 88,07 menurun sebesar 1,77% bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2017 yaitu sebesar 89,84. Untuk mengukur indeks kualitas udara dilaksanakan pemantauan pada beberapa titik keramaian seperti lalu lintas, perumahan, kawasan industri dan pasar. Dari empat titik yang dipantau tersebut yang paling tinggi dalam memperngaruhi turunnya indeks kualitas udara adalah SO2 dan NO2. Hal ini disebabkan karena meningkatnya gas yang dihasilkan dari buangan kendaraan yang lewat atau meningkatnya transportasi di Kabupaten Banjarnegara.

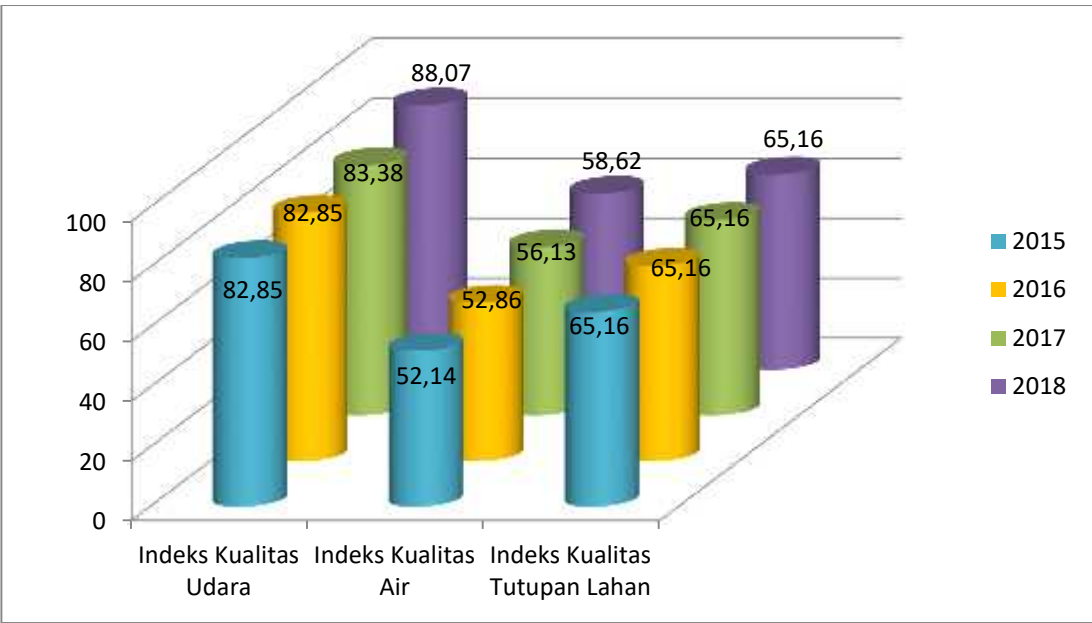
Indek Tutupan Lahan capaian 65,16 tidak berubah bila dibandingkan dengan Tahun 2017 dikarenakan tidak adanya tambahan ruang terbuka hijau dan hutan.

Indek Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banjarnegara masuk kategori cukup karena kualitas air, udara dan tutupan lahan interval nilai 66 – 74.



Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.29
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 - 2018

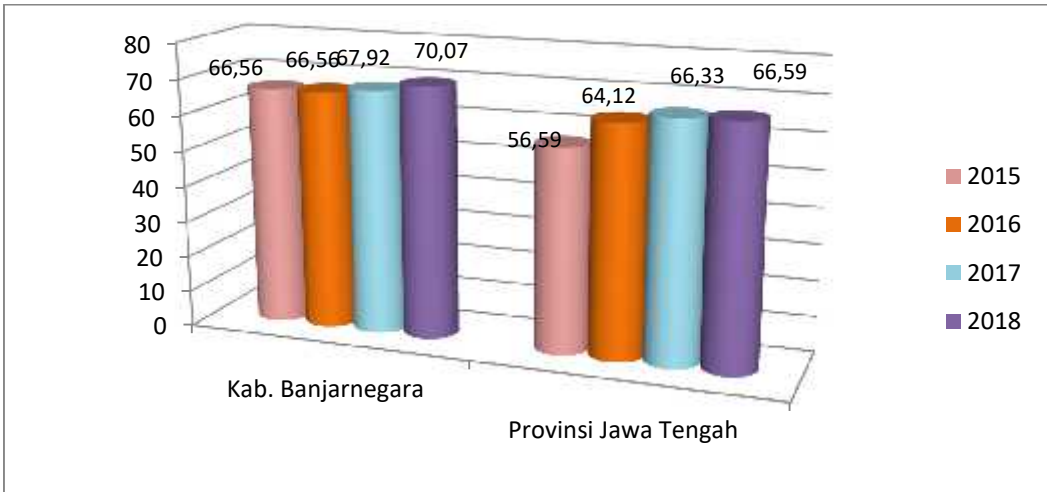


Sumber Data : DLH Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat.

Apabila dibandingkan dengan capaian di tingkat provinsi Indeks Kualitas Lingkungan dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel 3.30
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015-2018



Sumber Data : DLH Kabupaten Banjarnegara



Permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang pengelolaan sampah sehingga mempengaruhi kualitas air;
2. Menurunnya kualitas udara terutama akibat pertambahan industri dan sarana transportasi kendaraan bermotor, dan aktivitas manusia seperti pembakaran sampah, asap rokok, dan kegiatan rumah tangga lainnya;
3. Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu daerah rawan bencana alam tanah longsor.

Solusi pemecahan masalah :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan system 3 R;
2. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
3. Pemantauan dan pembinaan terhadap masyarakat serta pelaku industri tentang pengelolaan limbah;
4. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan terhadap generasi muda dan seluruh masyarakat untuk lebih peduli dan berbudaya lingkungan;
5. Pembinaan pada masyarakat yang berorientasi pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
6. Penanaman tanaman penahan tanah pada daerah rawan bencana dan daerah terdampak bencana di luar kawasan hutan;
7. Penanaman tanaman disekitar sumber mata air yang berfungsi untuk menjaga kualitas air.

Keberhasilan pencapaian target sasaran indikator kinerja pada tahun 2018 didukung oleh 4 program yaitu Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam, Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1(satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP*	100	WTP	100	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				100		100	

*Capaian Tahun 2017

Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah salah satu indikatornya dapat dilihat dari hasil penilaian atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak eksternal yang dalam hal ini dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penilaian oleh lembaga eksternal ini menjadi komponen penting untuk mengukur sejauh mana akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah terutama dari aspek pengelolaan keuangan.



Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik setiap tahunnya ini mencakup pemeriksaan terhadap neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Opini yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat terdiri dari Tidak Wajar (TW), Tidak Memberi Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, realisasi capaian indikator opini WTP adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian 2017	Capaian 2018
1.	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP*

Realisasi atas target kinerja yang ditetapkan selama empat tahun berturut turut tercapai sesuai yang diharapkan, Tahun 2014 atas audit LKD Tahun 2013, Tahun



2015 atas audit LKD Tahun 2014, Tahun 2016 atas audit LKD Tahun 2015, dan Tahun 2017 atas audit LKD Tahun 2016. Adapun audit LKD Tahun 2018 atas audit LKD Tahun 2017 sampai dengan laporan ini disusun masih dalam proses pelaksanaan audit pendahuluan dan akan dilanjutkan sampai dengan bulan April sehingga capaian yang disajikan menggunakan data tahun sebelumnya dan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara optimis dapat memperahankan opini WTP.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan laporan keuangan dalam rangka mempertahankan opini WTP adalah sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan pengelolaan keuangan secara online;
2. Melaksanakan pencatatan barang milik daerah dengan baasis online;
3. Indeks satuan harga dapat diakses melalui media online;
4. Secara bertahap diimplementasikan transaksi non tunai;
5. Sedang direncanakan pengintegrasian antara perencanaan dan sistem pengelolaan keuangan.

Walaupun Pemerintah kabupaten banjarnegara berhasil mempertahankan Opini WTP selama 4 (empat) tahun berturut-turut, namun masih ada kendala antara lain :

1. Belum optimalnya penyajian laporan keuangan daerah yang tertib dan akuntabel.
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya laporan yang cepat, tepat dan akurat.
3. Masih adanya ketidak jelasan keterangan / dokumen yang mendukung aliran dana masuk ke Kas Umum Daerah.
4. Masih dibutuhkannya peningkatan kemampuan / pengetahuan / keahlian dari Sumber Daya Manusia dalam menjalankan fungsi akuntansi / penyusunan Laporan Keuangan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan kegiatan inventarisasi serta pencatatan terhadap aset-aset yang ada.
2. Mengoptimalkan Sistim Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMDA Barang), Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) melalui Peningkatan Kapasitas dan Kemampuan Sumber Daya Manusia di semua Perangkat Daerah.
3. Meningkatkan koordinasi atau melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan APBD baik dalam hal penerimaan maupun pengeluaran.
4. Meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan melalui bintek/diklat.



Untuk mendukung capaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah didukung dengan program :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
3. Program Optimalisasi Pemanfaatan teknologi.

Sasaran 2 : Meningkatkan Kemandirian Daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,02	11,37	126,05	9,48	119,94	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				126,05		119,94	

Kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan besar kecilnya pendapatan asli daerah dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (bantuan pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman). Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah dan semakin rendah rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin tinggi.

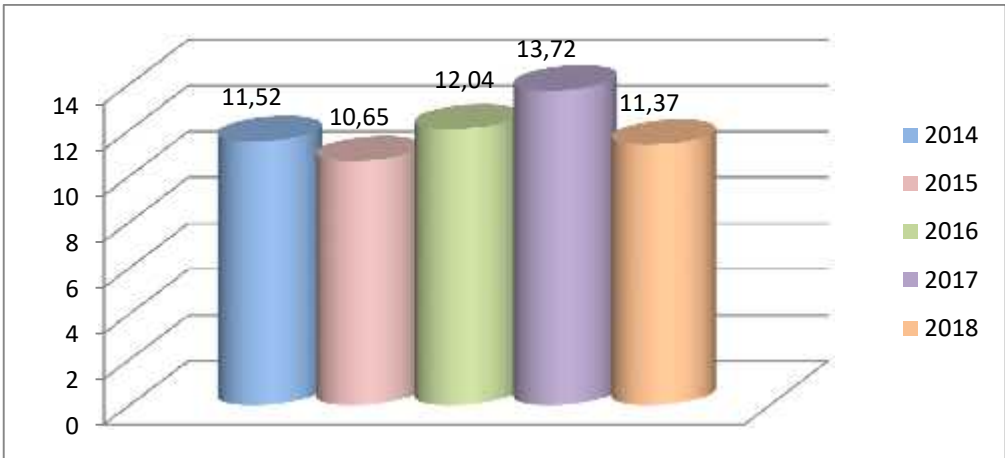
Tahun 2018 rasio kemandirian keuangan Kabupaten Banjarnegara dari target 9,02% terealisasi 11,37% atau tercapai 126,05%.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai 119,94%.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dapat digambarkan sebagai berikut :



Tabel 3.31
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2014-2018



Sumber Data : BPPKAD Kabupaten Banjarnegara

Dilihat trend selama lima tahun cenderung fluktuatif. Penurunan kemandirian keuangan daerah pada Tahun 2018 dipengaruhi oleh adanya penurunan pendapatan pada sektor lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada pos pendapatan dana BOS, dikarenakan pada Tahun 2018 sesuai dengan petunjuk teknis penganggaran penyaluran dana bos bukan melalui kelompok belanja pendapatan asli daerah tetapi melalui kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah jenis belanja pendapatan hibah

Peningkatan rasio kemandirian keuangan terus diupayakan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sasaran ini dicapai melalui satu program yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, dapat dijelaskan sebagai berikut :



Sasaran 1 : Meningkatkan Ketahanan Pangan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan satu indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	> 90	85,9	95,44	>95	90,42	Tinggi
Rata-rata Capaian				95,44		90,42	

Mendasari Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan, diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang dengan indikator Pola Pangan Harapan.

Mengacu pada standar pola pangan harapan, pangan yang dikonsumsi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) kelompok pangan meliputi : Padi-padian, Umbi umbian, Pangan hewani, Minyak dan lemak, Buah/biji berminyak, Kacang-kacangan, Gula, Sayur dan buah, dan kelompok lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman seperti terasi, cengkeh, ketumabr, mrica, pala, asam, bumbu masak, teh dan kopi.).

Menghitung total Score Pola Pangan Harapan adalah jumlah dari 9 (sembilan) kelompok pangan, yaitu jumlah dari kelompok padi-padian sampai kelompok lain-lain tersebut di atas.

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah jenis dan jumlah kelompok pangan utama yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi berdasarkan kontribusi zat gizi energi masing-masing kelompok pangan (Permenkes No 75 Tahun, 2013). Kebutuhan ideal masing-masing jenis makanan yang harus dikonsumsi per-orang/hari menurut Widya Karya Pangan dan Gizi Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

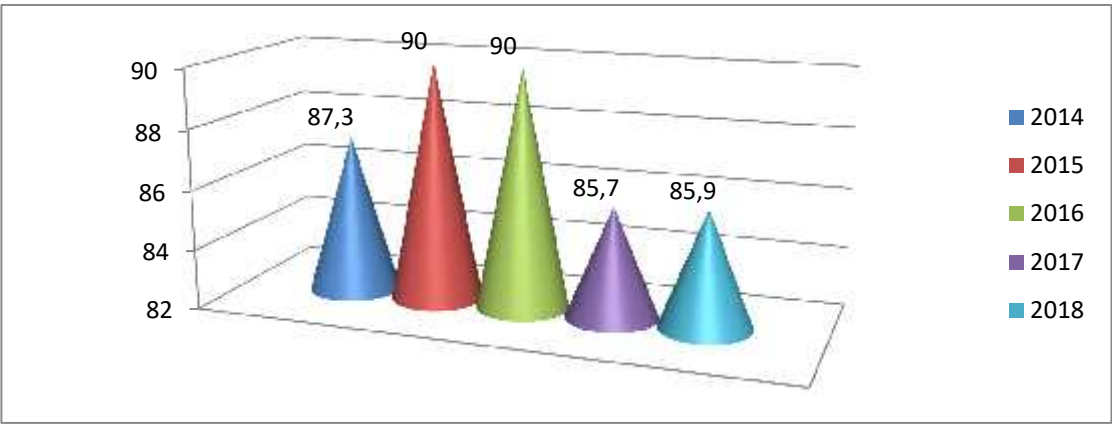


No	Jenis makanan	Kebutuhan (kilo kalori)	%	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	1075	50	0,5	25
2	Umbi-umbian	129	6	0,5	2,5
3	Pangan hewani	258	12	2	24
4	Minyak dan lemak	215	10	0.5	5
5	Buah biji berminyak	64	3	0,5	1
6	Kacang-kacangan	108	5	2,0	10
7	Gula	108	5	0,5	2,5
8	Sayur dan buah	129	6	5,0	30
9	Lain-lain	64	3	0,0	0
TOTAL		2150	100		100

Data di atas menunjukkan bahwa skor PPH ideal yang dianjurkan sebesar 100% (WNPNG, 2012). Hasil survei konsumsi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018 terhadap 600 responden (keluarga) di 20 Kecamatan menunjukkan bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) masyarakat Banjarnegara pada Tahun 2017 baru mencapai 85,9%. Angka ini masih kurang dari target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2018 yaitu sebesar 90%.

Apabila dibandingkan dengan tahun- tahun sebelumnya menunjukkan bahwa trend pencapaian skor PPH dari Tahun 2014 – 2018 cenderung meningkat akan tetapi pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 mengalami penurunan dari 90% (Tahun 2016) menjadi 85,7% (Tahun 2017) dan 85,9% (Tahun 2018). Perbandingannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.32
Skor Pola Pangan Harapan Tahun 2014-2018



Sumber Data : DKP Kabupaten Banjarnegara



Hasil survei konsumsi masyarakat Banjarnegara menunjukkan bahwa belum tercapainya skor PPH (85,9%) masyarakat Banjarnegara dari target RPJMD yang telah ditetapkan Tahun 2019 (90%) disebabkan oleh :

1. Pola Konsumsi masyarakat masih belum beragam dan bergizi seimbang;
Hasil survei konsumsi menunjukkan bahwa jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Banjarnegara masih didominasi oleh jenis padi-padian (43,4%);
2. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang penyusunan menu beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA);
3. Tingkat sosial ekonomi masyarakat yang masih kurang sehingga menyebabkan ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga kurang.
4. Pemanfaatan pekarangan untuk mencukupi kebutuhan pangan dan gizi keluarga belum optimal;
5. Pengembangan pangan lokal belum optimal sehingga masyarakat masih mengandalkan beras sebagai sumber karbohidrat utama.

Indikator kinerja sasaran (peningkatan skor PPH) baru tercapai 85,9%. Sasaran ini dicapai melalui 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan).

Capaian kinerja PPH Banjarnegara pada Tahun 2018 masih dibawah target RPJMD Kabupaten, dan apabila dibandingkan dengan capaian skor PPH Provinsi Jawa Tengah maka PPH Kabupaten Banjarnegara lebih rendah 2,7% (PPH Provinsi Jawa Tengah 87,3%).

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan skor PPH masyarakat Banjarnegara adalah :

1. Meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi tentang pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) dengan melibatkan lintas sektor terkait terutama Dinas Kesehatan, Disdikpora, TPPKK dan Organisasi Masyarakat.
2. Meningkatkan diversifikasi pangan dengan cara pengembangan pangan lokal
3. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan melalui kawasan rumah pangan lestari
4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
5. Menyusun kebijakan yang mendukung ketahanan pangan
6. Perkuat kerjasama yang efektif dengan melibatkan seluruh stakeholder dalam rangka meningkatkan kemandirian bidang pangan dan gizi.



Sasaran 2 : Meningkatkan cakupan rumah layak huni

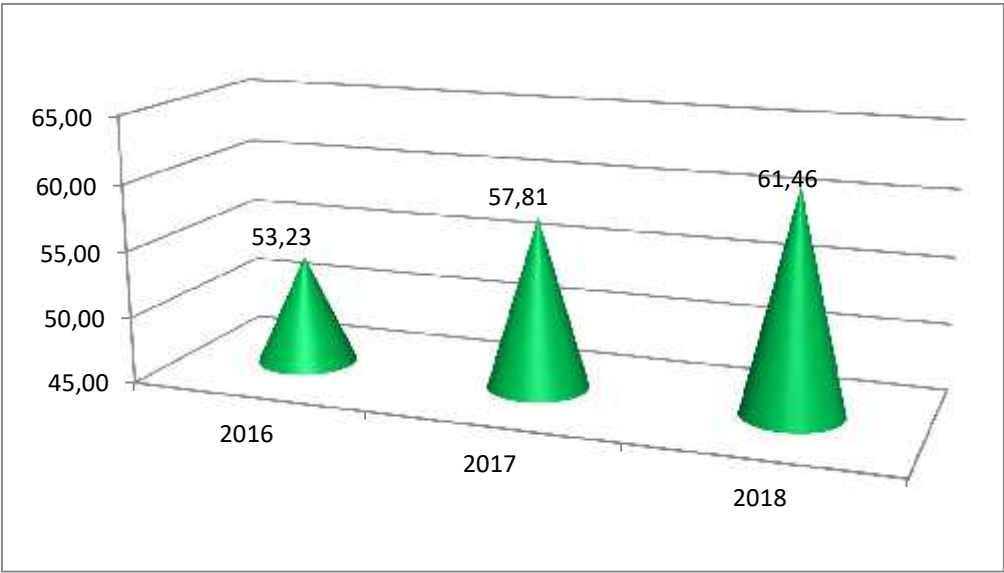
Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Presentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	83 ± 1	61,46	74,05	90	68,29	Sedang
Rata-rata Capaian				74,05		68,29	

Berdasarkan tabel diatas realisasi indikator kinerja persentase MBR yang menghuni rumah layak huni belum tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Dari target 83 ± 1% terealisasi 61,46% atau tercapai sebesar 74,05%. Dan apabila dibandingkan dengan target jangka menengah maka pada Tahun 2018 sudah tercapai 68,29%. Dari sejumlah 106.197 MBR sampai dengan Tahun 2018 yang sudah menghuni rumah layak huni sejumlah 65.270 MBR.

Apabila dibandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3. 33
Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni



Sumber Data : DPKP Kabupaten Banjarnegara

Secara kuantitatif, terdapat kecenderungan (trend) meningkat dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2016 dari 53.276 meningkat 3.255 RLH menjadi 56.531 RLH,



Tahun 2017 meningkat 4.858 menjadi 61.389 RLH, Tahun 2018 meningkat 3.881 menjadi 65.270 RLH.

Peningkatan capaian MBR yang menghuni RLH didukung oleh anggaran yang bersumber dari DAK, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBDesa maupun anggaran CSR (Corporate Social Responsibility) dari Perusahaan, Perbankan, Baznas, ASN, Komunitas dan Perorangan.

Realisasi Pelaksanaan RTLH di Kabupaten Banjarnegara
Dari Berbagai Sumber Anggaran Tahun 2018

NO	SUMBER DANA	REALISASI
1	ABBD KABUPATEN	944
2	APBD PROVINSI	774
3	DANA ALOKASI KHUSUS	330
4	APBN (BSPS)	-
5	APBDesa	1.758
6	CSR	75
	Jumlah Total	3.881

Sumber data : DPKP Kabupaten Banjarnegara

Indikator kinerja ini dicapai melalui 5 (lima) program, yaitu: Program Pengembangan Perumahan, Program Pemmberdayaan Komunitas Perumahan, Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam, Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dan Program penatan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Sasaran 3 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 2(dua) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,35	6,27*)	98,74	6,65 s/d 6,72	94,29	Sangat Tinggi
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,5 ± 0,2	11,41*)	100	11,9±0,2	95,88	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				98,37		95,09	

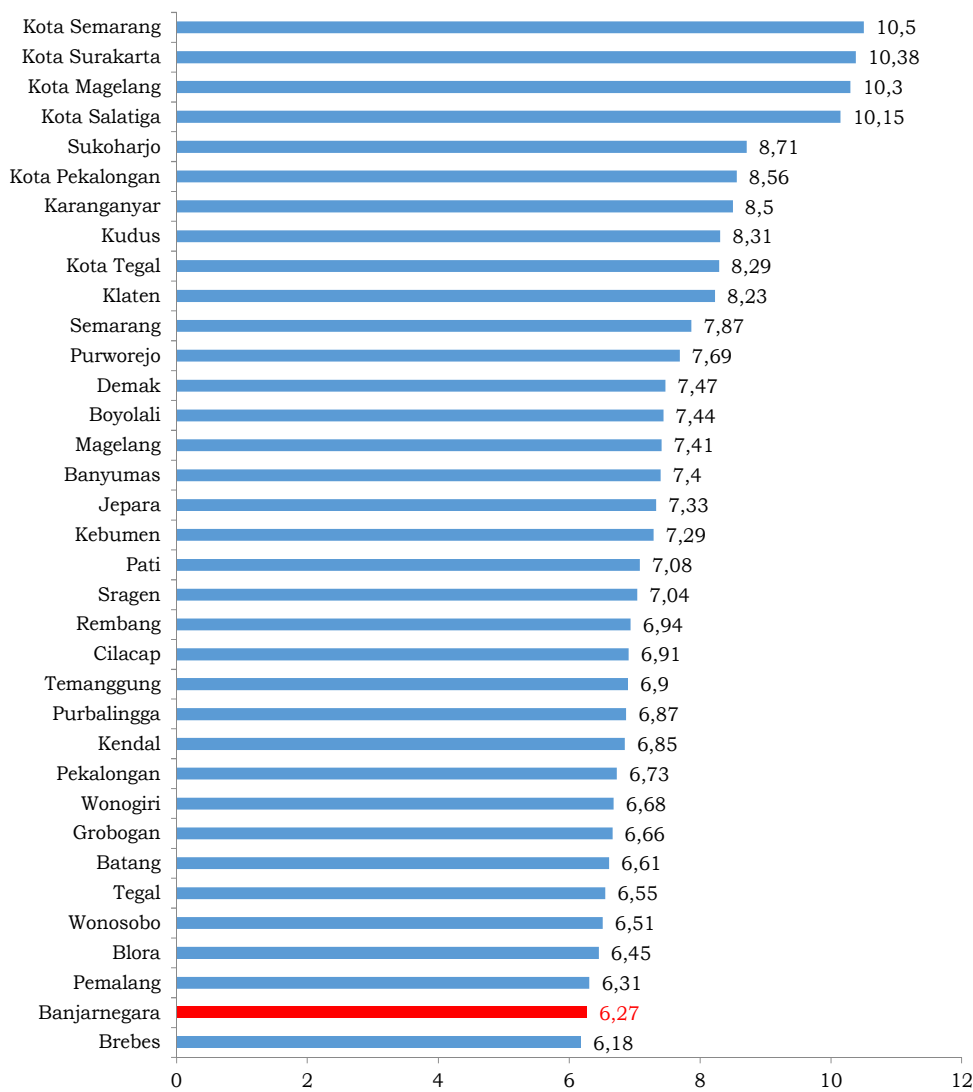
*Angka Sementara



Angka rata-rata lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah formal yang ditempuh penduduk pada rentang usia >25 tahun. Sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 RLS Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan dengan angka masing-masing 5,9 (2014); 6,17 (2015); 6,26 (2016) dan 6,27 (2017). Dari data tersebut dapat digambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Banjarnegara baru bisa mengenyam pendidikan setara dengan jenjang SMP semester pertama. Adapun Tahun 2018 ditargetkan dapat meningkat sebesar 6,35 s.d 6,42.

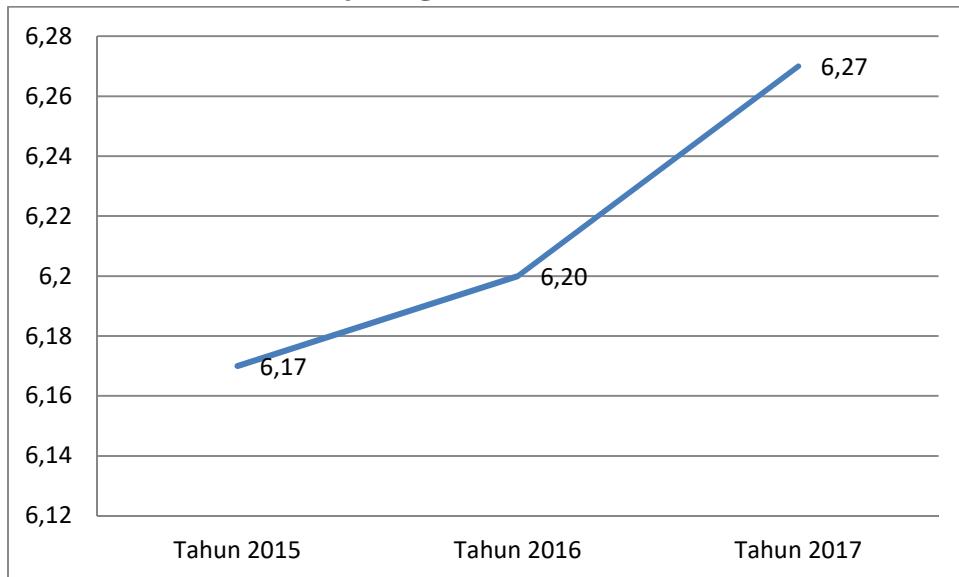
Apabila dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara menempati posisi ke 34 dari 35 Kabupaten/Kota pada ketercapaian indikator RLS di atas Kabupaten Brebes seperti terlihat pada grafik di bawah ini.

Tabel 3.34
Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Banjarnegara

Tabel 3.35
Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2017



Sumber : BPS Kab. Banjarnegara

Masih rendahnya RLS di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan.
- 2) Keterbatasan kemampuan ekonomi atau faktor kemiskinan yang menyebabkan masyarakat lebih mementingkan bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dibandingkan dengan sekolah.
- 3) Adanya budaya pada sebagian masyarakat yang menanggap anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi, sehingga menikah pada usia dini.



Dalam rangka mendukung ketercapaian RLS di Kabupaten Banjarnegara, kebutuhan fasilitas pendidikan formal secara bertahap tiap tahunnya telah dipenuhi. Di samping itu, berbagai program pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Banjarnegara turut berperan dalam

meningkatkan kesadaran generasi penerus terutama anak-anak untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Program Bantuan Operasional Siswa (BOS) dirasakan



sangat membantu siswa dalam hal pembiayaan pendidikan utamanya pendidikan formal, karena dengan adanya program tersebut siswa terutama dari sekolah negeri dibebaskan dari biaya bulanan sekolah. Disamping itu, Program Indonesia Pintar (PIP) yang juga merupakan program pemerintah secara nasional juga telah berperan dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikannya terutama pada pendidikan formal sehingga dapat terhindar dari putus sekolah. Sasaran PIP ditujukan untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam menunjang kegiatan sekolah antara lain untuk pembelian seragam sekolah, sepatu sekolah dan biaya transportasi sekolah.

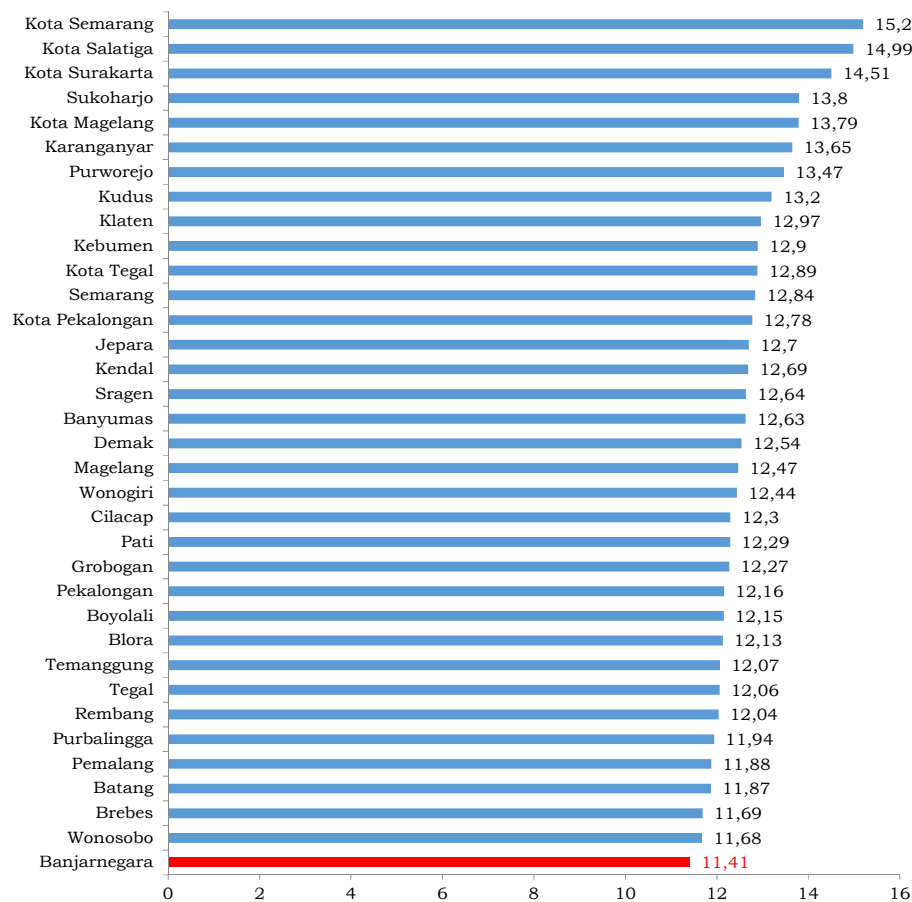
Upaya-upaya saat ini dalam rangka meningkatkan RLS akan dapat dirasakan 10 tahun yang akan datang dengan asumsi peserta didik yang pada saat ini usia 15 tahun (jenjang SMP) akan berpengaruh terhadap Angka Rata-rata Lama Sekolah pada saat mereka berusia 25 tahun (2028). Adapun terhadap penduduk usia di atas 25 tahun, Pemerintah Kabupaten mengalami kendala dalam melakukan intervensi kebijakan karena berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten hanya memiliki kewenangan pada urusan Pendidikan Dasar (Jenjang SD dan SMP) dimana batasan usia adalah 7-15 Tahun.

Angka harapan lama sekolah (HLS) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun ke atas) dimasa mendatang. Intervensi kebijakan pembangunan pendidikan pada sekarang ini akan dapat berpengaruh pada angka capaian HLS. Hasil dari capaian tersebut dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Sejak Tahun 2014 HLS penduduk Kabupaten Banjarnegara mengalami perkembangan yang cukup baik dari 10,7 meningkat menjadi 11,39 (2015); 11,4 (2016); 11,41 (2017) dan diharapkan mencapai 11,7 di tahun 2018. Realisasi HLS pada tahun 2017 sebesar 11,41 dapat diasumsikan bahwa penduduk Banjarnegara diharapkan dapat mengenyam pendidikan setara pada jenjang sekolah menengah (SMA/SMK) kelas 2.

Apabila dibandingkan dengan capaian Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Tengah, Kabupaten Banjarnegara menempati posisi terendah pada ketercapaian indikator HLS seperti terlihat dari grafik 10.



Tabel 3. 36
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017



Sumber : BPS Kab. Banjarnegara

Masih rendahnya HLS di Kabupaten Banjarnegara dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

- 1) Belum meratanya jumlah layanan pendidikan jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK).
- 2) Biaya operasional siswa yang relatif tinggi (transport menuju ke sekolah) sebagai imbas belum terpenuhinya jumlah layanan pendidikan menengah.

Strategi yang dapat ditempuh dalam meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Banjarnegara antara lain adalah :

- 1) Model pendidikan berbasis masyarakat dengan berbagai pendekatan antara lain pendekatan kewilayahan, potensi lokal serta nilai budaya dan tradisi melalui program kesetaraan yang diselenggarakan oleh lembaga non formal/PKBM.
- 2) Menjamin operasional pendidikan terhadap siswa rawan putus sekolah dalam bentuk beasiswa.
- 3) Pemenuhan daya tampung siswa khususnya jenjang pendidikan menengah melalui pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru (RKB).



Sasaran 4 : Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Angka usia harapan hidup	Tahun	73,80	73,79*	99,9	74,08	99,6	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian							

*Data Capaian tahun 2017

Usia Harapan Hidup adalah Rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Dalam perumusannya idealnya usia harapan hidup dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Spesific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun – tahun.

Usia Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

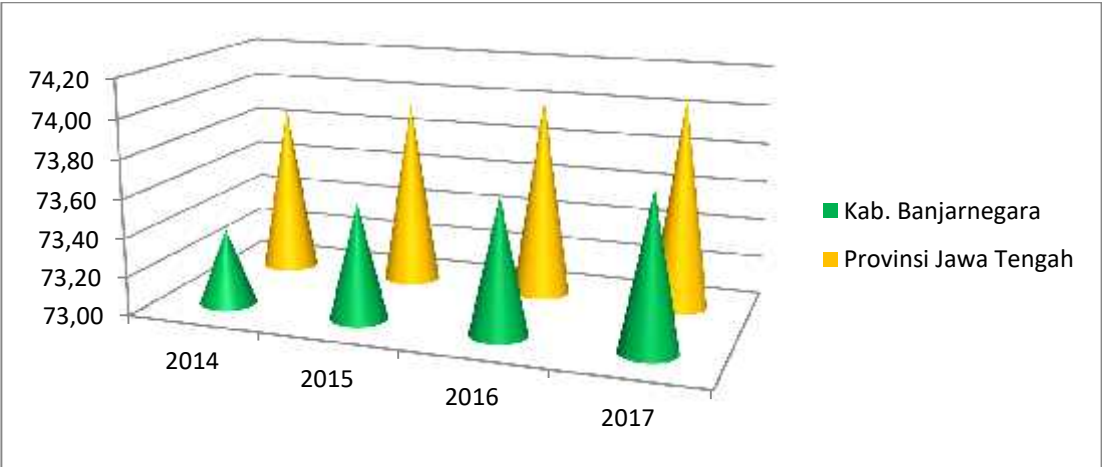
Usia Harapan Hidup manusia di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 masih menggunakan angka Usia Harapan Hidup Tahun 2017 dikarenakan data belum rilis dari Badan Pusat Statistik. Dari target Usia Harapan Hidup masyarakat Banjarnegara pada Tahun 2018 selama 73,80 tahun dapat terealisasi 73,79 tahun dari atau tercapai 99,9%. Dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai dengan rata-rata 99,6%.

Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 mengalami peningkatan yaitu 73,79 dari Tahun 2014 yaitu sebesar 73,39 , pada Tahun 2015 sebesar 73,59 dan pada Tahun 2016 sebesar 73,69. Jika dibandingkan pada capaian Usia Harapan Hidup di Tingkat Provinsi Jawa Tengah maka Kabupaten Banjarnegara menduduki urutan ke-25. Pada Tahun 2014 Usia Harapan Hidup di Provinsi Jawa Tengah sebesar 73,88, pada Tahun 2015 sebesar 73,96, dan pada Tahun 2016 sebesar 74,02 pada Tahun 2017 meningkat menjadi 74,08.



Sedangkan capaian usia harapan hidup tingkat Nasional pada Tahun 2014 sebesar 68,89, pada Tahun 2015 sebesar 69,07 dan pada Tahun 2016 sebesar 70,9 dan pada Tahun 2017 menjadi 71,06. Berdasarkan data capaian usia harapan hidup di atas dapat disimpulkan bahwa indikator capaian usia harapan hidup dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Tabel 3. 37
Angka Usia Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017



Sumbe Datar : BPS Kabupaten Banjarnegara

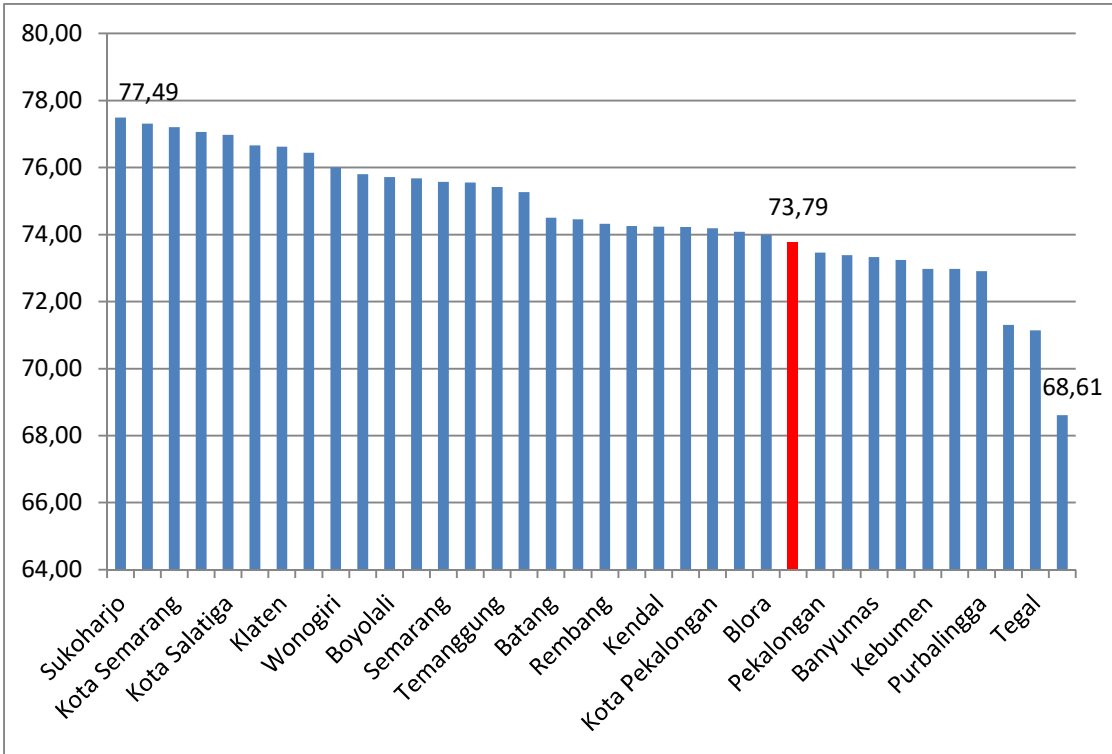
Faktor yang mempengaruhi pencapaian Usia Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara, yaitu melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar, dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari upaya dalam menurunnya Angka kematian ibu dan kematian bayi, peningkatan status gizi masyarakat, upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit menular dan tidak menular, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat, meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui pelaksanaan akreditasi FKTP, upaya dalam jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat miskin baik di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat dasar maupun rujukan, serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia.

Program yang dilaksanakan guna mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan dengan indikator Usia Harapan Hidup, yaitu program upaya kesehatan masyarakat, program pencegahan dan pengendalian penyakit dan program peningkatan pelayanan dan sumber daya kesehatan

Berikut ini disajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



Tabel 3.38
Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017



Sumber Data : BPS Provinsi Jawa Tengah

Sasaran 5 : Meningkatkan jumlah penduduk di atas garis kemiskinan

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase penduduk miskin	%	17	15,46	109,06	14,6	94,44	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian				109,06		94,44	

Sumber Data : Baperlitbang dan Dinsos Kabupaten Banjarnegara

Angka Kemiskinan, pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 17 s/d 16,5 persen dan terealisasi sebesar 15,46 persen atau tercapai sebesar 109,06%. Dibandingkan dengan Tahun 2017 angka kemiskinan menurun sejumlah 1,75% atau sejumlah 15.110. Pada Tahun 2017 tercatat penduduk miskin sejumlah 156.830 jiwa, pada Tahun 2018 menurun menjadi 141.720 jiwa.

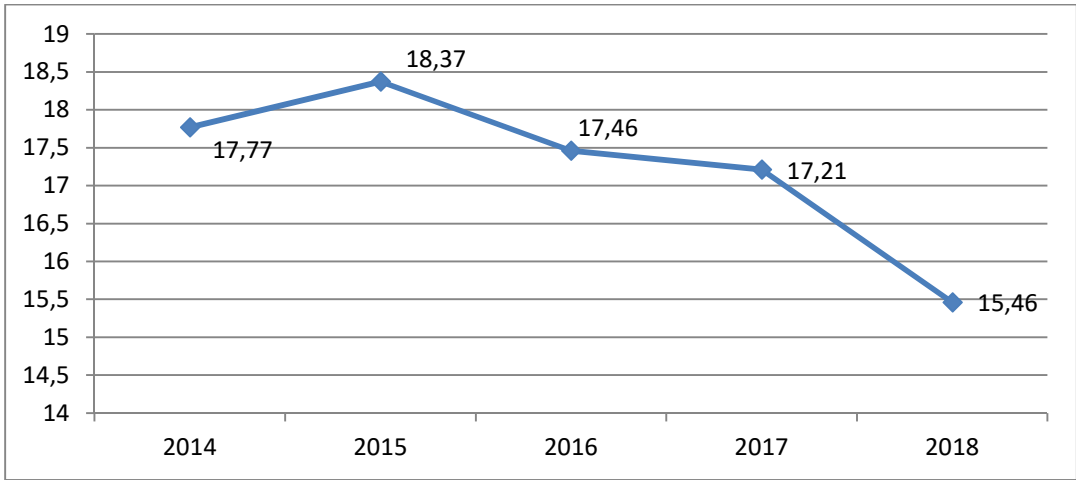


Perkembangan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara selama lima tahun terakhir (2013-2017) menurun sekitar 1,50%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kumulatif upaya penanggulangan kemiskinan dalam periode tersebut berjalan efektif. Penurunan angka kemiskinan dari Tahun 2015 – 2017 sebesar 1,16% belum bisa mencapai target secara kuantitatif tetapi tren penurunan tingkat kemiskinan sudah *on the track* dan angka tersebut lebih tinggi dari penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah dalam periode yang sama (0,57%).

Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017. Pada Tahun 2014 sebesar 17,77, Tahun 2015 sebesar 18,37 %, Tahun 2016 sebesar 17,46 % dan pada Tahun 2017 mencapai 17,21 %.

Dilihat dari perkembangannya, angka kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan. Capaian Tahun 2014 – 2018 menunjukkan tren penurunan meskipun di Tahun 2015 naik karena adanya kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 0,6%, namun di Tahun 2016 hingga tahun 2018 tren menurun. Dalam kurun waktu 6 tahun angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara menurun rata-rata sebesar 0,54 /tahun. Penurunan ini seiring dengan penurunan rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,28% pada tahun yang sama. Terlihat bahwa selama 5 tahun terakhir angka kemiskinan mengalami penurunan dengan perlambatan.

Tabel 3.39
Pesentase Penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data :BPS Kabupaten Banjarnegara

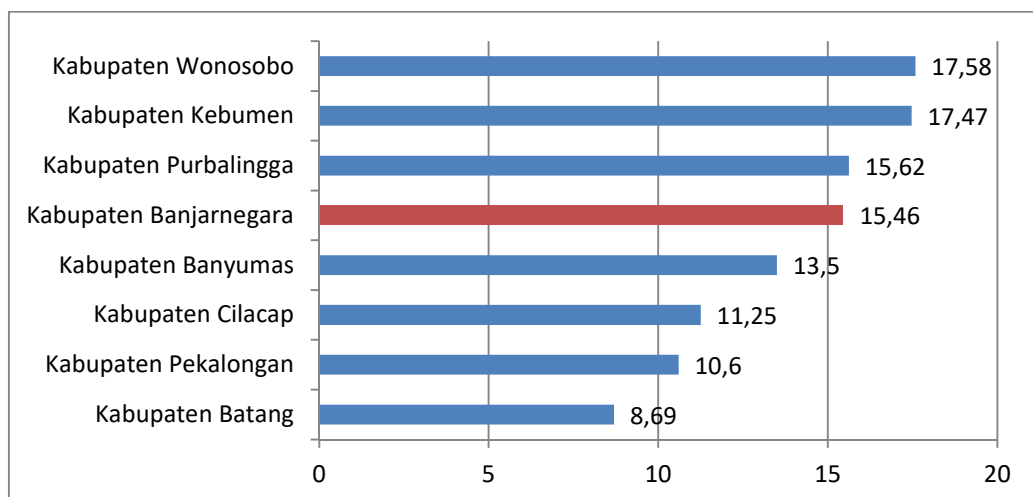
Dalam provinsi Jawa Tengah, kemiskinan Banjarnegara Tahun 2018 berada di ranking 30, atau turun satu peringkat dari Tahun 2017. Artinya ada daerah yang percepatan penurunan angka kemiskinannya lebih tinggi dari Banjarnegara. Daerah yang berhasil melampaui capaian Kabupaten Banjarnegara adalah Kabupaten Rembang dengan penduduk miskin Tahun 2018 sebesar 15,41% (18,35%) pada Tahun 2017.



Pada skala eks Karsidenan Banyumas dan daerah yang berbatasan langsung, Kabupaten Banjarnegara berada di peringkat 5. Kabupaten Batang dan Pekalongan yang berada di pesisir utara pulau jawa dapat menekan angka kemiskinan dibawah 11%. Pada provinsi Jawa Tengah penurunan angka kemiskinan Kabupaten Banjarnegara tergolong paling kecil (satu-satunya yang dibawah 2% penurunnya). Penurunan di atas 3% dicapai oleh Kabupaten Banyumas (3,55%) dan Kabupaten Purbalingga (3,18%), Kabupaten Wonosobo (penurunan (2,74%), dan Kabupaten Kebumen (penurunan 2,13%). Kondisi tersebut jika tidak disikapi dengan baik dapat mengakibatkan tertinggalnya kondisi kemiskinan di level Provinsi.

Apabila dibandingkan dengan tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional makadapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3. 40
Angka Kemiskinan Eks – Karesidenan Banyumas dan Kabupaten yang Berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara



Sumber Data : Badan Pusat Statistik

Penurunan kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari program-program *pro-poor* yang dialokasikan dari berbagai stakeholder. Pada Tahun 2018, TKPK Kabupaten Banjarnegara melakukan identifikasi anggaran, dimana dana sebesar Rp781.602.218.631,- dapat digolongkan sebagai anggaran yang *pro-poor*. Dana tersebut bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APB Desa, CSR, maupun dari Masyarakat dalam hal ini BAZ. Dana-dana tersebut digolongkan kedalam 4 strategi penanggulangan kemiskinan, yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan akses cakupan pelayanan dasar masyarakat miskin (Rp428.639.060.200,- atau 54,84%);
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin (Rp 50.591.564.781,- atau 6,47%);



- 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil (Rp3.299.268.650,- atau 0,42%);
- 4. Melakukan sinergitas kebijakan dan program yang mendukung pengentasan kemiskinan (Rp299.072.325.000,- atau 38, 26%)

Keberhasilan memadukan seluruh program menjadi titik penting dalam penurunan angka kemiskinan. Terdapat satu hal yang mungkin bisa dilakukan yaitu memperbaiki proporsi anggaran pada strategi 2 dan strategi 3 agar akselerasi penurunan semakin baik.

Sasaran 6 :

Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018			Tahun 2022 (Akhir RPJMD)		Keterangan
		Target	Realisasi	%	Target	%	
Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2	-0,28	140	-0,2	140	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian				140		140	

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012, jenis PMKS meliputi : Anak balita terlantar, anak terlantar, anak yang berhadapan dengan hukum (ANH), anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan (ADK), anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang memerlukan perlindungan khusus, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, tuna susila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lembaga keasyarakatan (BWBLP), orang dengan HIV/AIDS (ODHA), korban penyalahgunaan NAPZA, korban trafficking, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial (PMBS), korban bencana alam, korban bencana sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial psikologis, komoditas adat terpencil.

Penurunan PMKS yang ditargetkan sebesar 0,2% dari 89.769 jiwa dapat terealisasi sebesar 0,28% atau menjadi 89.514 jiwa. Dan bila dibandingkan dengan target jangka menengah maka tercapai dengan rata-rata 140%.



Capaian penurunan PMKS tercapai sebesar 0,28% karena semakin meningkatnya penanganan permasalahan sosial di Kabupaten Banjarnegara. Penanganan peningkatan kesejahteraan sosial meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dan Kartu Jawa Tengah Sejahtera yang semuanya bersumber pada Basis Data Terpadu Kemiskinan serta program penanganan fakir miskin melalui kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Banjarnegara.

Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Dalam istilah internasional dikenal dengan *Conditional Cash Transfer* (CCT). Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mengalami kenaikan setiap tahun mulai dari Tahun 2015 sampai dengan tahun 2018. Jumlah KPM PKH meningkat mulai dari 17.954 KPM pada Tahun 2015, 30.901 KPM Tahun 2016, 32.950 KPM Tahun 2017 dan Tahun 2018 sebanyak 50.055 KPM.

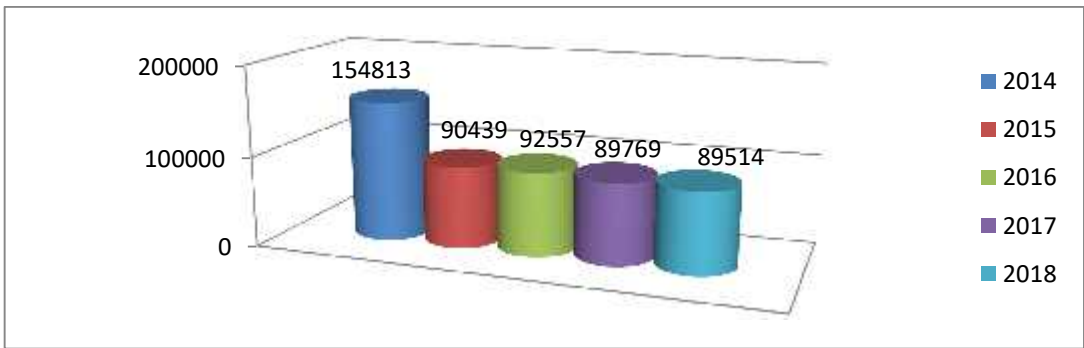
Selain itu, meningkatnya peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial juga mempengaruhi penurunan jumlah PMKS. Masyarakat baik secara perseorangan, lembaga atau komunitas turut serta melakukan penanganan PMKS. Penanganan berupa pendampingan, pemberian informasi atau akses yang digunakan oleh PMKS atau berupa bantuan langsung kepada PMKS.

Semakin meningkatnya kemampuan manajerial lembaga lembaga kesejahteraan sosial serta meningkatnya kapasitas PSKS perorangan seperti TKSK, Pekerja Sosial Masyarakat, Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial Perlindungan anak, TAGANA juga mendorong penanganan kesejahteraan sosial semakin luas. Akses informasi dan edukasi bagi PMKS juga akan semakin meningkat kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun jumlah PMKS per tahun mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 setiap tahunnya mengalami penurunan mulai dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018. Hal ini sesuai dengan semakin meningkatnya jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan baik dari program Kementerian sosial berupa PKH, BPNT maupun program dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3. 41
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014-2018



Sumber Data : Dinsos Kabupaten Banjarnegara

Untuk mendukung capaian indikator sasaran tersebut dicapai melalui program :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.
2. Program Pembinaan anak terlantar.
3. Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma.
4. Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks napi, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.
6. Program Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Efektivitas dan efisiensi anggaran dilihat dari seberapa besar anggaran yang ada berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Bupati.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bupati kebijakan yang dilakukan dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan dilakukannya realokasi anggaran terhadap program dan kegiatan yang mendukung secara langsung terhadap pembangunan infrastruktur. Adapun efisiensi anggaran yang dialokasikan pada Tahun 2018 sebesar Rp302.219.544.800,- dari anggaran Tahun 2017 190.772.914.000,- atau mengalami kenaikan Rp111.446.630.800,- atau 58,41%

C. REALISASI KEUANGAN

Pencapaian Kinerja Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara pada umumnya cukup berhasil dalam mencapai sasaran. Alokasi anggaran pada Tahun 2018 adalah sebesar Rp977.317.943.000,- dan telah



direalisasikan sebesar Rp910.705.932.033,- atau sebesar 93,18%. Adapun rincian realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.



BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah diuraikan di Bab III pencapaian 5 (lima) Misi, dilaksanakan melalui 12 (dua belas) tujuan dan 13 (tiga belas) indikator tujuan, 28 (dua puluh delapan) sasaran dan 31 (tiga puluh satu) Indikator Kinerja. Dari 12 (dua belas) tujuan yang diukur dengan 13 (tiga belas) indikator tujuan, 12 (dua belas) indikator tercapai dengan hasil sangat tinggi dan 1 (satu) indikator tercapai dengan hasil tinggi. Sementara dari 31 (tiga puluh satu) indikator sasaran, 28 indikator telah tercapai dengan hasil sangat tinggi, 1 indikator tercapai dengan hasil tinggi dan 2 indikator tercapai dengan hasil sedang. Adapun indikator sasaran dengan kategori sedang, antara lain :

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan;
2. Persentase Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak huni;

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian indikator dalam kategori sedang, secara intensif dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Upaya pencapaian indikator pertumbuhan sektor perdagangan dilakukan dengan mengoptimalkan aktivitas ekonomi pada sektor usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil & Sepeda Motor sebagai jenis usaha yang paling banyak dilakukan di Kabupaten Banjarnegara melalui pembangunan jejaring dan pemanfaatan teknologi. Selain itu aktivitas pada sektor lain juga perlu dikembangkan untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan.

2. Persentase MBR yang menghuni rumah layak huni

Upaya pencapaian indikator persentase masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak huni dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak terkait untuk meningkatkan jumlah rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Adapun kerjasama yang dilakukan antara lain dengan :

- a. Lembaga non kedinasan yang mendonasikan sejumlah dana untuk membantu pemugaran/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- b. Badan Amil Zakat (BAZ) dengan mengalokasikan sebagian dana Zakat yang dikelola untuk pemugaran/pembangunan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- c. Pihak swasta melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR);



- d. Melibatkan Pemerintah Desa untuk mengalokasikan pemugaran rumah tidak layak huni atau membangun rumah layak huni melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018, dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan/kegagalan secara lebih luas dan mendalam.

Namun disadari pula bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja ini masih banyak kelemahan dan kekurangan, untuk itu diharapkan saran, kritik dan masukan demi penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja yang akan datang.

Banjarnegara, Maret 2019

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO



**PERJANJIAN KINERJA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2018**

**MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN,
DAMAI DAN DEMOKRATIS**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	67,75
2.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	18,95
3.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	63,36
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	PilGub 55
5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,25

**MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	78,5



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan desa berkembang	%	3

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	63
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan Sawah yang teralir jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.524
3.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,5
		Nilai Tukar Petani (umum)	%	102
4.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3
5.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10
		Persentase koperasi sehat	%	34
6.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	10
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 4,9
8.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	6,1
9.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
10.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3 ± 1
11.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,47
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,5

MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA PROFESIONAL”

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP
2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,02

MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	> 90
2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	83 ± 1
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,35
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	$11,5 \pm 0,2$
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,80



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET
5.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	17
6.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.560.868.238,00	APBD
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.512.490.300,00	APBD
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	349.996.000,00	APBD
4.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	75.000.000,00	APBD
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.073.931.000,00	APBD
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.752.817.500,00	APBD
7.	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	203.401.075.900,00	APBD
8.	Program pemberdayaan jasa usaha	1.020.485.000,00	APBD
9.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.471.000.000,00	APBD
10.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.734.449.000,00	APBD
11.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11.834.898.800,00	APBD
12.	Program Keluarga Berencana	8.558.037.000,00	APBD
13.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	78.025.000,00	APBD
14.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.338.215.180,00	APBD
15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	94.756.107.000,00	APBD
16.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	30.000.000,00	APBD
17.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.028.490.000,00	APBD
18.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.388.952.000,00	APBD
19.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	162.000.000,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
20.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	423.790.000,00	APBD
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	225.000.000,00	APBD
22.	Program pengembangan data/informasi	275.000.000,00	APBD
23.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	125.000.000,00	APBD
24.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	830.000.000,00	APBD
25.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	376.500.000,00	APBD
26.	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.300.000.000,00	APBD
27.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	898.600.000,00	APBD
28.	Program Pengembangan Perumahan	2.631.156.000,00	APBD
29.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	167.000.000,00	APBD
30.	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	60.000.000,00	APBD
31.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	33.400.000,00	APBD
32.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	317.790.000,00	APBD
33.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	8.851.426.500,00	APBD
34.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.000.000,00	APBD
35.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	778.000.000,00	APBD
36.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	150.000.000,00	APBD
37.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	30.000.000,00	APBD
38.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.170.000.000,00	APBD
39.	Program Kerjasama Pembangunan	150.000.000,00	APBD
40.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000,00	APBD
41.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	642.537.000,00	APBD
42.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.282.386.000,00	APBD
43.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	104.200.000,00	APBD
44.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	12.562.241.000,00	APBD
45.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	900.000.000,00	APBD
46.	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.787.081.000,00	APBD
47.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	225.000.000,00	APBD
48.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	161.687.500,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
49.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	75.000.000,00	APBD
50.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	50.000.000,00	APBD
51.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.494.475.000,00	APBD
52.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50.000.000,00	APBD
53.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	362.000.000,00	APBD
54.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	320.225.000,00	APBD
55.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	295.000.000,00	APBD
56.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	124.740.000,00	APBD
57.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	95.000.000,00	APBD
58.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	425.000.000,00	APBD
59.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.188.985.000,00	APBD
60.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	30.888.907.550,00	APBD
61.	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	345.000.000,00	APBD
62.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	40.000.000,00	APBD
63.	Program pelayanan kontrasepsi	467.100.000,00	APBD
64.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	11.326.749.000,00	APBD
65.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	15.000.000,00	APBD
66.	Program pembinaan anak terlantar	53.440.500,00	APBD
67.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	50.000.000,00	APBD
68.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	19.923.000,00	APBD
69.	Program Pendidikan Menengah	15.039.972.400,00	APBD
70.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	50.000.000,00	APBD
71.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	425.000.000,00	APBD
72.	Program pengembangan Kemitraan	290.000.000,00	APBD
73.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	207.995.000,00	APBD
74.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	170.000.000,00	APBD
75.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	150.000.000,00	APBD
76.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	80.000.000,00	APBD
77.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	210.000.000,00	APBD
78.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	147.000.000,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
79.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	410.000.000,00	APBD
80.	Program Peningkatan Sumber Daya Perpustakaan	115.000.000,00	APBD
81.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000,00	APBD
82.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	230.000.000,00	APBD
83.	Program kerjasama informasi dengan mas media	865.000.000,00	APBD
84.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	80.000.000,00	APBD
85.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	415.000.000,00	APBD
86.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100.000.000,00	APBD
87.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100.000.000,00	APBD
88.	Program Pendidikan Non Formal	4.270.875.000,00	APBD
89.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	8.504.720.900,00	APBD
90.	Program peningkatan kapasitas aparaturn pemerintah desa	190.000.000,00	APBD
91.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	364.605.000,00	APBD
92.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	877.396.000,00	APBD
93.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	9.693.356.900,00	APBD
94.	Program Mitigasi Bencana Geologi	600.000.000,00	APBD
95.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	378.780.000,00	APBD
96.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	394.743.000,00	APBD
97.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	50.000.000,00	APBD
98.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	40.000.000,00	APBD
99.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	75.000.000,00	APBD
100.	Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset daerah	1.700.000.000,00	APBD
101.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	18.400.000,00	APBD
102.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	APBD
103.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	405.000.000,00	APBD
104.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.059.380.000,00	APBD
105.	Program Penyelematan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah	230.000.000,00	APBD
106.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	570.000.000,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
107.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	607.100.000,00	APBD
108.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	80.000.000,00	APBD
109.	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	200.000.000,00	APBD
110.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.924.555.000,00	APBD
111.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.809.525.000,00	APBD
112.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	66.120.000,00	APBD
113.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	207.566.500,00	APBD
114.	Program pengembangan budidaya perikanan	2.144.086.450,00	APBD
115.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	50.000.000,00	APBD
116.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	60.000.000,00	APBD
117.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	612.300.000,00	APBD
118.	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi	55.000.000,00	APBD
119.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.251.396.850,00	APBD
120.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	29.200.000,00	APBD
121.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan	118.900.000,00	APBD
122.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.331.753.000,00	APBD
123.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.829.180.000,00	APBD
124.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.716.254.000,00	APBD
125.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7.900.000,00	APBD
126.	Program Penataan Transportasi Perkotaan	3.100.000,00	APBD
127.	Program pendidikan politik masyarakat	97.500.000,00	APBD
128.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.163.290.000,00	APBD
129.	Program pengembangan perikanan tangkap	100.000.000,00	APBD
130.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.071.462.000,00	APBD
131.	Program perencanaan pembangunan daerah	925.000.000,00	APBD
132.	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	350.000.000,00	APBD
133.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	400.000,00	APBD
134.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	250.000.000,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
135.	Program Peningkatan Pelayanan Perparkiran	220.000.000,00	APBD
136.	Program Penyelenggaraan BOS	88.523.450.032,00	APBD
137.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	780.000.000,00	APBD
138.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	93.500.000,00	APBD
139.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	39.677.000,00	APBD
140.	Program Penanganan Pasca Bencana	100.000.000,00	APBD
141.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.368.000,00	APBD
142.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	50.000.000,00	APBD
143.	Program perencanaan sosial dan budaya	466.500.000,00	APBD
144.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.652.066.500,00	APBD
145.	Program Kesiapsiagaan	465.000.000,00	APBD
146.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	9.462.695.000,00	APBD
147.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	230.000.000,00	APBD
148.	Program Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan	300.000.000,00	APBD
149.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	24.765.947.000,00	APBD
150.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	80.000.000,00	APBD
151.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	45.000.000,00	APBD
152.	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	640.000.000,00	APBD
153.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	875.300.000,00	APBD
154.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	27.798.671.100,00	APBD
155.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	69.878.000,00	APBD
156.	Program Tanggap Darurat	150.000.000,00	APBD
157.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	346.200.000,00	APBD
158.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	9.472.480.000,00	APBD
159.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.000.000.000,00	APBD
160.	Program Pendidikan Kedisnasan	150.000.000,00	APBD
161.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.798.624.000,00	APBD
162.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	300.000.000,00	APBD
163.	Program peningkatan pelayanan kesehatan	84.227.602.000,00	APBD



NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	2	3	4
164.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	APBD
165.	Program Bidang Cipta Karya	11.702.170.900,00	APBD
166.	Program Peningkatan Kapasitas SDM BUMD	49.650.000,00	APBD
167.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	570.000.000,00	APBD
168.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.261.441.500,00	APBD
169.	Program pengembangan SDM dan data base	314.725.000,00	APBD
170.	Pogram pencegahan dan pemberantasan penyakit	3.692.206.000,00	APBD
171.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	272.800.000,00	APBD
JUMLAH		977.317.943.000,00	APBD

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO



**PENGUKURAN KINERJA KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2018**

**MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TERTIB, AMAN,
DAMAI DAN DEMOKRATIS**

N O	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketenteraman, ketertiban dan keamanan lingkungan	Indeks ketenteraman dan ketertiban Masyarakat	Angka	67,75	78,75	116,24
2.	Meningkatnya kualitas kesiapsiagaan dan ketanggapdaruratan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	18,95	20	105,54
3.	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks Kebudayaan	Angka	63,36	55,34	87,34
4.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi	Presentase pemilih dalam pemilu	%	PilGub 55	66,31	120,56
5.	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	67,25	66,44	98,80



MISI 2 : MEWUJUDKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN KONSEP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Angka	78,5	79,19	100,88
2.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai AKIP Kabupaten Banjarnegara	Nilai	B	B	100
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa	Persentase Peningkatan desa berkembang	%	3	9,32	310

MISI 3 MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKESINAMBUNGAN : DAN BERBASIS PADA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	63	70,104	111,27
2.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi	Luasan Sawah yang teralir jaringan irigasi dalam kondisi baik	Ha	15.524	15.832	101,98
3.	Meningkatnya kinerja sektor pertanian dan perikanan	Pertumbuhan sektor pertanian	%	2,5	3,19	127,6
		Nilai Tukar Petani (umum)	%	102	106,48	104,39
4.	Meningkatnya kinerja sektor pariwisata	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	%	3	5,32	177,33



NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
5.	Meningkatnya kinerja UKM dan koperasi	Kontribusi UKM terhadap PDRB	%	10	10,6	106
		Persentase koperasi sehat	%	34	34,60	101,76
6.	Meningkatnya jumlah investasi	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	%	10	14,62	146,2
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	< 4,9	4	118,37
8.	Meningkatnya kinerja sektor industri	Pertumbuhan sektor industri	%	6,1	7,31	119,84
9.	Meningkatnya kinerja sektor perdagangan	Pertumbuhan sektor perdagangan	%	8	6,04	75,5
10.	Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	3 ± 1	3,04	100
11.	Meningkatnya pemerataan pembangunan antar wilayah kecamatan	Indeks Williamson	Angka	0,47	0,46	102,13
12.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	67,5	70,07	103,8



**MISI 4 MEWUJUDKAN TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH YANG EFEKTIF,
: EFISIEN, PRODUKTIF, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL DENGAN TENAGA
PROFESIONAL”**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	Opini	WTP	WTP*	100
2.	Meningkatnya kemandirian daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	%	9,02	11,37	126,05

**MISI 5 : MEWUJUDKAN KEMARTABATAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MELALUI PENINGKATAN CAKUPAN PEMENUHAN HAK DASAR**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketahanan pangan	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	> 90	85,9	95,44
2.	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	%	83 ± 1	61,46	74,05
3.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,35	6,27*	98,74
		Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,5 ± 0,2	11,41*	100
4.	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Angka usia harapan hidup	Tahun	73,80	73,79*	99,9
5.	Meningkatnya jumlah penduduk di atas garis kemiskinan	Persentase penduduk miskin	%	17	15,46	109,06
6.	Meningkatnya penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase Penurunan PMKS	%	-0,2	-0,28	140



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.560.868.238,00	91.538.005.163,00	92,87
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	41.512.490.300,00	37.961.383.160,00	91,45
3.	Program peningkatan disiplin aparatur	349.996.000,00	312.015.000,00	89,15
4.	Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS	75.000.000,00	54.295.700,00	72,39
5.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	6.073.931.000,00	5.392.648.575,00	88,78
6.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.752.817.500,00	1.614.315.186,00	92,10
7.	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	203.401.075.900,00	201.212.490.905,00	98,92
8.	Program pemberdayaan jasa usaha	1.020.485.000,00	772.521.035,00	75,70
9.	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.471.000.000,00	1.126.038.112,00	76,55
10.	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	7.734.449.000,00	7.235.857.534,00	93,55
11.	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	11.834.898.800,00	10.395.281.648,00	87,84
12.	Program Keluarga Berencana	8.558.037.000,00	4.826.773.384,00	56,40
13.	Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	78.025.000,00	65.591.800,00	84,07
14.	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.338.215.180,00	10.324.517.727,00	91,06
15.	Program pembangunan jalan dan jembatan	94.756.107.000,00	90.766.388.335,00	95,79
16.	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	30.000.000,00	29.460.000,00	98,20
17.	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	2.028.490.000,00	1.896.128.746,00	93,47
18.	Program Penataan Administrasi Kependudukan	2.388.952.000,00	1.863.778.006,00	78,02
19.	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	162.000.000,00	149.022.500,00	91,99
20.	Program Pendidikan Anak Usia Dini	423.790.000,00	415.863.750,00	98,13
21.	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	225.000.000,00	221.861.865,00	98,61
22.	Program pengembangan data/informasi	275.000.000,00	265.692.979,00	96,62
23.	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	125.000.000,00	119.728.000,00	95,78
24.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	830.000.000,00	781.910.450,00	94,21
25.	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	376.500.000,00	294.915.824,00	78,33
26.	Program Pengembangan Nilai Budaya	1.300.000.000,00	1.255.169.750,00	96,55



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
27.	Program pengembangan pemasaran pariwisata	898.600.000,00	871.958.000,00	97,04
28.	Program Pengembangan Perumahan	2.631.156.000,00	2.561.451.600,00	97,35
29.	Program pengembangan wilayah transmigrasi	167.000.000,00	153.950.300,00	92,19
30.	Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	60.000.000,00	50.857.600,00	84,76
31.	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	33.400.000,00	33.347.339,00	99,84
32.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	317.790.000,00	311.622.526,00	98,06
33.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	8.851.426.500,00	8.261.328.196,00	93,33
34.	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	160.000.000,00	155.597.750,00	97,25
35.	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	778.000.000,00	750.866.356,00	96,51
36.	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	150.000.000,00	149.207.100,00	99,47
37.	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	30.000.000,00	28.965.000,00	96,55
38.	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	1.170.000.000,00	202.780.027,00	17,33
39.	Program Kerjasama Pembangunan	150.000.000,00	145.723.900,00	97,15
40.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000,00	71.713.300,00	95,62
41.	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	642.537.000,00	535.719.600,00	83,38
42.	Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	1.282.386.000,00	1.278.991.300,00	99,74
43.	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	104.200.000,00	89.022.542,00	85,43
44.	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	12.562.241.000,00	2.599.109.586,00	20,69
45.	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	900.000.000,00	886.471.600,00	98,50
46.	Program pengembangan destinasi pariwisata	3.787.081.000,00	3.550.666.710,00	93,76
47.	Program pengembangan industri kecil dan menengah	225.000.000,00	197.775.610,00	87,90
48.	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	161.687.500,00	157.748.300,00	97,56
49.	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	75.000.000,00	74.765.200,00	99,69
50.	Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	50.000.000,00	49.544.000,00	99,09
51.	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1.494.475.000,00	1.393.499.714,00	93,24
52.	Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	50.000.000,00	46.491.800,00	92,98



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
53.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	362.000.000,00	322.704.460,00	89,14
54.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	320.225.000,00	287.972.750,00	89,93
55.	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	295.000.000,00	264.631.150,00	89,71
56.	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	124.740.000,00	102.261.450,00	81,98
57.	Program peningkatan peran serta kepemudaan	95.000.000,00	94.996.400,00	100,00
58.	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	425.000.000,00	420.025.946,00	98,83
59.	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.188.985.000,00	9.363.559.408,00	48,80
60.	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	30.888.907.550,00	30.318.022.301,00	98,15
61.	Pogram peningkatan pelayanan angkutan	345.000.000,00	325.139.220,00	94,24
62.	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	40.000.000,00	39.237.200,00	98,09
63.	Program pelayanan kontrasepsi	467.100.000,00	256.874.400,00	54,99
64.	Program pembangunan turap/talud/bronjong	11.326.749.000,00	11.002.326.536,00	97,14
65.	Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	15.000.000,00	10.914.300,00	72,76
66.	Program pembinaan anak terlantar	53.440.500,00	53.066.500,00	99,30
67.	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	50.000.000,00	43.876.900,00	87,75
68.	Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	19.923.000,00	17.645.100,00	88,57
69.	Program Pendidikan Menengah	15.039.972.400,00	14.602.311.360,00	97,09
70.	Program Pengawasan Obat dan Makanan	50.000.000,00	46.508.800,00	93,02
71.	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	425.000.000,00	420.976.250,00	99,05
72.	Program pengembangan Kemitraan	290.000.000,00	289.250.000,00	99,74
73.	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	207.995.000,00	163.487.134,00	78,60
74.	Program pengembangan wawasan kebangsaan	170.000.000,00	138.779.550,00	81,64
75.	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	150.000.000,00	135.231.454,00	90,15
76.	Program peningkatan dan pengembangan ekspor	80.000.000,00	60.428.900,00	75,54
77.	Program peningkatan kemampuan teknologi industri	210.000.000,00	188.767.440,00	89,89
78.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	147.000.000,00	134.690.700,00	91,63
79.	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	410.000.000,00	371.276.650,00	90,56
80.	Program Peningkatan Sumber Daya Perpustakaan	115.000.000,00	112.345.040,00	97,69



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
81.	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	50.000.000,00	49.293.297,00	98,59
82.	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	230.000.000,00	209.501.650,00	91,09
83.	Program kerjasama informasi dengan mas media	865.000.000,00	857.197.588,00	99,10
84.	Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan	80.000.000,00	77.687.400,00	97,11
85.	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	415.000.000,00	387.848.380,00	93,46
86.	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100.000.000,00	93.962.500,00	93,96
87.	Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	100.000.000,00	97.669.700,00	97,67
88.	Program Pendidikan Non Formal	4.270.875.000,00	4.105.457.500,00	96,13
89.	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	8.504.720.900,00	7.852.872.276,00	92,34
90.	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	190.000.000,00	187.933.300,00	98,91
91.	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	364.605.000,00	357.955.000,00	98,18
92.	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	877.396.000,00	826.942.300,00	94,25
93.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	9.693.356.900,00	9.428.912.800,00	97,27
94.	Program Mitigasi Bencana Geologi	600.000.000,00	575.849.470,00	95,97
95.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	378.780.000,00	374.110.900,00	98,77
96.	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	394.743.000,00	360.124.700,00	91,23
97.	Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan	50.000.000,00	32.823.000,00	65,65
98.	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	40.000.000,00	38.094.500,00	95,24
99.	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	75.000.000,00	73.029.000,00	97,37
100.	Program peningkatan dan pengembangan penatausahaan aset daerah	1.700.000.000,00	1.669.432.496,00	98,20
101.	Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	18.400.000,00	18.017.646,00	97,92
102.	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	30.000.000,00	29.999.700,00	100,00
103.	Program peningkatan peran perempuan di perdesaan	405.000.000,00	387.063.032,00	95,57
104.	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.059.380.000,00	1.967.070.851,00	95,52
105.	Program Penyelamatan dan Pelestarian dokumen/Arsip Daerah	230.000.000,00	213.255.500,00	92,72



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
106.	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	570.000.000,00	534.514.282,00	93,77
107.	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	607.100.000,00	550.533.112,00	90,68
108.	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	80.000.000,00	75.162.700,00	93,95
109.	Program Inspeksi kondisi jalan dan jembatan	200.000.000,00	180.221.000,00	90,11
110.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	2.924.555.000,00	2.371.479.394,00	81,09
111.	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.809.525.000,00	1.725.151.160,00	95,34
112.	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	66.120.000,00	58.274.800,00	88,13
113.	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	207.566.500,00	193.242.122,00	93,10
114.	Program pengembangan budidaya perikanan	2.144.086.450,00	1.962.951.280,00	91,55
115.	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	50.000.000,00	45.378.600,00	90,76
116.	Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	60.000.000,00	59.420.000,00	99,03
117.	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	612.300.000,00	598.425.750,00	97,73
118.	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi	55.000.000,00	53.212.500,00	96,75
119.	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	26.251.396.850,00	25.112.790.619,00	95,66
120.	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	29.200.000,00	26.362.340,00	90,28
121.	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	118.900.000,00	86.458.993,00	72,72
122.	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.331.753.000,00	1.216.264.211,00	91,33
123.	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	2.829.180.000,00	2.658.665.567,00	93,97
124.	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2.716.254.000,00	2.572.937.539,00	94,72
125.	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	7.900.000,00	4.555.500,00	57,66
126.	Program Penataan Transportasi Perkotaan	3.100.000,00	2.615.000,00	84,35
127.	Program pendidikan politik masyarakat	97.500.000,00	96.744.500,00	99,23
128.	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	3.163.290.000,00	2.003.852.666,00	63,35
129.	Program pengembangan perikanan tangkap	100.000.000,00	95.350.000,00	95,35
130.	Program peningkatan produksi hasil peternakan	1.071.462.000,00	977.324.900,00	91,21
131.	Program perencanaan pembangunan daerah	925.000.000,00	853.163.344,00	92,23



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
132.	Program Perencanaan Wilayah dan Sumber Daya Alam	350.000.000,00	288.612.400,00	82,46
133.	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	400.000,00	200.000,00	50,00
134.	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	250.000.000,00	244.400.072,00	97,76
135.	Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan	220.000.000,00	187.728.520,00	85,33
136.	Program Penyelenggaraan BOS	88.523.450.032,00	85.325.511.786,00	96,39
137.	Program perencanaan pembangunan ekonomi	780.000.000,00	721.339.300,00	92,48
138.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	93.500.000,00	92.630.700,00	99,07
139.	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	39.677.000,00	34.653.462,00	87,34
140.	Program Penanganan Pasca Bencana	100.000.000,00	94.322.781,00	94,32
141.	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	77.368.000,00	77.326.200,00	99,95
142.	Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	50.000.000,00	47.703.600,00	95,41
143.	Program perencanaan sosial dan budaya	466.500.000,00	437.321.400,00	93,75
144.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	3.652.066.500,00	3.352.790.441,00	91,81
145.	Program Kesiapsiagaan	465.000.000,00	458.119.499,00	98,52
146.	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	9.462.695.000,00	9.090.107.904,00	96,06
147.	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	230.000.000,00	223.896.950,00	97,35
148.	Program Pengembangan Budidaya Pertanian, Peternakan dan Perikanan	300.000.000,00	283.425.400,00	94,48
149.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	24.765.947.000,00	23.540.625.725,00	95,05
150.	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	80.000.000,00	74.946.150,00	93,68
151.	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	45.000.000,00	44.391.382,00	98,65
152.	Program perancangan prasarana wilayah dan sumber daya alam	640.000.000,00	569.789.604,00	89,03
153.	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	875.300.000,00	828.529.203,00	94,66
154.	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	27.798.671.100,00	25.394.091.233,00	91,35
155.	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	69.878.000,00	42.333.000,00	60,58
156.	Program Tanggap Darurat	150.000.000,00	146.589.102,00	97,73
157.	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	346.200.000,00	333.240.383,00	96,26



NO	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
158.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	9.472.480.000,00	9.099.701.588,00	96,06
159.	Program Pembinaan Lingkungan Sosial	4.000.000.000,00	3.860.767.800,00	96,52
160.	Program Pendidikan Kedinasan	150.000.000,00	145.139.600,00	96,76
161.	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	6.798.624.000,00	6.649.566.259,00	97,81
162.	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	300.000.000,00	215.042.672,00	71,68
163.	Program peningkatan pelayanan kesehatan	84.227.602.000,00	77.928.634.687,00	92,52
164.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	84.844.000,00	84,84
165.	Program Bidang Cipta Karya	11.702.170.900,00	10.517.795.821,00	89,88
166.	Program Peningkatan Kapasitas SDM BUMD	49.650.000,00	49.070.415,00	98,83
167.	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	570.000.000,00	512.307.490,00	89,88
168.	Program Perencanaan Tata Ruang	1.261.441.500,00	1.144.834.517,00	90,76
169.	Program pengembangan SDM dan data base	314.725.000,00	193.636.350,00	61,53
170.	Pogram pencegahan dan pemberantasan penyakit	3.692.206.000,00	3.333.781.032,00	90,29
171.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	272.800.000,00	263.753.321,00	96,68
JUMLAH		977.297.943.000,00	910.705.932.033,00	93,19

BUPATI BANJARNEGARA

BUDHI SARWONO